



SENI DI RUANG PUBLIK,
Monumen & Tata Kota



AKADEMI JAKARTA



LIPI

SENI DI RUANG PUBLIK, Monumen & Tata Kota

A.D. Pirous
Fauzi Bowo
Marco Kusumawijaya
Siebe Thissen
Sunaryo

Editor :
Sukri Abdurrachman



AKADEMI JAKARTA
Bekerjasama dengan
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

©2007 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Seni Di Ruang Publik, Monumen & Tata Kota/Sukri Abdurrachman
- Jakarta: LIPI Press, 2007
vii + 112 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-206-4

1. Monumen
2. Tata Kota

725. 94

Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi

Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350

Telp. (021) 3140228, 3146942, Fax (021) 3144591

E-mail : press@mail.lipi.go.id

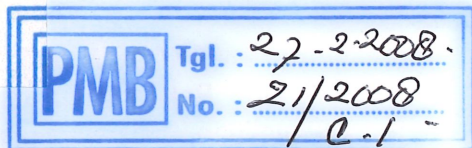
bmlipi@centrin.net.id

lipipress@centrin.net.id



*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232

Sumber gambar sampul:
Foto-foto koleksi Eva Tobing



KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan hasil seminar internasional “*Seni di Ruang Publik, Monumen dan Tata Kota*” yang diselenggarakan oleh Akademi Jakarta bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB – LIPI) di Widya Graha LIPI, Jakarta pada tanggal 7 September 2007.

Di dalam buku ini dibahas masalah Seni di Ruang Publik, Monumen dan Tata Kota yang merupakan kegiatan saling terpadu, harmonis, berwawasan, berkesinambungan, memerlukan konsep perencanaan yang jelas dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Proses dan progres yang berkesinambungan inilah yang mungkin dapat membudayakan kota Jakarta, menjadi bumi hunian yang lebih asri dan manusiawi.

Seni di Ruang Publik bukan masalah yang sederhana. Ia berhadapan langsung dengan berbagai ragam warga masyarakat yang memiliki latar belakang yang tingkat apresiasi serta kegemaran yang berbeda-beda. Selain itu, penempatan karya seni di ruang publik juga berhubungan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Umum Tata Wilayah (RUTW). Faktor tuntutan keserasian dan ketepatan lokasi sebuah karya seni ditempatkan di ruang publik, rupanya menjadi masalah yang kompleks dan serius, bukan saja bagi mereka yang bekerja di bidang seni dan tata kota, tetapi juga bagi semua warga masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Karena seni adalah konsumsi rohani manusia yang sifatnya universal.

Jakarta sebagai kota metropolitan dengan penduduk terpadat di Indonesia, telah berkembang begitu cepat dan pesat, sarat dengan rimba gedung-gedung tinggi, dirajut dan dilingkari oleh jalan raya, jalan tol dan jembatan layang, yang beberapa dekade lalu termasuk ke dalam hal yang tidak dapat terbayangkan oleh kita.

Hadirnya berbagai karya seni monumental di Kota Jakarta sejak masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno hingga sekarang. Memperlihatkan adanya kesadaran akan tumbuhnya sebuah kota besar yang memadukan kepentingan fisik yang praktis dengan kebutuhan akan nilai-nilai spritual yang sifatnya lebih intangible, juga mengungkapkan semangat kepahlawanan, kepemimpinan, keagungan, rasa optimisme, persahabatan dan rasa keindahan sebuah kota yang berbudaya. Namun, pada sisi lain, sejalan dengan kemajuan pembangunan kota Jakarta dalam berbagai bidang, banyak manumen, patung yang agung dan monumental pada saat didirikan mulai terdesak, dan bahkan mulai tenggelam oleh lingkungan yang baru. Hal ini mencerminkan “barangkali” belum adanya perencanaan tata kota yang disusun secara komprehensif, terpadu, dan pengawasan dan perawatannya belum optimal. Atau mungkin pula, terlalu tertuju semata pada kepentingan pemerintah dan sponsor, sehingga mengabaikan tata nilai karya seni di ruang publik yang sesungguhnya.

Untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan seni di ruang publik, monumen dan tata kota, dalam seminar ini telah diundang 4 orang pembicara yang ahli dalam bidangnya. Pertama, Dr. Ing. H. Fauzi Bowo, Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur terpilih DKI Jakarta sebagai *Keynote Adress*. Kedua, Dr. Siebe Thissen, Public Art Director, Centre for the Arts Rotterdam, The Netherlands, pembicara tamu dari Rotterdam yang mengemukakan berbagai perkembangan seni di ruang publik kota-kota di Eropa. Ketiga, Dr. Marco Kusumawijaya, Ketua Dewan Kesenian Jakarta dan seorang arsitek perencana kota yang mengemukakan berbagai hal terkait dengan seni dan budaya dalam perencanaan dan perkembangan kota Jakarta. Keempat, Dr. Sunaryo, dosen ITB, seorang seniman pematung yang sangat berpengalaman dengan menciptakan karya seni di ruang publik, yang mengemukakan berbagai pengalaman bagaimana melaksanakan pekerjaan seni di ruang publik yang sifatnya pesanan maupun yang diperoleh dari usaha memenangkan kompetisi pekerjaan seni di ruang publik.

Dalam seminar ini juga telah diundang 125 peserta dengan berbagai latar belakang, seniman, ilmuwan, peneliti, birokrat, pemerhati seni dan budaya, wartawan, perencana tata kota, arsitek dan lain-lain.

Berbagai pemikiran yang cerdas dan mencerahkan telah dikemukakan dalam seminar ini, guna disumbangkan kepada para pengambil keputusan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di bidang seni di ruang publik, monumen dan tata kota di DKI Jakarta di masa depan.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya, LIPI beserta jajarannya, Kedutaan Belanda di Jakarta, para pembicara, moderator, notulis, peserta, dan panitia pelaksana yang telah bekerja keras untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan seminar ini.

Kehadiran buku ini, diharapkan dapat memperkaya wacana di dalam membangun kota Jakarta yang berbudaya, memperhitungkan faktor keasrian dan keindahan alam yang melingkunginya dalam merumuskan kebijakan perencanaan kota yang diinginkan di masa depan.

Jakarta, 31 Desember 2007

Ketua Akademi Jakarta

Prof. Dr. Taufik Abdullah

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
LAPORAN KETUA PANITIA oleh Dr. Muhammad Hisyam, APU.....	vii
SAMBUTAN-SAMBUTAN:	
• Sambutan Wakil Gubernur Jakarta oleh Dr. Ing. H. Fauzi Bowo	xi
• Sambutan Ketua Akademi Jakarta oleh Prof. Dr. Taufik Abdullah.....	xv
• Sambutan Wakil Kepala LIPI oleh Prof. Dr. Lukman Hakim, Apt.	xix
• PENGANTAR SENI DI RUANG PUBLIK, MONUMEN DAN TATA KOTA	xxiii
Prof. A.D. Pirous	
• FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN – BENTUK KARYA SENI DALAM RUANG PUBLIK, SEBAGAI BAGIAN DARI PERENCANAAN KOTA	1
Dr. Ing. H. Fauzi Bowo	
• PUBLIC ART – A ROTTERDAM PERSPECTIVE	7
Dr. Siebe Thissen	
• SENI DALAM PERKEMBANGAN KOTA: HIDUP BERSAMA, MAKIN BERPISAH ?.....	17
Dr. Marco Kusumawijaya	
• MONUMEN URBAN: SENI DI RUANG PUBLIK	41
Dr. Sunaryo	

- PEMAPARAN MAKALAH *KEYNOTE ADDRESS*
WAKIL GUBERNUR DKI 47
Ir. Aurora Tambunan, M.Si
- SESI DISKUSI PERTAMA..... 55
- SESI DISKUSI KEDUA..... 81
- PENUTUP..... 113
Prof. A.D. Pirous

LAPORAN KETUA PANITIA

Dr. Muhammad Hisyam, APU
Kepala Pusat Penelitian Kemyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur dan Gubernur DKI terpilih,
Bapak Dr. Ing. Fauzi Bowo.

Yang terhormat Ketua Akademi Jakarta, Prof. Dr. Taufik Abdullah.

Yang terhormat Wakil Kepala LIPI, Prof. Dr. Lukman Hakim.

Para walikota di seluruh wilayah DKI Jakarta atau yang mewakilinya.

Para Anggota Akademi Jakarta.

Bapak-Bapak, dan Ibu-Ibu, Hadirin Undangan, yang kami hormati.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah, Swt., atas berkah dan karunia-Nya, pada pagi ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini, dalam rangka “*Seminar Internasional: Seni di Ruang Publik, Monumen dan Tata Kota*”. Selamat datang di kampus Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kita cintai bersama ini.

Seminar Internasional: Seni di Ruang Publik, Monumen dan Tata Kota terselenggara atas kerjasama antara Akademi Jakarta dan Pusat Penelitian Kemyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dua lembaga yang berbeda yang bergerak di bidang yang hampir sama. Puslit Kemyarakatan dan Kebudayaan merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan bidang masyarakat dan budaya melalui penelitian-penelitian. Akademi Jakarta adalah lembaga tempat berkumpul para

seniman dan budayawan serta ilmuwan yang merupakan tempat bagi pemerintah DKI untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat ibu kota, khususnya yang mengenai kebudayaan. Kami berharap, kerjasama ini bukan hanya menghasilkan buah pikiran yang tidak saja berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berguna untuk pertimbangan para pejabat terkait dalam mengambil keputusan di bidang ini.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Hadirin, yang kami hormati.

Seni di ruang publik memang bukan masalah yang sederhana. Ia berhadapan langsung dengan berbagai ragam warga masyarakat yang memiliki latar belakang yang tingkat apresiasi serta kegemaran yang berbeda-beda. Seorang awam seperti saya, misalnya, dapat merasakan keindahan seni Patung Arjuna Sosro Bahu di Simpang air mancur, di ujung jalan Merdeka Barat. Akan tetapi, saya juga membaca di media bahwa penempatan patung seperti itu, di tempat yang demikian, tidak cocok. Rupanya, di sana ada faktor tuntutan keserasian dan ketepatan lokasi sebuah karya seni ditempatkan di ruang publik. Dengan demikian, penempatan karya seni di ruang publik itu berhubungan langsung dengan Ilmu Tata Ruang. Jenis karya seni apa yang patut di ruang yang mana, rupanya menjadi masalah yang kompleks dan serius, bukan saja bagi mereka yang bekerja di bidang seni dan tata kota, tetapi juga untuk kita semua, warga masyarakat ibu kota. Mengapa demikian? Ini karena seni adalah konsumsi rohani manusia yang sifatnya universal.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang terhormat.

Tujuan seminar ini adalah menghasilkan pemikiran yang cerdas dan mencerahkan di dalam bidang seni dan penempatannya di ruang publik guna disumbangkan kepada para pengambil keputusan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan di bidang yang terkait. Oleh karena itu, peserta seminar ini selain para seniman, akademisi, dan anggota masyarakat biasa, juga adalah para eksekutif, yakni pejabat terkait dengan pengambilan keputusan bidang ini.

Dengan demikian, pantas kami mengharap hasil seminar ini dapat langsung mempunyai pengaruh di bidang ini di masa depan.

Para hadirin yang kami muliakan.

Adalah menjadi kewajiban kami, selaku panitia, untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus pada semua yang hadir atas ketulusannya meringankan langkah, memenuhi undangan kami. Secara khusus, terima kasih kami tujukan kepada Bapak Wakil Gubernur DKI dan Gubernur terpilih DKI Bapak H.Dr. Ing. Fauzi Bowo, Ketua Akademi Jakarta Prof. Dr. Taufik Abdullah yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga kami untuk menyelenggarakan seminar ini. Terima kasih kami tujukan kepada para pemakalah dan moderator, yang telah bersedia memenuhi permintaan kami.

Akhirnya, atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyelenggaraan seminar ini ada yang kurang berkenan.

Billahitaufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR JAKARTA

Dr. Ing. H. Fauzi Bowo

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua.

Ketua Akademi Jakarta, Prof. Dr. Taufik Abdullah.

Wakil Kepala LIPI, Prof. Lukman Hakim.

Saudara Ketua Panitia, Saudara Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Tata Kota yang hadir di sini.

Atase Kebudayaan dari Kedutaan Belanda, Paul Petrus.

Yang saya hormati para pakar, para pencipta, pemerhati seni dan budaya dan yang mewakili Ikatan Arsitek Indonesia.

Prof. Syafii Ma'arif, Guru saya yang saya hormati.

Ada tiga hal yang secara sangat singkat perlu saya sampaikan kepada Ibu/Bapak/Hadirin/Peserta seminar yang saya hormati.

Pertama, permohonan maaf. Ini yang paling tidak enak didengar, tetapi harus disampaikan. Saya mendadak diminta oleh Presiden untuk ikut rapat yang diadakan juga secara mendadak sebelum beliau berangkat ke Australia pada jam 10 nanti. Saya sekarang, seharusnya, sudah ada di Halim Perdana Kusumah. Tetapi, seperti biasa, kalau anak nakal sedikit tidak apalah, karena saya punya alasan. Seperti biasa, saya akan lebih bahagia bisa tetap di sini membuka seminar ini. Setelah itu ke Halim. Karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab saya.

Kedua, saya tergelitik dengan seminar ini, karena seminar ini sangat menarik dan sangat penting untuk kota Jakarta kalau kita ingin menjadikan kota ini berbudaya di waktu-waktu yang akan datang.

Ketiga, saya akan ulangi *readiness* kita, pemerintah DKI Jakarta ini untuk mendengar para pakar dan masyarakat Jakarta. Saya harap seminar ini bisa memberikan masukan yang berharga buat pemerintah DKI Jakarta. *So, we all*, seluruh warga kota Jakarta, punya *chances* yang besar untuk membantu menciptakan kota Jakarta yang lebih sejahtera, yang lebih sesuai keinginannya lima tahun yang akan datang. Ini adalah komitmen saya dan saya akan *stick* pada komitmen saya. Saya akan mendengarkan apa yang menjadi keinginan anda semua.

Di sisi lain, saya juga tahu bahwa saya tidak akan mampu memuaskan seluruh penduduk Jakarta. Tapi, *at least, I am ready to listen to you*. Saya tawarkan ini kepada semua/seluruh komponen yang ada di Jakarta. Kemarin saya berbicara yang sama di hadapan para Ikatan Arsitek Indonesia. Hari ini saya gembira mendapatkan kesempatan menyampaikan sepatah-dua patah kata di hadapan para pakar, budayawan, dan seniman.

Kita punya keinginan yang sama. Mari kita jadikan Jakarta yang lebih berbudaya. Waktunya tidak banyak, yang saya bisa jamin hanya lima tahun yang akan datang. *The next is not going to be my responsibility any longer*. Tapi selama saya bertanggung jawab, saya akan buka komunikasi seluas mungkin dan saya akan mencoba untuk menampung aspirasi anda semua, sebanyak mungkin dan sebesar mungkin.

Selanjutnya, saya mohon maaf sekali lagi dan saya akan diwakili oleh dua orang yang saya percaya juga pandai mendengar dan ahli di bidangnya, (1) Ibu Aurora Tambunan, Kepala Dinas Kebudayaan dan (2) Saudara Widiatmoko, Kepala Dinas Tata Kota. Dua komponen yang sangat berpengaruh dan yang pasti akan sangat bisa berperan untuk menciptakan ruang-ruang publik yang pantas, yang sesuai dengan kaidah-kaidah penataan kota yang benar dan baik dan menempatkan karya seni yang juga pas. Seperti pak Hisyam tadi katakan, karya seninya baik, tapi tempatnya kurang baik, maka *output*-nya juga kurang cocok. Sebaliknya, karya seninya baik untuk

publik, tapi tempatnya kurang cocok, maka hasilnya barangkali tidak optimal.

Mari kita rumuskan hal-hal yang bermanfaat untuk kota kita ke depan. *So in the end of the day*, kota ini adalah milik kita bersama, bukan hanya milik pemerintah daerah semata-mata. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga dan sangat terhormat ini.

Saya, sekali lagi, mohon maaf. Tapi, saya berharap bahwa seminar ini bisa memberikan masukan yang berharga untuk kita semua ke depan. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SAMBUTAN KETUA AKADEMI JAKARTA

Prof. Dr. Taufik Abdullah

Yang terhormat, Bapak Wakil Kepala LIPI, Atase Kebudayaan Belanda dan juga tamu dari Rotterdam, para anggota Akademi Jakarta dan tamu yang lain.

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Saya masih ingat di tahun 1962 atau 63, waktu Demokrasi Terpimpin lagi jaya, seorang pematung Jepang memberikan kepada pemerintah DKI patung Kartini. Itu ditempatkan di depan BAPENAS sekarang, di depan Taman Suropati. Ketika itu terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan tempatnya tidak cocok. Ada yang mengeritik, Pramudaya Ananta Toer, "*Wah, Kartini, wajahnya, tidak seperti itu. Jadi, tidak pantas itu.*" Tapi, pemerintah mengatakan, "*Ini suatu hadiah. Kita harus menghargai hadiah orang.*" Itu perdebatan pertama yang saya ingat.

Kemudian, di tahun 1970 sampai tahun 1974, selalu saya katakan sebagai *the Indian summer of Indonesian Democracy before a long winter utoritarian rule set in*. Jadi, selama empat tahun kita baru mulai dikatakan suasana yang paling demokratis di Indonesia ini. Segala hal diperdebatkan. Tentang ke mana tujuan pembangunan? Apakah adil lebih dahulu? Apakah makmur lebih dahulu? Apakah *growth* lebih dulu? Apakah *equity*? *Nah*, pada waktu itu juga ada perdebatan diadakan Balai Budaya. Hampir setiap dua minggu ada diskusi tentang segala macam hal, diadakan di Balai Budaya.

Pada waktu itu, Pertamina memberikan pemerintah DKI patung besar, **Pemuda**, di jalan Bengkolan Kebayoran. Patung itu menjadi perdebatan dan diadakanlah seminar, diskusi, satu malam suntuk. Dengan suara yang berapi-api tentang apakah pantas patung itu di sana. Saya lihat patung itu bagus. Cuma, rupanya, *says nothing*, kata orang. Padahal, itu simbol pemuda. Juga pernah menjadi bahan

ejekan patung yang disebut *seven up*. Jadi, rupanya masalah *public art* tidak hanya masalah *decision maker*, tapi juga masalah publik. Publik bisa merasa senang, bisa merasa *annoyed* dengan *public art*.

Kemudian yang terakhir, juga diperdebatkan, seperti yang sudah disebut saudara Hisyam tentang patung wayang itu. Apakah tempatnya cocok di sana? Dalam film *Nagabonar II*, ada adegan Nagabonar berkata, “Tidak semua orang pantas kau hormati, Jenderal.” Rupanya patung Jenderal Sudirman itu memberi hormat. Kepada koruptor dia beri hormat. Kepada siapapun dia begitu juga terus. Hal ini juga diperdebatkan.

Karena itulah, saudara Prof. Pirous, karena dia pelukis tentu saja dia lebih sensitif dari pada saya yang cuma begini-begini membuat rencana dan usul agar Akademi Jakarta mengadakan seminar tentang ini. Kita undang dari pihak eksekutif, seniman, dan ahli dari luar negeri. Dari mana? Apakah dari Jerman? Belanda? Akhirnya, bagaimana kalau dari Rotterdam? *Especially, we elected Rotterdam for a simple reason. Di skala kota-kota Belanda yang paling hancur Rotterdam, almost totally destroyed in the war. Rotterdam has to start from the beginning. Amsterdam is there but Rotterdam almost totally demolished.*

Just like Jakarta. Jakarta, in 1970, there were only two tall buildings, Sarinah and Wisma Nusantara. Now, how many tall buildings in Jakarta? I don't know. There was a time when I could count how many tall buildings Jakarta that I had visited. "I have visited that one, that one and I have not visited that one". But now, I don't dare to count. So, Jakarta had start from the beginning again. Unlike New Delhi, for example in most streets in Jakarta are very small, very narrow. I have a theory, perhaps, because our master at that time did not have the imperial tradition. Everything small like Holland, this is also small. Very small and very narrow. Suddenly, you have to find out that you have to erect tall building and the street are very narrow. How can you do that? But, Rotterdam still very easy because the town almost totally destroyed.

Jadi, karena itulah kita adakan seminar ini. Sebab biasanya perdebatan terjadi setelah *decision* dibuat. Perdebatan baru terjadi setelah *public art was already there*. Jadi, tidak pernah terjadi perdebatan sebelum terjadi. Patung Sudirman dipertanyakan setelah berdiri. Patung Pemuda dimasalahkan setelah berdiri. Kartini diganti dengan Diponegoro, memang diperdebatkan sebelumnya, tetapi keputusannya sudah dibuat. Jadi, sebaiknya sekarang, mudah-mudahan, diskusi publik terjadi sebelum keputusan dibuat.

Saya, Ketua Akademi Jakarta, merasa bersyukur juga, karena, walaupun Pak Gubernur terpilih hanya datang sebentar, tapi memberikan kepastiannya. Itu satu kehormatan bagi kita. Lebih bersyukur lagi karena yang akan memberikan *keynote address* tidak jadi Pak Fauzi Bowo tapi akan dibacakan Ibu Aurora Tambunan.

Pemikiran dari pihak eksekutif akan bisa juga didengar oleh para pemerhati seperti kita dan juga para seniman yang sudah terlibat di dalamnya. Nanti juga akan tampil saudara Ketua Dewan Kesenian Jakarta yang sudah mempunyai perhatian keahlian dalam hal ini dan juga membantu banyak dalam penyelenggaraan seminar ini. Tentu juga, Saudara Sunaryo yang *the creative artist*. Dengan begini, sekali lagi saya berterima kasih kepada Saudara Pirus yang memprakarsai seminar ini dan juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian yang sudah ikut membantu dalam penyelenggaraan seminar ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SAMBUTAN WAKIL KEPALA LIPI

Prof. Dr. Lukman Hakim, Apt

Bapak Prof. Taufik Abdulah, Ketua Akademi Jakarta, yang saya hormati.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di ruangan ini.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan mohon maaf dari Ketua LIPI yang tidak bisa hadir bersama-sama di sini.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merasa bahwa acara kita pagi ini adalah sesuatu yang istimewa, paling tidak bagi saya sendiri, karena apabila kita lihat dalam tema itu, maka di sini ada tiga kata kunci yang sangat kuat, yaitu *art*, *science* dan *public policy*. Bagi saya, ini suatu hal yang kita rindukan. Saya rasa, karena Pak Taufik kebetulan Ketua Akademi Jakarta dan beliau adalah mantan ketua LIPI. Untuk mendekatkan *art* dan *science* di bumi kita ini.

Kalau di luar negeri, *art* dan *science* itu berada di dalam satu departemen. Saya sendiri waktu di Universitas Tokyo, *art* dan *science* itu adalah departemen *science*. Demikian erat satu departemen itu, sehingga dikelola oleh seorang dekan. Tapi, kita itu temboknya dibangun demikian tinggi. Bahkan dahulu, waktu Edi Sedyawati, ketika saya sedang menjadi dewan mahasiswa, itu ada mashab Salemba *plus* Rawamangun yang kadang-kadang susah untuk kumpul. Ada seni untuk mempertemukan cara berpikir Salemba yang teknik dan kedokteran itu dengan berpikir orang dari Rawamangun yang *social science*.

Hari ini, saya kira, kita ingin meruntuhkan tembok itu agar supaya menghasilkan yang lebih komprehensif. Lebih komprehensif di sini memang menyangkut pada seni dan *science*. Kalau orang *science* itu, Ibu Aurora, peneliti-peneliti kita sudah bilang bahwa ini *global warming* akan menaikkan permukaan air laut dan itu akan berakibat bahwa nanti Bundaran HI itu sudah siap belum kalau air

laut itu naik 50 sentimeter. Dulu ketika baru datang di Jakarta, ada *joke* teman saya di Manggarai. Dia bilang, “Kalau air tidak sampai mata kaki, maka Jakarta tidak banjir semua.”. Sekarang mata kakinya itu adalah mata kaki Patung Pancoran itu, jika itu terjadi maka Jakarta 70 persen menjadi terendam.

Jadi, *consideration* tentang *science* yang begitu memang harus menjadi pertimbangan penting buat kita. Bagaimana monumen-monumen itu nanti dengan adanya *pollution*, pemilihan bahan, penempatan topografinya, dan segala macam lainnya. Tetapi yang lebih kompleks, jika kita berharap terlalu banyak semata-mata kepada pemerintah kota, misalnya. Kalau kita lihat adanya pergeseran peran pemerintah, apa yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan? Dan, itu kita kontrol terus, Ibu Aurora. Tapi, sebetulnya ada kekuatan bisnis yang biasa saja kalau dia punya uang dia bisa letakkan monumen yang bisa mengganggu kita, tetapi buat dia itu *my own money*. Apa yang terjadi di kota-kota baru, misalnya, ada macam-macam itu terjadi di Cikarang. Juga itu terjadi di mana-mana. Kalau kekuatan uang yang menentukan, saya kira kontrol publik untuk hal begitu agak terbatas. Karena itu, mula-mula *private domain*. Kalau kita lihat bagaimana peran kota-kota yang masih di kelola sentralistik, misalnya, Vietnam, Indonesia, atau China, tempat itu sangat bisa dijaga oleh pemerintahan yang masih sangat sentralistik dan memegang otoritas yang sangat penuh itu. Tapi ketika kita sudah meliberalisasi ini, peran pemerintah kita perkecil, mekanisme pasar akan bekerja. Dengan kekuatan itu, mereka, *in the real term, they are really governing the city*. Ini juga harus kita pikirkan.

Oleh karena itulah, saya kira, interaksi antara budayawan, ilmuwan dan para perencana dan para pengelola keputusan itu, sekarang makin dipentingkan agar kita mendapat kesepahaman tentang sesuatu itu, ditinjau dari perspektif dua pihak yang demikian itu.

Jadi, *public policy* itu sekarang ini memang tentunya berbeda ketika pemerintah DKI bisa merencanakan Kebijakan dan masih

sangat kuat dan itu sebabnya *single authority* di situ. Tapi sekarang ada mekanisme bisnis yang tidak kalah pentingnya menentukan itu semua. Ini bidang yang sangat kompleks dan tentu saja sangat menarik.

Saya mengucapkan selamat datang dan penghargaan atas peristiwa seperti ini dan pandangan-pandangan yang komprehensif itu tercermin dari adanya perspektif yang lengkap, karena ini menyangkut hajat warga kota dan kita semua tentu berharap bahwa pilihan-pilihan dari Jakarta itu selalu akan menjadi semacam *icon* yang ditiru di seluruh Indonesia. Dan kita yang menjadi warga kota di sini berkewajiban, kiranya, untuk memberikan contoh-contoh yang cerdas, yang indah dan menarik itu.

Dengan ini juga, atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, saya dengan resmi membuka Seminar Internasional: Seni di Ruang Publik, Monumen dan Tata Kota ini. Dengan harapan bahwa seminar ini akan dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi pemerintah maupun masyarakat Jakarta, khususnya, dan bangsa Indonesia, pada umumnya.

Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PENGANTAR

SENI DI RUANG PUBLIK, MONUMEN DAN TATA KOTA

Prof. A.D. Pirous*

Diantara beberapa seminar penting yang dilaksanakan oleh Akademi Jakarta pada tahun 2007, adalah seminar hari ini yang bertopik “**Seni di Ruang Publik, Monumen dan Tata Kota.**” Tema yang memasalahkan karya seni di ruang publik, termasuk monumen dalam kaitan perancangan tata kota ini, menjadi sangat menarik bila dikaitkan dengan usia kota Jakarta yang sudah berusia sekitar 482 tahun, yang juga menjadi ibu kota dari Negara Republik Indonesia yang baru merayakan Hari Ulang Tahunnya ke 62.

Jakarta adalah kota metropolitan, kota terluas dan terpadat di Indonesia. Jakarta dikenal sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (DKI Jaya), yang dikepalai oleh seorang gubernur dengan beberapa wali kotanya. DKI Jaya telah berkembang dengan pesat, dan tumbuh menjadi sebuah kota yang sarat dengan rimba gedung-gedung tinggi, untuk menampung berbagai keperluan dan kepentingan, seperti, gedung untuk Pemerintahan, Perusahaan, Perguruan Tinggi, Bank, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Bandara dan berbagai fasilitas lainnya. DKI Jayapun, dirajut dan dilingkari oleh jalan raya, jalan tol dan jembatan layang serta Bus lines, yang pada beberapa dekade lalu termasuk kedalam hal yang tidak dapat terbayangkan oleh kita.

Disamping itu, di seluruh DKI Jaya tersebar pula monumen, puluhan patung-patung dan tugu, yang dapat dianggap sebagai karya seni di ruang publik. Jakarta juga disarati oleh papan-papan pancang dan tembok besar poster iklan raksasa, menggambarkan pergolakan ekonomi besar yang sedang berjalan saat ini. Menghayati pembangunan kota Jakarta yang begitu cepat, banyak orang menduga atau bisa jadi, kota ini berkembang dalam tatanan yang kurang

* Anggota Akademi Jakarta/Dosen ITB

terencana dengan baik. Banyak pembangunan gedung-gedung yang berjalan sendiri-sendiri tanpa mengacu ke masterplan yang terpadu, dan sering kurang memperhitungkan faktor alam yang melingkunginya.

Hadirnya karya seni monumental dalam berbagai bentuk, seiring mekarnya kota Jakarta secara signifikan telah dimulai sejak masa pemerintahan Bung Karno. Kita kenal sosok Monumen Nasional (Monas), patung Selamat Datang di bundaran Hotel Indonesia, patung Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng, patung Dirgantara di Pancoran, patung Kartini di Jl. Diponegoro, dan patung Petani di Bundaran Menteng. Karya-karya tersebut diungkapkan umumnya melalui bentuk-bentuk patung sosok figuratif yang ekspresif. Kejadian ini memperlihatkan adanya kesadaran akan tumbuhnya sebuah kota besar yang memadukan kepentingan fisik yang praktis dengan kebutuhan akan nilai-nilai spiritual yang sifatnya lebih intangible. Patung-patung itu telah mengungkapkan semangat kepahlawanan, kepemimpinan, keagungan, rasa optimisme, persahabatan dan tentunya rasa keindahan dan kegandrungan terhadap sebuah kota yang berbudaya.

Di masa Orde Baru dan seterusnya, dimana pertumbuhan ekonomi semakin berkembang, demikian pula selera berkesenian melalui bahasa bentuk yang bercitarasa lebih modern, telah melahirkan karya patung dengan bentuk yang lebih abstrak yang lebih menekankan pesan keindahan dan kesan modern (Karya G. Sidharta, RitaWidagdo). Karya seni publik demikian, jelas ingin menafaskan dinamika kota yang sedang tumbuh dengan cepat.

Sebagai perbandingan, di banyak negara di Eropa diantaranya Denmark, sejak 1956 menteri Kebudayaan mereka telah menyediakan dana yang cukup besar untuk seni di ruang publik, malah mengatakan secara resmi, “Bahwa dalam masyarakat kontemporer, pemerintah mempunyai tanggung jawab khusus terhadap seni”.

Pernyataan ini telah mendorong kolaborasi yang semakin erat antara seorang arsitek, seorang perancang kota, para seniman,

pematung dan pelukis, menuju satu kehidupan yang menyadari nilai budaya dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni. Banyak sudut kota tua yang terasa sudah agak kumuh, dihidupkan kembali oleh hadirnya mural-mural super-grafik yang cemerlang dan segar. Kekayaan seni di Ruang Publik ini juga dapat memicu habit, perangai warga kota untuk lebih sadar estetik, hidup indah yang lebih gembira. Disamping itu, dalam kurun waktu yang lebih panjang dapat pula merangsang suasana penciptaan barang-barang, pakaian, benda-benda desain, melalui industri rumah ke dalam bentuk yang lebih modern dan artistik.

Melajunya pembangunan kota Jakarta mulai mengesankan di sana-sini lemahnya perencanaan kota. Wujud bangunan dan sarana kota yang baru sering tidak sinkron dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Banyak monumen, patung yang agung dan monumental pada saat didirikan mulai terdesak, dan bahkan mulai tenggelam oleh lingkungan yang baru. Munculnya gedung-gedung baru yang secara spatial dan formal sudah tidak proporsional lagi terhadap karya-karya seni di ruang publik yang sudah ada, ditambah lagi oleh semrawutnya tiang dan kabel listrik, serta papan-papan iklan raksasa yang penempatannya juga “asal-asalan” dan “*semau gua*”, sehingga sebuah monumen yang mulanya tinggi perkasa, menjadi hilang kegagahannya, sebuah patung yang tadinya anggun dan patriotik, jadi kerdil kurang berwibawa. Ada patung yang terpaksa dibongkar dan di gudangkan karena pelebaran jalan, dan ada pula patung yang secara semena-mena basenya dijepit oleh jembatan layang. Ada pula patung dari pahlawan besar Jendral Sudirman ditempatkan di lingkungan sempit yang menghilangkan keagungannya. Penempatan itu hanya didasarkan pada keinginan agar sesuai dengan nama jalannya. Semua ini mencerminkan “barangkali” belum adanya perencanaan arsitektur kota secara baik, dan terpadu dan diawasi pelaksanaan dan perawatannya dengan baik.

Seni di Ruang Publik adalah satu kebutuhan spritual masyarakat (manusia Kota), dalam bentuk karya visual, baik dua dimensi ataupun tiga dimensi, bahkan dapat pula berintraksi dengan

berbagai media lain sebagai gejala baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. *Public Art* di kota-kota besar dapat berwujud monumen, patung/arca, lukisan dinding/mural, super-grafik, bentuk air mancur yang dikombinasikan dengan musik dan cahaya, dan lain-lain. Karya-karya ini hadir di dalam masyarakat kota, dinikmati dan menjadi bagian dari derap kehidupan sehari-hari mereka.

Beberapa ciri dari Karya Seni di Ruang Publik adalah:

1. Berperan sebagai Citra (Image) sebuah kota, menampilkan citra estetik, wawasan politik, kekuasaan penguasa, selera zaman, cita-cita, sejarah, aspirasi ke depan dan lain-lain.
2. Menjadikan kota bermartabat, punya wibawa, dirasakan baik bagi yang tinggal di kota maupun yang berkunjung ke kota tersebut.
3. Karya dapat pula berfungsi sebagai orientasi kota, kadang-kadang sebagai sebuah *Landmark*.
4. Mural/super-grafik dengan tema hidup optimistic, dengan warna-warna cerah, jernih dapat menyegarkan suasana kumuh sebuah sudut kota tua.
5. Karya Monumen adalah yang bernafaskan pengabdian pad satu peristiwa sejarah, melalui tokoh yang berjasa, pejuang atau pahlawan, dan bentuknya biasanya monumental.
6. Semua karya-karya tersebut menjurus pada ungkapan berkesenian, membudayakan dan memanusiakan Kota (urban).
7. Ukuran karya disesuaikan dengan besaran bentuk-bentuk bangunan lain yang ada di sekitarnya. Karya harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan Penataan Kota dan kehidupannya.

Karya seni di ruang publik, mempunyai kecenderungan tema-tema dan media:

1. Tema kenangan peristiwa besar/revolusi, kemanusiaan dan sebagainya (monumen).
2. Tema selamat datang, sosial, program nasional (patung/mural).
3. Tokoh pahlawan, pemimpin (patung).
4. Keasrian, penyegaran, revitalisasi suasana (mural/super-grafik).
5. Hiburan, rekreatif (air mancur dengan musik dan tataan cahaya).

Permasalahan karya seni di ruang publik di kota Jakarta antara lain adalah:

1. Harus ada *Master Plan* kota yang terpadu antara fisik kota dan *Public-Art*, sehingga sejak awal sudah diketahui titik lokasi bagi setiap karya yang baru yang akan diciptakan sesuai dengan perkembangan kota. Penempatan karya seni di ruang publik yang akan datang, tidak ditetapkan secara acak sesuai dengan kehendak yang membuat keputusan (Presiden, Gubernur, Wali Kota, Pengusaha-Sponsor dan lain-lain).
2. Membatasi posisi tawar-menawar para sponsor yang sering membiayai *Public-Art* tersebut, yang mengharapkan imbalan jasa berupa fasilitas tertentu untuk kepentingan para sponsor sendiri (pemasangan iklan dagang dsb). Biasanya iklan mengambil posisi yang paling menguntungkan sponsor, dan sering merugikan keasrian lingkungan kota.
3. Dalam pelaksanaan karya-karya yang sudah ada sekarang, tidak selalu telah melibatkan seni rupawan, arsitek dan desainer yang baik serta berpengalaman; berwawasan dan paham tentang *planning* kota. Sebaiknya jumlah patung-patung yang berorientasi sejarah dan kepahlawanan bangsa juga didampingi dengan karya-karya seni yang berwawasan modern yang bercitra internasional.

Berbagai contoh kasus karya seni di ruang publik yang pernah terjadi di DKI Jakarta, antara lain:

- Patung abstrak dari metal karya Rita Widagdo yang sudah lama berdiri di sisi jalan raya Gatot Subroto, terpaksa dibongkar dan digudangkan, karena pemekaran jalan.
- Lapangan terbuka sekitar tugu Monas yang merupakan identitas utama ruang bernapas kota Jakarta belum jelas tertata dan dimanfaatkan dengan baik. Patung Kerata Kencana Arjuna dekat Air Mancur jalan Thamrin, yang lebih cocok di tempatkan di Taman Mini, malah di pasang dekat Monas yang sangat Monumental.

- Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia yang sejak awalnya sangat monumental dan menangkap mata, kini semakin tenggelam oleh gedung-gedung tinggi di sekitarnya.
- Patung Irian Barat di Lapangan Banteng, dengan penataan ruang lingkungan yang kurang serasi semakin kehilangan keagungannya. Sedangkan Patung Pancoran di Tebet, kian hilang ditelan Jembatan Layang dan mulai tertutup oleh kabel-kabel dan tiang listrik.
- Patung Sudirman yang baru dipasang di Jalan Thamrin (2006), yang seharusnya monumental, dikitari oleh ruang terbuka yang luas, sekarang jelas terjepit di ruang sempit akibat tidak adanya lokasi yang lebih bermartabat. Sedangkan ruang yang terbaik telah ditempati lebih awal oleh patung lain yang kurang berwibawa (Pembawa Obor?) di ujung jalan Sudirman menuju Kebayoran.
- Akhir-akhir ini ada isu kebijakan DKI Jakarta untuk menciptakan patung para pemimpin untuk ditempatkan di jalan yang sesuai dengan nama jalan tersebut. Gagasan ini mengejutkan, nampaknya sederhana tapi tidak terbayangkan bagaimana rumit menerapkannya. Masalahnya di antaranya adalah bagaimana memberikan penghormatan yang seimbang antara kharisma tokoh, dengan kelas jalan, di mana patung itu bakal dipasang.
- Dalam sejarah pembuatan monumen-monumen dan karya-karya seni di ruang publik di DKI Jakarta, sering sekali terasa pengarahannya yang berlebihan dari penguasa. Keikutsertaan pemberi keputusan tanpa tim adli dapat melahirkan dan menempatkan karya-karya yang kurang berwawasan dan temporer saja.
- Telah terjadi penempatan gambar-gambar iklan dalam skala besar, yang secara visual bertarung dengan wajah kota yang seharusnya kelihatan sopan dan tertib, mengakibatkan terjadinya polusi visual yang hiruk pikuk dan semrawut di beberapa lingkungan pusat perbelanjaan.

Beberapa kasus di atas telah memahamkan kita akan belum adanya *Master Plan* kota yang baku, yang dapat dipakai sebagai acuan pelaksanaan. Barangkali TPAK (Tim Penasihat Arsitektur Kota) DKI Jakarta telah menyusun rancangan ini, tapi belum difungsikan sebagai kebijakan pembangunan kota.

Dalam proses penciptaan karya seni di ruang publik, jelas terdapat interaksi yang erat antara seorang seniman, seorang arsitek, seorang arsitek pertamanan, seorang perancang kota, seorang penunjang dana (sponsor) dan seorang pemberi keputusan dari pemerintahan kota. Oleh karena itulah, dalam seminar ini kami telah mengundang 3 orang pembicara yang terdiri dari seorang seniman pematung Sunaryo dari Bandung; seorang pematung yang sudah sangat berpengalaman dengan menciptakan karya seni di ruang publik, dan seorang arsitek perencana kota, yang juga seorang ketua Dewan Kesenian Jakarta, Marco Kusumawijaya. Disamping itu Dr. Siebe Thissen seorang ahli dari Rotterdam yang akan menceritakan profil perkembangan dalam bidang yang sama kota-kota di Eropa. Kehadiran beliau adalah atas undangan Akademi Jakarta dan kerja sama dengan Kedutaan Belanda dan Erasmus Huis.

Untuk bantuan ini atas nama Akademi Jakarta kami ucapkan terima kasih. Pembahasan Dr.Thissen akan melengkapi pandangan-pandangan yang kita terima, sebagai studi banding yang informatif. Mr. Thissen, *on behalf of the Academy Jakarta, I would like to thank you for participating in the seminar, may your speech enrich the information and datas as well and enlighen this seminar. Thank you Mr. Thissen.*

Atas kesediaan Bapak Fauzi Bowo untuk memberikan sambutan dan makalah kunci (*keynote-address*) dalam seminar ini, kami yakin akan memberikan dampak khusus dan meningkatkan wibawa bagi seminar kita hari ini**†.

** Makalah Dr. Ing. H. Fauzi Bowo dibacakan oleh Ibu Ir. Aururo Tambunan, M.Si, Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta.

Bapak Fauzi Bowo, sebagai gubernur terpilih DKI Jakarta yang akan mengawal pembangunan kota Jakarta yang kita cintai selama 5 tahun ke depan, akan mencoba membeberkan pendapat, sikap dan tindakan yang akan dilakukan untuk menciptakan momentum pembangunan kota yang dinamik ke depan. Bagaimana membuat kota ini lebih terpadu dalam artistik dan dalam *planning*-nya. Bagaimana membawa kota ini menjadi lebih berbudaya dan manusiawi, menjadi kebanggaan bagi semua fihak, baik yang bermukim di DKI maupun yang datang berkunjung ke kota ini. Bagaimana wajah DKI Jakarta menjelma sebagai Ibu Kota Republik Indonesia yang dibanggakan.

Kami juga gembira karena bapak Bambang Eryudawan yang juga anggota IAI, berkenan untuk menjadi moderator dalam seminar penting ini. Akhirnya kami juga mengucapkan terimakasih pada semua fihak yang telah ikut membantu persiapan seminar ini, terutama pada fihak PMB - LIPI yang telah bekerja sama dengan Akademi Jakarta, para panitia pelaksana dan lain-lain, sehingga semuanya menjadi tertib dan lancar.

Demikianlah, semoga semua fikiran yang brillian, diskusi yang cerdas pada hari ini, akan tercatat dan kemudian akan menjadi masukan penting yang sangat berharga untuk kebijakan pembangunan hari depan kota Jakarta.

KEYNOTE ADDRESS

FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BENTUK KARYA SENI DALAM RUANG PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI PERENCANAAN KOTA

Dr. Ing. H. Fauzi Bowo*

I. Pengantar

1. Puji syukur → dapat hadir dalam seminar “*Seni di Ruang Publik, Monumen dan Tata Kota*”
2. Mengucapkan terima kasih atas undangan → sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi saya diundang untuk bertatap muka, sekaligus diberi kepercayaan menyampaikan makalah “*Faktor-Faktor yang dipertimbangkan dalam Pengambilan Keputusan Bentuk Karya Seni dalam Ruang Publik, sebagai Bagian dari Perencanaan Kota*”.
3. Tema yang penting dan relevan. **Penting** → karena perencanaan kota Jakarta terkait langsung dengan pembentukan karakter dan citra Jakarta, baik sebagai ibukota Negara maupun kota internasional kebanggaan bangsa kita. **Relevan** karena perencanaan kota merupakan bagian integral dari pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

II. Perkembangan Jakarta

1. Sebuah kota kecil di muara Sungai Ciliwung bernama Sunda Kelapa pada abad XV, berpenduduk hanya sekitar 15.000 jiwa

* Naskah asli yang tidak sempat dibacakan oleh Bapak Wakil Gubernur,
Dr. Ing. H. Fauzi Bowo

2. Berkembang dengan pesat, karena sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, dikunjungi oleh kapal-kapal VOC Belanda, Portugis, Inggris.
3. Pelabuhan Sunda Kelapa berkembang → diduduki Potugis diusir oleh Fatahillah → diberi nama Jayakarta.
4. Setelah silih berganti diduduki penjajah, Belanda memberi nama Batavia
diduduki Jepang → setelah kemerdekaan RI diberi nama Jakarta Raya
5. Jakarta mulai berkembang setelah ditetapkan sebagai ibukota Negara RI (setelah 17 Agustus 1945) → penduduk Jakarta terus bertambah, pada akhir pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1977 penduduk Jakarta berjumlah kurang lebih dari 5,7 juta jiwa → tahun 2006 lebih dari 8,7 juta jiwa.
6. Jakarta telah berkembang sebagai kota multifungsi pusat pemerintahan, ekonomi, budaya dan lain-lain
7. Jakarta berkembang pesat, ibarat sebuah magnet besar jumlah penduduk terus bertambah terutama pasca lebaran
8. Akibat pembangunan daerah yang tidak merata dan pembangunan yang terpusat di Jakarta → merupakan factor pendorong para pendatang mengadu nasib ke Jakarta (prinsip ada gula ada semut) → Jakarta kelebihan beban/*over loaded*.

III. Perencanaan Kota

1. Tugas besar membangun Jakarta menjadi kota yang representatif dan kompetitif, sejajar dengan kota-kota besar lain di dunia → diamanatkan dalam visi-misi pembangunan kota Jakarta. Visi sesuai Renstrada 2002-2007: *“Terwujudnya Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien, dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, yang sejahtera dan*

berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan”.

2. Pemahaman terhadap visi tersebut, mengandung makna bahwa Jakarta harus memiliki daya saing global, menjalankan fungsinya secara efisien sehingga representatif dilihat dari kepentingan nasional dan internasional → Jakarta dihuni oleh warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya, berdisiplin tinggi, dan produktif → Jakarta memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik serta manusiawi, agar menjamin dinamika kehidupan dan pembangunan berkelanjutan.
3. Untuk itu misi pembangunan Jakarta yang berkaitan dengan penataan kota meliputi komponen penting → diantaranya, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau → serta mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan, dan berbasis partisipasi masyarakat.
4. Bersamaan dengan itu, penyediaan sarana dan prasarana kota, fasilitas serta utilitas kota guna memenuhi kebutuhan warga diarahkan untuk membentuk warna, wajah, dan citra kota yang mampu membangkitkan → semangat hidup warga kota Jakarta.
5. Kota sebagai suatu kawasan yang hidup, dinamis dan terus berkembang → membutuhkan konsep dan pikiran yang juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu, penataan kota → yang diangkat dalam seminar ini, perlu ditindaklanjuti.
6. Penataan dan pengembangan kota tidak berdiri sendiri melainkan terkait dan terpadu. Dalam keragaman dan kompleksitas permasalahan kota → dibutuhkan kesamaan persepsi dan kerjasama seluruh pihak.

7. Para perencana kota, pengembang, masyarakat, dan pemerintah daerah menyadari bahwa pengembangan kota berbasis manusia → merupakan keharusan. Kekeliruan atau kesalahan dalam penataan kota, selain dapat mengakibatkan dalam kerumitan kota juga dapat menimbulkan berbagai problem kompleks dalam kehidupan kota di masa depan.

IV. Ruang Publik dan Karya Seni

→ Ruang publik tempat masyarakat berinteraksi dan bersosialisasi → untuk akses, masyarakat tidak perlu membayar/gratis.

1. → Ruang publik → tanggung jawabnya ada di pemerintah namun sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan antara lain asosiasi/organisasi seniman, budayan, masyarakat.
2. → Ruang publik → meliputi taman, jalan dan sebagainya. Fasilitas pada ruang publik antara lain patung, pos jaga, lampu jalan, tempat telepon umum, jalan taman, pedestrian, dan berbagai fasilitas publik lain → semuanya dapat didesain agar memiliki nilai seni → menjadi ornamen mempercantik kota.
3. → Biasanya orang melihat atau menikmati karya seni di galeri → sekarang sangat mungkin menggelar atau memamerkan karya seni di ruang publik sebagai contoh pembangunan monument (*out door*).
4. → Disbudmus telah melakukan → Festival Seni Patung di Ruang Publik, Dimensi Jakarta 2006 kerjasama dengan Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan Institut Kesenian Jakarta.
5. → Dalam ruang publik ada hak dan tanggung jawab contoh Taman Menteng → hak masyarakat memperoleh

ruang publik → kewajiban masyarakat ikut merawat, menjaga, membuang sampah di tempatnya, tidak mengotori, tidak merusak.

6. → Karya seni di ruang publik harus menjadi ornamen yang melengkapi, memprindah eksistensi kota.
7. → Karya seni di taman → orang bisa menyentuh objek karya seni yang bisa disentuh dari bahan/material yang aman bagi manusia
8. → Karya seni disekitar jalan → tidak boleh memecah konsentrasi pengguna jalan terutama bagi pengendara kendaraan bermotor.
9. → Karya seni dan benda seni di ruang publik tugas pemerintah → membutuhkan dukungan, masukan, bantuan, partisipasi aktif seluruh masyarakat.

Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memperkaya seminar ini. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PUBLIC ART – A ROTTERDAM PERSPECTIVE

Dr. Siebe Thissen

I'm honoured to be part of this seminar. This is my first visit to the Republic of Indonesia, however, some fragmented knowledge of colonial and post-colonial Indonesia, passed on through personal stories by relatives and history lessons at school, has become rooted in my genetic consciousness. I realize these coloured narratives and images have probably only attributed to a kind of colour-blindness, which makes me an ignorant stranger in your country. I hope you will excuse me as an outsider for not being able to explore the Indonesian situation here, yet discussing the Dutch and Rotterdam context in particular. And I hope you will excuse me for not speaking your language.

Being announced as “a speaker from abroad who is able to talk about the [public art] situation in his country, having a more mature tradition of city planning”, urges me to make some comments first. Yes, Rotterdam does have mature traditions of public planning and art – in fact we are the only Dutch city with a genuine public art department. However, drastic demographic changes and the process of globalisation, have also forced countries with mature traditions to re-invent themselves. For instance, the growing influence of Muslim and Afro-Caribbean cultures within Dutch society, and consequently, the challenges they offer for art in general and public art in particular, draw heavily on city traditions, policies and programs. Since a decade therefore, the public art department in Rotterdam recognises two specific perspectives or even domains: art in public space and new genre public art. These domains are fuelled by issues raised by people like Tom Finkelpearl, former director of the New York percent for art program: “The history of public art is most often told with an emphasis on the word ‘art’, and very little consideration of the public context”. I will get back to this distinction later. In short, how mature our traditions may seem, today we are desperately in need of new

ideas, alternative practices and fruitful cultural exchanges, in order to re-invent public art in a many-cultured city. So this foreign speaker wishes to learn from your approaches and re-inventions as well. I hope I'm able to invite you to visit our city one day and continue our mutual talk about public art and possible futures. My lecture today is not so much concerned with contemporary theories on public art, but I will try to stick as close as I can to the Rotterdam public art practice and challenges.

As we all know, as a historical phenomenon, art in public space has always been part of the realms of popes and kings. The church and the state erected statues of superhuman royal and military leaders, political and religious inspirers, always placed on grand pedestals, from which they looked down on us – small and humble humans. These monuments were part of the society of control and provided guidelines how to become a good, i.e. submissive civilian. Even in their later secularist disguise, they still performed many of these functions. In 19th century Holland, liberal lobby groups defined Dutch identity from a nationalist perspective. Inventing this tradition, they used the Golden Age, the 17th century, as the coming of age of the Netherlands and Dutch identity. Golden Age writers like Joost van den Vondel, artists like Rembrandt and philosophers like Spinoza, were heralded as the champions of Dutch identity and culture. The liberals envisioned the streets, public space, as an illustrated history of Dutch history and grandeur. Their monuments and pedestals resembled the old bronze and stone kings, generals and popes. It is hard to imagine that a foreign visitor, lacking historical knowledge of the Netherlands, could see any difference between the two domains.

Till far in the 20th century, art in public space was closely connected to the state, the city and political lobby groups. American writer Michael Kelly once remarked that countries with strong or authoritarian governments which are not directly responsible to the public, set great value to art in public space. This was especially true for socialist, communist and fascist governments and it is not surprising that revolts and revolutions always include assaults on

public monuments – think of the angry mob that dragged down Saddam Hoessein’s statue in Baghdad on the 9th of April 2003. On a smaller, more local scale comparable cases are manifest. A Catholic village in the south of the Netherlands had to remove a statue of an early 20th century priest several times, for locals kept assaulting the bronze bust at night time. They kept the man responsible for mental harm done to their families. Sometimes the same mistrust is expressed against works of autonomous art. In Rotterdam recently, a bronze sculpture by American artist Paul McCarthy – a huge Santa Claus, carrying a dildo – could not be placed in the public space and had to be locked up in a museum, since public opinion had turned against it. I don’t think the audience actually criticised the provocative design, however, as taxpayers they seemed to blame the city council for not being informed about the content and the chosen location in the first place. Public art is a matter of democracy. With the last example I’ve reached some problems at home. So let me elaborate on the Rotterdam situation first. How did the city develop its public art tradition? Who are responsible for it? How is public art financed? How is public art related to city planning? What are the differences between public art and new genre public art and how is this perspective organised on an institutional level?

Contemporary public art in Rotterdam is associated closely with the Second World War. On the 14th of May 1940, the city centre of Rotterdam was totally destroyed by a German air fleet bombardment, causing the Dutch to surrender themselves to the occupier a couple of days later. The city was in ruins and had to be build up again completely – that’s why Rotterdam is the most modern city of the Netherlands today; why architects like Rem Koolhaas chose the city as their hometown; why modern and post-modern architecture has become a tourist attraction; and why its city planners have gained a worldwide reputation. After the war (1945), a series of memorials and monuments had to commemorate the loss of lives in Rotterdam: civilians, soldiers, deported and murdered Jews. The brutal rape and destruction of the inner city was also commemorated,

often through remarkable sculptures made by internationally known artists, paid by local entrepreneurs and businessmen and consequently granted to the city as a gift. Sculptures like Zadkine's "Destroyed City" (1953) or Naum Gabo's "Stylised Flower" (1957) are examples. These huge sculptures fitted well in the still empty public spaces, waiting for city planners and their ideas to move in. However, due to these gifts, public art was more or less a private affair. The only public activities consisted of taking care of permits, finding a suitable location and inviting the mayor to deliver a speech at the unveiling of the sculpture. The publics were hardly involved in anything.

In 1960 the city council expressed the will to be in charge and to take full responsibility for public art. A series of regulations were formulated in order to develop a more coherent policy – let us summarise these regulations as the "Percent for Art Program". Three wishes were formulated:

- The wish to compose an ambitious sculpture collection;
- the wish to decorate local governmental buildings with art works;
- the wish to infuse public space with art.

The approach however was still elitist. A small committee of insiders decided which kind of art was important for our city and which sculptures should be bought in order to build up a fine urban public art collection. Over the years, this program resulted in two collections. There is a more or less local Rotterdam art collection, with sculptures produced by local and national artists. This collection encloses approximately 250 art works. Consequently there is an international collection, called Sculpture International Rotterdam (SIR). The advisory board of the latter is installed by the city council and their budgets (200.000 euro each year) are funded by the City Decoration Fund. In fact this is the only public art fund, making it possible to decide autonomously which sculptures are needed for Rotterdam and where they should be placed. They are not necessarily location responsive. SIR consists today of approximately forty sculptures and art works.

Most public art however, including the local public art collection, is financed by building and construction programs, making it possible to use the 1960 percent for art site-specific regulations. This program makes sure public art is always part of city planning and public space design. If there is a budget, ad hoc committees are usually formed, consisting of public art officials, public space designers, sometimes architects, and – very important - local residents. Together they give shape to a process, called “site-responsiveness”: what are the qualities of the public space in question; what’s needed in that specific space; what kind of art is desirable and which artist should team up with the group; and what kind of steps and procedures are to be taken. This contemporary form of democracy developed over the years.

In the early seventies artists, politicians and residents started to criticise the elitist approach to public art. New programs, like “town painting” or “art in neighbourhoods” made it possible to finance murals and community art, and to take public art to the streets and the residents - to poorer suburbs and boroughs, far away from the city centre and far away from art insiders who tend to monopolise the art discourse. This movement also injected more traditional ways of decision making: different publics or users of public space (residents, children, workers, women, minorities, shopkeepers, to mention only some of them) became part of the public art works themselves. They publicised art - they made art public.

But democracy and community art are not always good companions of city planning and local/global prestige. The classic sculpture or monument adds far better to a city’s pride and self-image. As icons, landmarks, congealed memories, tourist attractions or even logo’s, they produce an urban identity. In the last decade this tension resulted in two different public art genre’s. And two different public art directors, however both associated with one Centre for the Arts in Rotterdam. Roughly said, my colleague runs the Collection & Inheritance department – of which Sculpture International Rotterdam and most percent for art projects make up the bulk of the work; and I

am responsible for the Commissions & Projects department – focussing on new genre public art and commissions for local artists.

As a specific public art domain, Collection & Inheritance aims at creating and taking care of an ambitious collection of national and international art works. Starting point is the international high art discourse, and funds and motives are driven by urban imagery and memory, by notions of history, by city pride and tourism. Processes of decision making are not democratic, yet reserved for experts. An independent committee of insiders is supposed to advise the mayor and the council. Every two years or so, a new sculpture or other art work is added to the public collection.

Rotterdam is also known for its policies of maintenance. All sculptures are in a good shape, thanks to a small art & monuments unit, operating from within the public works department.

Commissions & Projects is a more diffuse domain. Community art projects, pop culture, murals, urban design, street furniture and public lightning, to mention only a few public art manifestations, do not attribute to a public art collection. By creating series of commissions for artists on different levels and in different scales – sometimes one hundred projects each year, the policy aims to push the arts into the urban environment and turn art and artists into visible aspects of urban life. Since the nineties, many artists have left their studio's in order to transform the urban fabric of everyday life or to comment on issues like globalisation, commercialism or our rapidly changing many-cultured society. It is almost impossible to fund these projects in traditional ways. The City Decoration Fund or percent for art programs are not suited to finance these public art works. National funds, housing corporations, neighbourhood committees, schools and borough councils provide a large part of the necessary budgets. Here the public art director acts as a director, not as a curator.

However, both public art domains try to cooperate and to decide what has to be done in Rotterdam and how the arts and public

space are suited best. This does not mean there are no tensions. There is a continuing debate about city planning and development, about public space design and about the audiences public art is made for. Why do we need those ambitious art works in public space – don't we have enough of them already? Is art able to survive in a context of globalisation, billboards, advertising and spectacular commodities? Does community art lead to bad quality art? Why should public space and public art be laboratories for human empowerment? Do Muslims or Antilleans or Hindus deserve other, non-Western works of art or do we just have to educate them in order to introduce them to our own traditions of art? Is democracy compatible with the production of art? The whole debate about public art has become totally intertwined with the public art infrastructure of today's Rotterdam. All tensions and opinions are visible within a wide range of commissioned public art projects. And we try to extend this debate to the field of city planners and public space designers. I don't think we are totally effective in this - considering the relative small influence of the arts on large scale city planning, however, someone has got to do the job.

In 2001 the Centre for the Arts organised a conference on public art called Urban Reflections. We invited almost eighty artists, architects and city planners and questioned them about the ways they viewed public space and public art. Key note speaker and artist Olu Oguibe elaborated on this theme and hesitated to define public art. Instead he came up with four negative aspects:

- Public art is not an instrument of civilisation politics, suited to serve the people or the proletariat of the citizens, that is, to serve a general and abstract audience – public art recognises different publics;
- Public art does not enclose governmental regulations or sanctions – public art breaths public opinion and depends largely on civil initiatives;
- Public art is incompatible with private, exclusive notions of an artist – there's a difference between public art and private art;

- Public art does not view public space as a place for personal and private meditation and does not view public space as an outdoor museum.

This is an interesting definition – and a break with former opinions. One of the biggest Dutch public art bureaus once stated: “Many artists do not have the slightest interest in public space, however, they are capable of creating the finest art works for the public space”. In other words, let the artists do their jobs en let us, public art professionals, find a piece of space for those works. I think this is a cynical option: shouldn’t we demand a more genuine interest in public space and in the publics that are to be confronted with public art? Or to put it differently: isn’t there a difference indeed between a public artist and a private artist?

The following debates and interviews of the Urban Reflections conference were very interesting. In the end we recognised five different perspectives on public art. It may seem like wordplay, but this is how we summarised these opinions:

- Art in Public Space: you’ve got a work of art and you need a place to put it somewhere (sculptures, monuments, urban design, murals...);
- Art of Public Space: a public space can be a creative fabric, you only need to program art to reveal the potentials of the space (festivals, interventions, temporary art works or projects...);
- Public Space as Art: in a context of globalisation parts of the cities are planned and developed as collective art works (squares, shopping districts, air ports, entertainment areas, gentrified apartment areas...);
- Art as Public Space: many artists consider their works to be public spaces themselves, opening up possibilities for interaction (media art, community art, hip hop oriented art, art education...);
- Public Space as a Multi-sensory Domain: many artists make an appeal to non-visual means of communication (sound, smell, skin, feel, body...).

Being public art officials - always negotiating between commissions, funds, motives, the city and art – these playful definitions help us to understand why professionals – artists and city planners - are interested in public art, how they view public art, and how these different opinions, these demands, should be encountered by the art community. We should be careful not to turn them into institutionalised regulations, but they can help us seeing more clearly and help us to create a suitable program or format of decision making. In short, dealing with contemporary public art in a global and commercialised society, you have to combine the qualities of an artist, a curator, a director and a producer – the role depends on demands and publics.

I hope we can discuss some of the issues raised here and start to unravel the complex relations between urban planning and public art. By its local nature, since the sixties public art in Rotterdam has always been connected with city planning. Regulations like the percent for art program or the City Decoration Fund have guaranteed that specific connection. Budgets had to be pulled out of building programs. Vice versa, knowledge of building programs and planning have influenced the nature of public art in Rotterdam thoroughly. This is also why local public art policies have never been decentralised and handed over to community councils, like in Amsterdam. This connection laid out the foundations of a beautiful public art collection, still vital and still transforming today.

On the other hand, for new developments within public art for many-cultured societies – summarised in the notion of new genre public art (see Suzanne Lacy's "Mapping The Terrain", 1995) – we need to be very creative in finding an alternative funding and an alternative discourse. If we wish to pay more attention to the idea of 'public' within the notion of 'public art', we may not need the companionship of city planners and architects. Perhaps we should look elsewhere and find new friends and allies. In Jakarta for instance.

SENI DALAM PERKEMBANGAN KOTA: HIDUP BERSAMA, MAKIN BERPISAH?

Dr. Marco Kusumawijaya

Indonesia memasuki masa baru kesadaran akan kota, mungkin untuk pertama kalinya sebagai bangsa merdeka. Wilayah Hindia Belanda sendiri mengalami suatu “dasawarsa kota” ketika *Desentralisatie Wet 1905* melembagakan desentralisasi dan otonomi untuk pertama kalinya. Selama satu hingga dua dasawarsa berikutnya kota-kota otonom dibentuk susul menyusul.

Sebagian orang menganggap bahwa membangun kota itu sendiri adalah suatu kesenian. Dan yang dimaksud di sini bukan hanya membangun tiap-tiap bangunan di dalam sebuah kota, melainkan terutama pola-pola di dalam kota itu sendiri sebagai suatu “bangunan” besar. Karena itu sejarah membangun kota adalah juga sejarah seni itu sendiri. Dan seni membangun kota itu kolektif. Kota adalah karya kolektif. Ia juga mencerminkan kekuatan-kekuatan, ironi, tragedi, keyakinan, keragu-raguan, daya-daya dan gagasan-gagasan arus utama dan perjuangan arus-arus kecil dari suatu masyarakat. Kota adalah resultante dari pergulatan harian, tahunan, dasawarsaan abadan dari masyarakat. Sebab itu sejarah kota adalah sejarah peradaban dan sejarah kebudayaan.

Beberapa peradaban hendak dihapus oleh penyerangnya dengan menghancurkan kotanya, misalnya Bagdad oleh orang-orang Monggol di abad ke13, tetapi kota-kota itu bangkit kembali dengan sendirinya, dan menguasai para pemenangnya, bukan sebaliknya. Manusia membangun kota, lalu kota membentuk manusia. Beberapa kota bahkan menguasai manusia. Demikianlah ilham terjadi pada karya-karya seni yang mengulas kota atau menjadikannya panggung cerita, seperti Dublin bagi James Joyce pada karyanya *Ulysses* (1914). Kota adalah juga tempat kembali, atau tempat pergi menghilang, mencari kesempatan menjumpai nasib yang terbuka, seperti misalnya

Singapura di akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20, bagi tokoh-tokoh cerita Soeman Hasibuan dalam karya-karyanya *Kasih Tak Terlarai* (1929), dan *Percobaan Setia* (1931). Orang-orang kota adalah subyek yang menarik karena jiwa dan raganya remuk redam diterpa perubahan-perubahan di dalam kota, terkadang guncang limbung, terkadang heroik, terkadang menggelikan, seperti dalam karya Pramoedya Ananta Toer, *Cerita dari Jakarta* (1955), atau karya James Joyce yang lain, *Dubliners* (1914).

Kota menjadi demikian, karena kota adalah pusaran perubahan, tempat manusia mengalami momen-momen besar, perubahan-perubahan mendasar dalam sejarah peradabannya. Senyampang dengan itu, teranglah kota membentangkan ruang-ruang fisik dan ruang-ruang budaya baru, permukaan-permukaan baru, skala-skala baru, kecepatan baru, pemirsa yang berubah-ubah, khalayak dalam jumlah dan kualitas yang berubah-ubah, benda-benda, idiom-idiom, media baru yang semuanya, karena sifat kota yang padat dan beragam raya, tiap hari makin beranak pinak kemungkinan-kemungkinan baru.

Beberapa sastrawan besar merasa perubahan-perubahan itu menuntut perubahan mendasar pula di dalam *peralatan* bidang seni mereka. Maka James Joyce menyusun cerita dengan cara baru, menyusun kalimat dengan cara tak lazim sebagai aliran kesadaran (*streams of consciousness*). Chairil Anwar menulis surat kepada HB Jasin, “*Pengetahuan dan teknik di masa kini sudah maju...Kita sudah dapat membuat bukan saja foto-foto biasa, tetapi foto-foto sinar X, hingga ke sumsum tulang...Kita musti terang...Kita hidup kini pada kecepatan seribu kilometer per jam. Terang dan singkat tidak selalu berarti kosong, sama sekali tidak. Dalam satu kalimat pendek seperti ‘Sekali berarti, sudah itu mati’ kita dapat merangkum semua tujuan hidup. Jadi ringkas itu bukan kosong.*”

Chairil memwacanakan modernisasi. Dan ia mengungkapkan apa yang ditangkapnya sebagai modernitas, sambil mengembangkan modernisme-nya sendiri, yang menekankan pada perlunya perubahan

pada kriya bidang seninya untuk mengolah perubahan-perubahan dasyat modernisasi. Ia tidak *bertendensi* menawarkan arahan bagi tujuan perubahan itu sendiri, sebagaimana pada Sutan Takdir Alisjahbana.

Modernisasi telah menjadi latar bagi sebagian orang untuk menganggap bahwa saripati kota adalah ketiadaan pola hubungan yang tetap. Dengan kata lain, kota adalah suatu kemungkinan terbuka, tempat segala sesuatu dirundingkan. Kota adalah pasar. Secara nyata, beberapa kota memang berawal sebagai pasar. Kota berpangkal pasar, pasar berbuah kota, bahkan –atau justru—sebelum para begal dan pangeran menyanderanya sebagai ibukota mereka. Hanya ada sedikit pengecualian di dunia: beberapa kota memang dibangun langsung sebagai ibukota, menurut citra sang penguasa. Inilah misalnya Yogyakarta, Madrid, atau Beijing.

Modernitas lain yang ditangkap banyak pengarang kita adalah “kontras”, polarisasi antara kaya-miskin, pusat yang berkuasa dan pinggiran yang tersingkirkan, atas dan bawah, kiri dan kanan. Misalnya pada karya Mochtar Lubis, *Jakarta Kota Penuh Kontras*.

Sebentuk polarisme ini nampak-nampaknya muncul kembali akhir-akhir ini, setidaknya di dalam perdebatan sastra pada beberapa media massa. Kita rasakan beban sejarah tahun 60an, terutama ketika beberapa protagonis yang sama kembali mengambil pojok yang sama di dalam arena politik. Inilah kesedihan yang tidak belajar dari sejarah kita yang kaya. Sejarah telah menjadi beban yang dapat dipahami dan dimaafkan. Tetapi bukankah kesenian justru menyinarkan pencerahan ketika ia mampu mengatasi polaritas, mengatasi komando politik dan ideologi, lebih percaya diri bersikap tidak terprovokasi oleh politik polarisasi? Sebab dunia sudah jauh lebih kompleks daripada sekedar polarisasi kiri-kanan, pusat-pinggir, yang dominan dan yang didominasi, laki-perempuan, kami dan mereka, kalah-menang, bangga-iri. Ada banyak kehidupan di antara kutub-kutub itu, ada banyak juga di luarnya (*beyond*), termasuk yang belum terbayangkan. Komunitas, bentuk, *genre*, sebaiknya mampu tumbuh bebas dari

polarisasi simplistik. Sebaliknya, untuk tidak terjebak ke dalam relativisme, masing-masing harus mampu mengembangkan pemikiran yang dalam, kelembagaan yang langgeng, penciptaan yang berkelanjutan, jiwa raga yang otentik. Bahkan secara bersama-sama dituntut kemampuan menciptakan kerangka untuk berbeda (*framework to differ*) dan perbedaan (*framework for differences*). Menggantungkan diri pada kuasa politik justru merendahkan martabat dan kuasa otentik dari kesenian itu sendiri. Kesenian justru diharapkan memberikan ilham kepada politik dan kehidupan publik, bukan sebaliknya, terutama tentang tujuan-tujuan kehidupan bersama.

Dalam modernisasi yang makin kental, kita makin perlu terbiasa dengan ketidakpastian, ketiadaan pola hubungan yang tetap. Kekalahan dan kemenangan silih berganti. Kepribadian-kepribadian yang cair dan terus menerus lahir dari rahim kota. *Kota lahirkan engkau yang kedua*, tulis Saini KM.

Sedang Walter Benjamin menulis¹:

Just as all things, in a perpetual process of mingling and contamination, are losing their intrinsic character while ambiguity displaces authenticity, so is the city.

Dalam urbanisasi yang makin kental, kita juga harus menerima keadaan makin padat raya, makin serba ada, meski tak selalu terjangkau oleh semua. Dalam keragaman yang meningkat, bukan kepastian yang kita peroleh tentang ketiadaan kebenaran absolut, melainkan keraguan terus menerus tentang relativitas. Kita memang tidak perlu terguncang secara fatalistik, karena bukan kepastian tentang ketiadaan kebenaran absolut yang diperoleh, melainkan keraguan terus menerus tentang segala hal, termasuk tentang ketiadaan kebenaran absolut itu sendiri. Keraguan bukanlah pemupus, melainkan penjerang, harapan. Keraguan adalah pintu terbuka kepada lapisan kebenaran berikut, bukan penihil kebenaran. Dengan sikap optimis ini orang tidak perlu bersikap fundamentalis

¹ *Reflections*, Schocken Books, 1986.

yang berhenti mencari kebenaran, dan takut kepada tawaran baru, pertanyaan baru.

Sejarah peradaban lebih panjang daripada sejarah kebenaran yang manapun yang sejauh ini kita kenal. Kota—marilah takut atau terpesona—akan mempercepat terbukanya pintu-pintu baru, akan menerapkan perbenturan dan pemercikan kemungkinan-kemungkinan baru yang tak terbatas. Sebab kotalah lokus modernisasi, adalah tujuan kita. Akan makin banyak orang hidup dan mati di dalam kota. Akan makin banyak “ada” di kota.

Laporan kependudukan PBB baru-baru ini mengatakan bahwa di tahun 2008 untuk pertama kalinya lebih dari separoh umat manusia akan tinggal di wilayah perkotaan. Karena itu dikatakan bahwa di tahun 2008 kita memasuki abad perkotaan. Pada tingkat nasionalnya, Indonesia mungkin masih akan memerlukan satu atau dua dasawarsa untuk mencapai ambang 50 % tersebut. Ini tidak selalu berarti penduduk di desa akan pindah ke kota-kota. Sebab urbanisasi dapat mendatangi desa-desa, mengubah desa menjadi kota, di tempat asal seseorang berakar, tanpa ia harus berpindah ke kota yang telah ada. Ada kemungkinan sangat besar bagi urbanisasi yang berupa datangnya kekotaan ke dalam desa-desa, ke jantung identitas mitologis manusia, tersebut oleh perkembangan mutakhir dalam teknologi informasi dan politik desentralisasi yang sedang mekar. Sebab itu, tidak lama lagi, semua seni dengan sendirinya akan “urban”, karena para senimannya semua menafasi urbanitas, meskipun dalam bentuk kerinduan kepada alam pedesaan sekalipun, sebab ia tetap akan merindukannya, memandangnya dari kota. Ada novel dan cerpen kita tentang desa yang terbaca sebagai kerinduan dari orang kota, atau cerminan dari konfliknya dengan kota.

Kota memang tempat orang hidup bersama, tetapi di sini pula ancaman terbesar untuk tumbuh berpisah. Ancaman itu lahir dari hakekat kota itu sendiri, ialah keragaman dalam kepadatan, yang bagi sebagian orang mengilhami, tetapi bagi lainnya menyesakkan. Oleh sebab itu pula kota menjadi *locus par excellence* untuk manusia

memanusia, dalam dua kapasitas sekaligus: *homo homini socius* dan *homo homini lupus*

Kekotaan senantiasa memunculkan ruang baru, genre baru, teknik baru, kriya baru, gagasan baru, dan baru-baru yang lainnya. Kecepatannya meningkat. Reproduksi menghasilkan reproduksi yang makin cepat dalam padat dan ragam raya kota.

Ruang kota, selalu terletak dalam ketegangan antara kehidupannya sebagai ruang bersama dan keperluan praktisnya sebagai ruang pribadi. Sebagai ruang bersama ia menyemai *homo homini socius*. Sebagai ruang pribadi ia dapat menyemai *homo homini lupus*. Ruang kota senantiasa menjadi ruang kontestasi antara keperluan-keperluan pribadi dan ideal-ideal kolektif.

Ruang kota waktu kita kini memberikan makin banyak ruang potensial untuk kontestasi tersebut. Lihatlah permukaan-permukaan ruang khalayak kita yang makin besar. Sebagian permukaan-permukaan khalayak ini milik pribadi, misalnya permukaan bangunan besar. Sebagian lainnya terbentuk oleh prasarana perkotaan, misalnya permukaan tiang jalan layang. Ruang di antaranya, di bawah jalan-jalan layang itu adalah juga ruang “baru”. Tentang permukaan tiang jalan layang ini, kita mencatat bagaimana pada tahun 2001 (JakArt) kesenian dan seniman menemukannya. Mural diperkenalkan. Lihatlah apa yang terjadi sekarang: sebagian telah menjadi permukaan iklan. Dari milik khalayak ia telah dieksploitasi oleh modal. (Meskipun kita dapat berdebat, bahwa iklan adalah keperluan kolektif, karena ia memberikan informasi tentang produk kepada pasar).

Kini kita melihat kontestasi itu terjadi di banyak permukaan lain, termasuk permukaan langit, ketika *billboards* menutupi tatapan kita kepada biru langit. Pesan-pesan bersaing memperebutkan ruang khalayak.

Permukaan ruang khayalak hanya contoh dari kenyataan bahwa ruang kota selalu mengalami kontestasi tersebut. Kesenian berperan menemukan, mengolahnya, dan memberikan renungan-

renungan kritis. Kesenian berperan menyisipkan jarak antara terpaan-terpaan yang menimpa warga.

Sudah di awal abad yang lalu Walter Benjamin menulis²:

...Kritisisme adalah semata-mata soal mengambil jarak yang tepat. Ia nyaman dalam dunia dimana perspektif dan prospek penting dan dimana masih mungkin mengambil titik berdiri. Kini benda-benda mendesak terlalu dekat pada masyarakat manusia. Mata yang "tak berdosa", "tak berkabut" telah menjadi dusta, mungkin seluruh cara ekspresi yang naif benar-benar tidak berkemampuan. Kini yang paling nyata, tatapan penuh perhitungan yang menghunjam kedalam jantung benda-benda, adalah iklan. Ia menghapus ruang tempat kontemplasi bergerak dan semacamnya tetapi menerpa kita dengan benda-benda seperti sebuah mobil, yang makin meraksasa, melesat keluar dari dalam layar film ke arah kita. Dan sebagaimana film juga tidak menghadirkan perabotan dan tampak depan bangunan dalam keutuhan bentuk untuk dapat ditilik secara kritis, dengan kedekatannya yang mengguncang dan memaksa saja sudah sensasional, iklan yang sejati melempar benda-benda kepada kita dengan tempo suatu film yang bagus...Apa, akhirnya, yang membuat iklan begitu unggul di atas kritisisme? Bukan apa yang dikatakan oleh lampu-lampu neon yang bergerak-gerak—melainkan getangan air ganas yang memantulkannya di aspal."

Dalam sejarah para ahli mengamati bagaimana kekotaan telah menjadi rahim dan momen lahirnya terobosan-terobosan dalam peradaban manusia. Saini KM menulis "Kota/rahim yang lahirkan engkau yang kedua." Ibnu Khaldun di abad ke 14 menulis (dalam Mukadimah) bahwa "Manusia membangun kota sebagai dan ketika mencapai puncak peradabannya". Para ahli perbandingan agama menunjukkan bahwa terobosan spiritual yang terjadi di dalam periode yang disebut "Jaman Aksial" (Axial Age, abad ke-8 hingga 2 SM),

² Ibid.

setidaknya berkaitan dengan masa pemusatan signifikan jumlah manusia di permukiman-permukiman baru yang dapat disebut kota. Terobosan ini adalah lahirnya pemikiran-pemikiran spiritual pembaharu di jamannya, misalnya para filsuf Socrates dan kawan-kawan di Yunani (yang membunuh para dewa dengan rasionalitas), filsuf-filsuf Hindu yang menulis Upanishad yang mereformasi kitab Veda di India, Sidharta Gautama dengan Buddhisme, Confusius di China, dan monotheisme di Timur Tengah, dan Zoroasterisme di Persia (Iran sekarang).³

Tetapi, kebaruan dan terobosan terkadang menakutkan. Setidaknya menggelisahkan. Sebab itu berkumpulnya orang-orang dalam komunitas yang kurang lebih sepaham adalah hal positif, selama orang menyadari tujuan baiknya. Ia tempat menyemai gagasan-gagasan baru, agar secepatnya ia kuat untuk keluar menemui komunitas-komunitas lain. Komunitas-komunitas seni atau seniman tidak seharusnya menjadi tertutup atau saling membenci. Komunitas-komunitas itu seharusnya merasa saling membutuhkan untuk saling menguji diri, sebab dalam modernisasi dan urbanisasi yang kencang orang memerlukan persaingan yang konstruktif.

Modernisasi adalah hal yang berbeda meskipun erat hubungannya dengan perkembangan kota sejak abad ke-18. Modernisasi adalah salah satu perubahan mendasar yang sekaligus terjadi antara lain karena tingkatan urbanisasi tertentu dan memperkencang urbanisasi.

Marshal Berman menulis⁴:

"To be modern is to find ourselves in an environment that promises us adventure, power, joy, growth, transformation of ourselves and the world—and at the same time, that destroy everything we have, everything we know, everything we are."

³ Lihat misalnya Karen Armstrong, *Buddha*, 2001.

⁴ *All That is Solid Melts into The Air*, Verso, 1982

Bangsa Indonesia tentu saja mengalami modernisasi juga sebagai “kolonialisasi”, yang bagaimanapun juga ada membawa unsur-unsur modernisasi yang berasal dari tanah asalnya: globalisasi perdagangan dan pasar pada umumnya, eksploitasi alam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, birokrasi rasional, sistem pendidikan nasional, dan bahkan perumahan dan kota baru di awal abad ke-20. Migrasi desa-kota dan kota kecil-kota besar sudah lama terjadi. Kuartet Pulau Buru oleh Pramoedya Ananta Toer adalah kisah perjuangan tokohnya dari desa ke kota kecil, dan ke kota lebih besar lagi yang akhirnya menjadi jendela dunia, dalam konteks globalisasi yang melahirkan sekaligus membunuh kolonialisme sebagai konsekuensinya. Sampai sekarang, bagi banyak orang Indonesia modernitas masih dialami sebagai migrasi (fisik dan sosia-budaya) terus-menerus dari desa ke kota dan ke kota lebih besar lagi.

Migrasi desa-kota besar-besaran terjadi dalam berbagai gelombang di Indonesia. Antara lain: gelombang di pertengahan abad ke-19, ketika kota-kota seperti Bandung, Medan, Malang, Surabaya tumbuh dari ekonomi industri perkebunan. Sebelum perang dunia ke-2, Surabaya adalah kota lebih besar, dalam hal penduduk, daripada Jakarta. *Soerabaja Johnie*, tulis Bertold Brecht. Kingkong diangkut dengan kapal bernama “Soerabaja” ke New York City, yang umurnya lebih muda daripada Batavia. Sabang sebelum Perang Dunia II lebih besar daripada Singapura. Medan selalu kota paling besar di Sumatera hanya sejak abad ke 19.

Dua konsep lain yang sesanding dengan modernisasi, dan perlu digunakan secara berbeda dan disiplin adalah “modernitas” dan “modern”. Modernitas adalah apa yang dialami atau dirasakan sebagai akibat dari proses modernisasi yang obyektif. Modernisme adalah paham, pemikiran sang subyek tentang modernisasi dan modernitas. Penjajahan dapat dikatakan adalah pengalaman orang nusantara akan modernisasi, adalah modernitas. Tidak heran para bangsawan tertentu menerima penjajahan sebagai hal yang wajar. Mereka mengembangkan modernisme yang membenarkan penjajahan, setidaknya kerjasama dengan Belanda. Modernisme lain

melahirkan kemerdekaan, sebagai konsekuensi logis dari emansipasi. Modernisme lain lagi (Suharto, Orde Baru) mereduksi modernisasi pada ekonomi dan mengancam modernisasi pada bidang lainnya.

Di masa modern secara populer diketahui seni berkembang dalam momen-momen emasnya dalam rahim kota. Sebut saja Paris di abad ke 19, Berlin di awal abad ke 20, dan New York sesudah Perang Dunia II. Kota menjadi inspirasi sekaligus ruang rahim seni. Sekarang ini sudah dibuktikan juga bahwa kota juga hidup dari seni, setidaknya dari kreativitas dan inovasi yang diandaikan lahir dari seni. Ini tampil misalnya pada konsep industri kreatif.

Kota-kota kini bersaing dalam hal menarik bakat-bakat, bukan lagi dalam hal menarik modal investasi atau bahan baku.

Selain itu, kota-kota juga digubah oleh gagasan, oleh model, kadang-kadang utopis, untuk menjadi instrumen pencapaian hal-hal, selain untuk kemaslehatan dirinya, juga yang lain di luar dirinya. Tujuan-tujuan lain ini kadang lebih besar dari dirinya, kadang-kadang tidak berhubungan sama sekali dengannya. Kota tidak selalu dibangun untuk mencari solusi atas masalahnya yang spesifik, melainkan juga sering dibangun atas dasar suatu konsep yang berlagak universal dan ilmiah. Kota, menurut Françoise Choay, adalah ide atau didasarkan pada sejumlah ide dan model, sejumlah imajinasi. Karena itu ia sendiri suatu teks tentang perkembangan manusia. Sebab itu kota adalah suatu karya-cipta (seni) yang didasarkan pada ide dan keinginan ekspresif manusia, bukan semata rancangan yang fungsional. Pada saat sama ia adalah ruang, suatu wahana, tempat hampir semua karya cipta lain dibuat.

Memang kota atau “kekotaan” mengandung daya dan wataknya sendiri yang seringkali nampak tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Tetapi dalam sejarah terang bahwa ada kekuatan-kekuatan yang dapat mengubah kota menjadi lebih baik ataupun menjadi makin buruk, setidaknya terhadap seni dan peradaban manusia. Patron-patron seperti Pericles dan Ali Sadikin memperkuat kota. Hitler berniat memperkuat bentuk fisik Berlin menurut citranya

sendiri, tetapi berakibat pada pemiskinan karena ditinggalkannya kota itu oleh bakat-bakat dalam semua bidang (arsitektur, drama, penulis, film). Jakarta beberapa waktu lalu juga gencar ditinggalkan oleh beberapa senimannya yang hijrah ke Yogya.

Bagaimanapun juga, kota-kota dunia ketiga mengalami ketidak bahagian tertentu, tidak selalu ideal dalam berbagai bentuk. Beberapa ciri negatif urbanisasi negara sedang berkembang, terutama Indonesia, menyertai potensi-potensi positif dan kreatif kota.

Kota-kota negara sedang berkembang tidaklah selalu berkembang dengan seimbang. Arsitek Charles Correa menyebutnya “kota yang hebat, tapi tempat yang menjijikkan” (*great cities, terrible places*). “*Private Splendor, Public Squalor*” menggambarkan kontras antara keadaan kota secara umum sebagai ruang khalayak dan ruang-ruang pribadi sebagian kecil elit. Di satu aspek ini mencerminkan gejala umum di negara-negara sedang berkembang: Makin miskin, makin besar kontras itu. Di lain pihak, itu mencerminkan belum mampunya kita mengelola kekayaan bersama, dan setiap orang berupaya maksimal menciptakan ruang pribadi ideal secara sendiri-sendiri, sementara ruang khalayak adalah tempat pembuangan, tempat lewat saja, dari satu ruang pribadi ke ruang pribadi lainnya. Kalau tidak hati-hati, saripati kota, ialah keragaman dalam kepadatan, juga sedang terancam di negara-negara sedang berkembang, oleh karena proses suburbanisasi (di luar maupun di dalam kota) yang cenderung menipiskan dan memecah-belah kota dan kekotaan, bahkan wilayah (teritori). Kecelakaan suburbanisasi menjadi keterlanjuran dan tawaran tunggal ketika tidak ada kemampuan mengelola pendekatan alternatif yang lebih sulit dan bertujuan. Bahayanya adalah kepadatan tanpa keragaman atau keragaman tanpa kepadatan. Pengalaman lain akan modernitas dan urbanitas di negara sedang berkembang adalah bahwa sampai batas tertentu urbanitas adalah identik dengan modernitas, atau sebaliknya. Selain itu, modernitas telah pula dialami sebagai kolonialisasi. Pengalaman-pengalaman ini terus membayangi imajinasi bangsa bekas jajahan tentang kota dan modernisasi yang baik.

Dalam wujud luar yang mungkin berbeda, kota-kota Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang sama. Tentu saja, pada tingkat lebih rinci setiap kota memiliki sejarahnya sendiri.

Kota adalah tempat hidup bersama yang paling intens. Pada saat bersama ia juga mengandung resiko-resiko yang paling besar, banyak, kerap, dan mudah meletus. Sebab itu diperlukan kewaspadaan untuk tidak Hidup Bersama, tapi (malah) Tumbuh Memisah⁵.

Semua hal di atas merupakan bahan yang kaya tak terhingga bagi penciptaan karya seni. Sebaliknya semua itu memerlukan seni sebagai alat manusia merenungkan dirinya, kehidupan bersamanya, mempertajam kepekaannya, mendorong kemampuannya menuju pencapaian lebih tinggi.

Selain nilai-nilai seni yang lebih fungsional atau instrumental, seni selalu berhubungan dengan pengalaman spritual manusia, mengakar dalam bentuk-bentuk kehidupannya, yang diekspresikan dengan rasa keindahan yang unik pada manusia. Maka pertanyaan akan seni urban akan menyangkut juga pertanyaan tentang spiritualitas manusia kota.

Bahkan, meskipun bila tanpa Tuhan, ruang khalayak dibutuhkan *homo-homini-socius* untuk merundingkan kehidupan bersamanya. Perundingan ini akhirnya, dalam keadaan paling sekuler-pun, memerlukan pertanyaan dan renungan tentang siapa dirinya, bila pun tidak dalam hubungannya dengan alam semesta, maka justru makin intens dengan sesamanya di dalam kota.

Seni urban dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sangat luas, asal berhubungan dengan kekotaan, dalam bentuk apa saja, dapat disebut seni yang urban. Dalam arti paling sempit, ia adalah

⁵ Living Together, Growing Apart. Kalimat ini saya pinjam dari Prof. Homy Bhabha, yang mengucapkannya dalam pertemuan di Mumbai, 13 Februari 2006.

seni yang berada di dalam ruang urban, atau lebih sempit lagi ruang khalayak urban.

Dalam pengertian yang paling sempit itu kita mungkin hanya terbatas dapat menyebut patung di ruang khalayak, atau seniman pantomime yang melakukan pertunjukan di ruang terbuka kota. Kegiatan mendongeng di radio dan kampung-kampung miskin kota, sebagaimana dilakukan oleh Putri Sukendro, dapat juga disebut seni kota, meskipun barangkali isi dongengannya justru tentang gadis kecil dan serigala di hutan belantara.

Dalam arti yang sangat luas, karya sastra yang terilhami kota atau kekotaan dapat disebut seni urban. Karya-karya James Joyce seperti *Ulysses* (1914) dan *Dubliners* (1914) sekaligus terilhami kekotaan Dublin dan mengambil kota itu sebagai panggung cerita terjadi. Begitu juga *Cerita dari Jakarta* (1957) oleh Pramoedya Ananta Toer dan *Rumah Kawin*, cerpen karya Nur Zen-Hae (200?).

Yang paling penting ditekankan adalah adanya harapan bahwa—karena kita makin menjadi manusia penghuni kota yang terus menerus elusiv ini, terus menerus menghindari jari jemari kita yang ingin menjamahnya—akan makin banyaklah pengolahan estetik, perenungan, melallui karya seni yang dengan sifat hablurnya dapat menambah kemampuan kita bergelut dengan kota yang elusiv ini, yang selalu menghindar dari rabaan jari jemari kita yang fana.

Tantangan bagi seni kontemporer dari perspektif budaya kota kontemporer adalah secara umum bagaimana seni dapat mengisi kebutuhan spiritual (estetik dan etik) masyarakat kota di dalam keadaan yang serba cair dan tidak menjanjikan penyelesaian apa pun, kapan pun. Bagaimana seni dapat mennyisipkan jarak atau jeda—baik secara terbuka maupun secara subversif—dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita memperoleh ruang dan waktu kritis yang diisyaratkan Walter Benjamin?

Kota-kota di negara sedang berkembang tentu saja memiliki masalahnya sendiri yang khas: kekurangan prasarana, tatanan fisik

maupun kelembagaan sosial yang tidak beres-beres karena pergerakan penduduk yang tinggi, pemerintahan yang ketinggalan paradigma, dan rendahnya kapasitas menyelesaikan konflik secara damai dan memuaskan dan tuntas.

Dengan kata lain ada defisit dalam kapasitas menawarkan jaminan berkelanjutan secara sosial-budaya, ekologis dan ekonomis.

Ada kecenderungan pengikisan kapasitas itu oleh rejim yang ingin mengendalikan/meninggalkan kekotaan. Ada masyarakat yang perlu transformasi. Ada persaingan imajinasi (model, utopia) yang tidak seimbang di dalam pembangunan dan pengelolaan kota-kota kita. Terdapat dominasi wacana dan kemampuan melaksanakan gagasan oleh pihak elit. Sementara “80% mayoritas” tak dapat menyalurkan suaranya secara berarti, apalagi mempengaruhi kebijakan.

Kota telah lama menjadi pesona bagi manusia, ia “rahim yang lahirkan engkau yang kedua” kata Saini. Ia mengubah kita, atau setidaknya membuat kita menjadi tidak seperti sedia kala. Misalnya ketika di kampung, “rahim” kita yang pertama, kita ramah dan sopan di jalan, di kota kita menjadi beringas. Atau sebaliknya, kota memaksakan suatu krama baru yang membentuk kita. Kota adalah sebuah ruang yang merangsang, tempat beragam fenomena mengada dan menjadi, tak kunjung selesai, dalam kepadatan dan kekentalan yang tinggi.

Kini orang juga khawatir dengan neo-liberalisme. Fundamentalisme ekonomi pada semua aspek kehidupan telah mendorong kapitalisasi segala hal, termasuk ruang dan waktu, dengan logika ekonomi semata. Kabarnya ini dapat menyebabkan ruang kota seluruhnya menjadi rebutan kepentingan pribadi, tanpa sisa untuk yang kolektif. Konsepsi Industri Kreatif telah sukses menempatkan kreativitas, kesenian, dan bahkan kebudayaan dalam garis hubungan yang lurus dan tunggal dengan pertumbuhan ekonomi. Sambil memanfaatkan keuntungan ekonomi bagi bangsa yang kaya modal kreatif seperti Indonesia ini, kita perlu tetap mengingat kritik Adorno

dan Horkheimer yang telah lama ditulis (1944): *Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception (Kultur Industrie: Massenbetrug als Aufklärung)*. Terutama sekali ketika reproduksi-mekanis telah digantikan dengan reproduksi-dijital yang makin instan, cepat, dan menukik ke lapisan makin dalam dari produk-produk budaya.

Ini mungkin menjelaskan mengapa kita senang dan sekaligus jijik dengan istilah “talkshow”.

Baik kita mengingat kembali kritik yang pernah ditulis Adorno dan Horkheimer⁶:

The fusion of culture and entertainment that is taking place today leads not only to a depravation of culture but inevitably also to an intellectualisation of amusement...

The idolization of the cheap involves making the average the heroic. The highest-paid stars resemble pictures advertising unspecified proprietary articles. Not without good purpose are they often selected from the host of commercial models. The prevailing tastes takes its ideal from advertising, the beauty in consumption. Hence the Socratic saying that the beautiful is the useful has now been fulfilled—ironically.

Even today the culture industry dresses work of art like political slogans and forces them upon a resistant public at reduced prices; they are as accessible for public enjoyment as a park.

Kutipan itu ditulis lebih dari 60 tahun yang lalu. Kini semuanya hanya makin menjadi-jadi di dalam padat dan ragam raya kota-kota kita.

Bagaimana pun, kota menyimpan tinggalan-tinggalan dari momen-momen penting peradaban manusia di masa lalu, dan sekaligus membuka atau menunjuk kepada momen-momen masa depan. Kota tidak begitu mudah terhapus secara fatalistik begitu saja. Ada kekuatan masyarakat manusia yang misterius di dalamnya. Salah

⁶ Dalam *Culture Industry, Mass Deception as Enlightenment*, 1944.

satunya adalah mewaspadai ancaman-ancaman, dan mengembangkan daya-daya pengolahnya. Kota berubah, begitulah manusianya. Inilah yang terus menerus perlu kita tanggapi dengan kreatif, bukan untuk ditangisi. Kita tetap perlu analisis, tetapi tidak lumpuh olehnya (*paralysis by analysis*), tetapi terus menerus mengolah perubahan itu secara sadar.

Beberapa waktu lalu, dalam kesempatan Festival Teater Jakarta, Desember 2006, saya merumuskan salah satu soal teater kita sebagai persoalan “*Di Mana Gelar Panggung? Berapa Besar?*”

Pertanyaan “di mana gelar panggung?” menyiratkan tanya tentang dimana khalayak sebenarnya berada. Jakarta memang sedang berubah cukup signifikan, dengan khalayak yang berubah pula.

Seni lakon itu sendiri cenderung membentuk ruang khalayak: ia adalah tempat disampaikannya “ujaran” khalayak, dan sekaligus ia mengumpulkan khalayak.

Dalam kedua kecenderungannya itu, seni-lakon memberi ruang dan waktu kepada masyarakat praja/sipil untuk membadan. Misalnya Cok Sawitri dalam kesempatan *Women Playwright International Conference* bulan lalu tanggal 23, menekankan kembali bahwa dalam budaya Bali panggung disakralkan sedemikian rupa sebagai ruang khalayak tempat daya-daya horizontal maupun vertikal sepakat untuk bersama-sama bertemu dalam kebebasan penuh, tempat bahkan “dewa” bisa dikritik. Panggung yang demikian berada secara fisik maupun simbolis “di tengah-tengah” komunitas (kecil) yang relatif kohesiv, yang menjadi bumi tempat panggung itu mengakar, yang sekaligus memberinya alasan adanya, sekaligus nutrisi.

Modernitas melahirkan bentuk negara bangsa yang bukan polis Yunani maupun masyarakat khas seperti di Bali. Modernitas melahirkan ruang-ruang khalayak baru yang menyaingi seni-panggung, misalnya media massa, televisi dan *mall*. Sastra kini tidak lagi harus meminta bantuan seni lakon untuk dapat “dipanggungkan.” Ia dapat “dipanggungkan” juga, misalnya, melalui media massa.

Panggung punya kekuatan yang sekaligus mengandung kecenderungan untuk menurunkan derajat: ia mengubah sesuatu menjadi “tontonan” yang punya daya tarik massa lebih, bila dibandingkan dengan “bacaan”; tetapi “tontonan” dapat mengurangi sublimasi yang didapat dari “membaca”.

“Kota itu orangnya”, kata Sophocles. Tapi siapakah orang kota itu sekarang? Akhir-akhir ini kategori “orang kota” itu sendiri menjadi problematik. Sebab, siapakah yang masih dapat dikatakan “bukan orang kota” saat ini?

Basis ekonomi tidak lagi menentukan seseorang itu “orang kota” atau “orang desa”. Mereka semua menonton televisi yang sama, termasuk menonton (representasi) dirinya sendiri. Dan intensitas pertukaran yang ditimbulkannya terus meningkat. Mudik hanyalah peristiwa simbolik yang mengukuhkan arus bolak-balik tersebut, setahun sekali, di antara arus pertukaran yang sebenarnya terjadi setiap hari.

Setidak-tidaknya di Jawa, kontinum desa-kota hanya berarti geografis atau saujana-alam saja; secara saujana-budaya dapat dikatakan telah terjadi kontinum “kota-kota”, bukan lagi desa-kota. Pulau Jawa, dengan kepadatan sekitar dua kali penduduk kepulauan Inggris, telah menjadi sebuah kota besar (sekali).

Kontinum itu bukan hanya dalam arti “kemajuan” yang baik-baik. Dari sisi sebaliknya, kontinum kota-kota bisa juga dilihat sebagai kontinum desa-desa. Ketika banjir di Jakarta, di metropolis itu tiba-tiba sebagian penduduknya diingatkan kembali akan keadaan *ndeso* yang justru mau ditinggalkannya di kampung halamannya. Karena kerusakan alam, terjadi arus kontinum “desa-desa” yang melawan arus kontinum kota-kota. Kesadaran akan kesatuan hulu dan hilir masuk ke dalam benak orang kota secara menegangkan.

Kesadaran orang desa bahwa kota adalah *ndeso* juga, muncul bukan saja karena menonton bencana lingkungan yang sama, tetapi juga kekasaran-kekasaran para pemimpin atau orang-kaya baru, yang

meskipun tidak unik di desa, tetapi telah membangkitkan citra-citra tentang *buto* dan *begal*, mungkin juga para rangkayo, bangsawan masa lalu yang tidak dijamin senantiasa beradab, dan bahkan *begal* dan “kasar” juga.

Semua orang desa, semua orang kota, kini sadar betul bahwa mereka juga sekaligus global.

Kini semua orang kota pada semua tingkat besaran kota mengalami pertukaran tanpa kendala batas ruang. Intensitas pertukaran itulah, baik pertukaran ekonomi, ideologi, ilmu-pengetahuan dan kebijakan, serta teknologi, yang menimbulkan “kepadatan” –ialah faktor pembeda klasik dari urbanitas– dalam arti yang bukan saja kedekatan fisik, tetapi juga makna. Orang kota dengan keadaan mutakhir ini akan tidak terikat pada ruang, baik kota maupun desa dengan segala jenisnya, melainkan pada dirinya sendiri: seberapa cepat dan pekat ia mengalami kepadatan arus pertukaran dan menemukan makna atau non-makna di dalam mengarungi arus itu. Orang kota akan bergeser menjadi kategori yang makin non-spasial, dan mungkin non-sosiologis (dalam arti tidak dapat diwacanakan sebagai kumpulan orang yang memiliki ciri-ciri sama sebagai kelompok dalam ruang dan waktu tertentu), menjadi kategori personal yang individualistik, yang bisa berada di tempat dan lingkungan sosial mana saja.

Pergerakan penduduk adalah pergerakan penonton

Migrasi bersih penduduk Jakarta 10 tahun terakhir adalah negatif. Artinya lebih banyak yang keluar dari Jakarta daripada yang masuk ke Jakarta. Yang masuk itu yang “lebih miskin”, yang keluar adalah yang “lebih mampu.” Penduduk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan bahkan secara absolut berkurang. Tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi ada di kecamatan-kecamatan milik kabupaten-kabupaten di sekitar Jakarta, terutama yang dekat dengan perbatasan Jakarta. Setiap hari sekitar 2 juta jiwa keluar-masuk Jakarta dari/ke kabupaten-kabupaten itu. Sebagian (belum diketahui berapa banyak)

bahkan masuk/keluar Jakarta dari/ke Bandung, baik secara harian maupun mingguan.

JABODETABEK (bahkan termasuk “DUNG” dari Bandung, dan mungkin juga “PUNG” dari Lampung? JABODETABEK DUNGPUNG?) sebagai suatu entitas sosial-budaya makin menjadi kenyataan, setelah lama sebelumnya telah begitu secara ekonomi.

Semua ini disebabkan oleh antara lain perubahan tata guna lahan, terutama di pusat kota Jakarta, dengan makin banyaknya kawasan permukiman yang tergusur oleh fungsi lain misalnya komersial. Dapat ditengarai bahwa jumlah unit hunian di dalam kota Jakarta berkurang—bukan bertambah!!—dan sebaliknya jumlah perumahan kelas menengah ke atas di kabupaten-kabupaten sekitar bertambah.

Selain itu ada kecenderungan ukuran keluarga perkotaan yang mengecil: Jumlah anggota keluarga berkurang. Maka jumlah anak pendaftar sekolah pun berkurang. Kasus SMP 56 di Kebayoran Baru yang tergusur memiliki latar belakang sosiologis juga, selain kepentingan ekonomi. Memang ada kecenderungan jumlah siswanya berkurang, karena sebagai penduduk sebagiannya sudah terlebih dahulu tergusur ke pinggiran kota, di samping jumlah anak per keluarga makin sedikit.

Semua gerakan ini kiranya berdampak pada tumbuh-kembang atau surutnya khalayak dan penonton kesenian, yang perlu dipertimbangkan dalam strategi mengembangkan kesenian di Jakarta terutama. Ini juga salah satu sebab tumbuhnya komunitas-komunitas seni yang tersebar, tak lagi memusat. Soalnya justru adalah sejauh apa komunitas-komunitas itu masing-masing akan menjadi semacam pusat bagi lingkungan, masyarakat sekitarnya?

Kita merasakan makin parahnyanya kemacetan lalu lintas dan/atau meningkatnya biaya transportasi rata-rata. Antara 15 dan 20% pendapatan domestik bruto Jakarta dihabiskan untuk biaya transportasi. Pada tingkat mikro, pada masing-masing keluarga,

makin kecil pendapatannya, makin tinggi prosentase itu. Saudara-saudara bisa menghitung sendiri biaya angkutan masing-masing.

Memang, meskipun dengan susah payah, sebenarnya orang kini menikmati lebih banyak pilihan prasarana untuk mendatangi lebih banyak tempat-tempat di Jakarta. Tambahan prasarana terakhir, yaitu jalan tol Jakarta-Bandung, hanyalah salah satu contoh saja. Sayangnya waktu perjalanan juga makin panjang. Rata-rata jumlah waktu yang dihabiskan orang di jalan (dalam perjalanan) setiap hari di JABODETABEK meningkat tajam (hingga 3 jam...). Kecepatan rata-rata di jalan sebaliknya menurun tajam juga (hingga hanya sekitar 11 km per jam, atau hampir sama dengan sepeda).

Pada saat yang sama penduduk (berarti: “penonton”) juga menjadi makin tersebar. Kita tidak lagi kerap mendengar adanya komunitas berdasarkan tempat tinggal di dalam Jakarta seperti dulu orang menyebut “anak Menteng”, “anak Berlan”, “anak Cikini”, “anak Tebet”, “anak Kebayoran” dan lain-lain. Kita belum mendengar terbentuknya komunitas berdasarkan tempat tinggal di wilayah-wilayah baru di pinggir atau sekitar Jakarta. Yang ada tentu saja Komunitas Garuda, atau Komunitas Utan Kayu, atau Komunitas Ruang Rupa yang hadirinnya datang dari seantero Jakarta. Komunitas Rumah Dunia di Serang mungkin unik karena letaknya memungkinkan ia mengelola hadirin yang berbeda.

Sedangkan gejala terbaru adalah prasarana telekomunikasi digital yang memudahkan komunikasi, meskipun terbatas dalam kualitas. Hasil totalnya adalah makin mudah menyampaikan berita kepada makin banyak orang di wilayah JABODETABEK, tetapi hal ini tidak sama dengan kemudahan mereka untuk mengunjungi tempat-tempat peristiwa kesenian.

Dibandingkan dengan 38 tahun lampau (ketika DKJ baru didirikan), tentu saja rata-rata penduduk di wilayah Jakarta dan sekitarnya kini lebih sejahtera. Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Jakarta juga paling tinggi untuk seluruh Indonesia. Maka ini khalayak dan penonton seni “modern” yang paling potensial (dibandingkan

dengan seluruh Indonesia). Meskipun tetap ada pengelompokan-pengelompokan berdasarkan etnisitas dan identitas primordial lainnya, makin besar kecenderungan pengelompokan berdasarkan kelas sosial-ekonomi, dan latar belakang pekerjaan/profesi.

Kelas menengah Indonesia secara umum membesar. Terutama di Jakarta dan sekitarnya prosentase mereka terang makin membesar. Kalau dulu “kelas menengah” ini didominasi oleh kelompok-kelompok yang “jinak” kepada kekuasaan, yaitu pedagang dan pegawai negeri yang konservatif, kini makin besar kelas menengah yang lebih independen dan progresif dari berbagai latar belakang profesi dan etnisitas. Selain soal jumlah, ada perubahan kualitas juga pada kelas menengah di Jakarta dan sekitarnya. Mereka relatif lebih independen terhadap kekuasaan, tetapi belum tentu independen terhadap kuasa modal.

Ini berarti sebenarnya “pasar” kesenian makin besar (potensial). Tapi apakah mereka memang telah menjadi penonton yang aktif dan setia? Seberapa jauh mereka dapat di-dinamisasi harus memperhatikan sifat-sifat mereka yang lebih berpendidikan, lebih kreatif, lebih terbuka terhadap informasi global, dan lebih tinggi tuntutananya (dibandingkan dulu), selain lebih independen.

Makin mengota, orang juga jadi makin mendunia, karena kota makin kuat menjadi “*hub*” yang terhubungkan secara mendunia. Kota adalah jendela dunia. Kita makin bisa membanding-bandingkan, dengan bahan yang makin luas cakupannya, baik secara waktu maupun ruang.

Belum diketahui secara pasti, tapi nampaknya komunitas-komunitas seni yang ada masih terbatas pada komunitas “sesama” seniman, dengan sedikit kecenderungan menjadi “komunitas aliran” pula. Apakah komunitas-komunitas seni ini bisa memperluas dan mengakarkan dirinya ke dalam masyarakat tempatannya? Kalau bisa demikian maka seolah-olah kita kembali ke masa pra-modern? Kedengarannya hal itu terlalu romantis, tetapi kemungkinannya juga

tidak dapat diabaikan begitu saja. Mungkin diperlukan kualifikasi dan pencarian bentuk hubungan yang lebih spesifik dan sesuai jaman.

Ringkasnya, perkembangan mutakhir masyarakat dan kota memberikan kemungkinan untuk menjangkau khalayak calon penonton yang lebih besar dan padat raya. Tetapi pada saat bersamaan mereka juga makin tersebar, bahkan tercerai berai. Mereka meningkat secara kuantitas dan kualitas, termasuk dalam hal keragaman. Sementara itu teknologi terus memproduksi “ruang khalayak” tandingan yang menawarkan lebih banyak “tontonan” dengan stimuli-stimuli instan dan sebentar ketimbang “bacaan” yang hablur dan membekas dalam.

Kota dapat mempermudah khalayak menjadi penonton dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik, utamanya menyangkut ketersediaan prasarana, tata guna lahan, ketersediaan sarana, dan pemeliharaan keragaman ruang fisik maupun sosial. Tetapi kebijakan yang dapat menyentuh hal yang lebih mendasar, misalnya posisi seni lakon di dalam kehidupan kolektif masyarakat modern Indonesia, di dalam suatu metropolis yang terus berkembang, pasti memerlukan dorongan yang jauh lebih besar.

Teater Koma, Bengkel Teater (di masa lalu) merupakan contoh yang mengumpulkan penonton dalam jumlah besar. Apakah kita tetap menganggap itu sebagai patokan yang harus dicapai? Atau kita mengubah orientasi kepada jumlah dan ruangan lebih kecil, juga dengan kelompok yang lebih *mobile*, dengan jumlah pemain dan perlengkapan yang lebih sedikit dan ringkas, sehingga bisa pindah ke berbagai sudut kota, mendekati penonton yang hadir makin dalam jumlah kecil, dan makin tersebar di seantero metropolitan?

Bagaimana kalau mencoba ruang-ruang baru? Kota berkembang membuka kemungkinan-kemungkinan ruang baru: di tengah komunitas, di antara komunitas-komunitas pada skala-skala berbeda, taman kota, pojok kota, ruang-kota bergerak seperti angkutan umum yang berdesakan, *mall*, di dalam televisi, di tengah-tengah khalayak yang mengalir (dalam arti fisik nyata maupun

metaforik). Bagaimana seni lakon dapat bergerak (dalam arti nyata fisik maupun metaforik) bersama masyarakat kota yang memang makin cepat bergerak? Apakah seni lakon juga akan mengirimkan grup-grup kecil kepada fragmen-fragmen masyarakat yang makin tersebar di seluruh teritori metropolitan, atau berupaya mengumpulkan fragmen-fragmen itu menjadi massa pendukung besar di satu tempat?

Bentuk yang berubah memerlukan juga naskah yang berbeda. Inovasi harus terjadi pada plot, teks, visualisasi, pada teknik melakon, dan pada hubungan dengan penonton dan ruang(an).





MONUMEN URBAN : SENI DI RUANG PUBLIK

Dr. Sunaryo

Pengertian “monumen urban” dari hari ke hari terus berubah/berkembang sesuai dengan konteks pengertian masyarakat urban dalam lingkup sosial dan geografis yang spesifik. Secara konvensional, monumen urban adalah sebarang objek artistik, karya seni patung atau gubahan arsitektur yang secara khusus diciptakan di ruang-ruang urban dan bertujuan untuk mengabadikan/mengenang pengabdian seseorang, peristiwa, gagasan-gagasan/isme-isme atau tempat-tempat yang penting dalam sejarah suatu masyarakat atau bangsa. Secara umum fungsinya adalah untuk memberikan makna dan citra tertentu pada suatu tempat dan lingkungan disekitarnya.

Istilah pengertian “monumen urban” memiliki pengertian yang spesifik. Ia berbeda dengan pengertian monumen secara luas, karena sebuah monumen juga bisa ditempatkan di makam keluarga, atau ruang-ruang pribadi, sebagai *private memorial statue*. Sementara yang dinamakan “monumen urban” selalu ditempatkan di lokasi-lokasi urban, sehingga terikat pada kepentingan publik di wilayah urban. Sebagai objek seni di ruang publik sudah selayaknya sebuah monumen mampu merangsang kesadaran yang positif dari orang-orang yang melihat dan berinteraksi di sekitarnya. Makna/nilai-nilai edukatif menjadi “tujuan mulia” yang diharapkan dari pembangunan dan kehadiran sebuah monumen urban.

Dewasa ini yang disebut dengan seni publik (seni di ruang publik) memang tidak hanya berbentuk monumen atau patung. Graffiti, performance dan teater yang dilakukan di tempat publik adalah seni publik. Tapi monumen yang ditempatkan di ruang urban memang merupakan bentuk seni publik yang tertua dalam sejarah. Monumen punya ciri khusus dibandingkan bentuk seni publik yang lain, yaitu dalam keinginannya untuk menjadi “abadi” bersama

sejarah peradaban manusia. Pada praktiknya, keinginan ini tidak selalu tercapai karena dinamika sejarah yang terus berubah. Oleh karena itu, seniman perancang monumen yang baik harus mampu dan peka menampilkan sisi-sisi yang positif dan tidak sesaat.

Dalam perkembangannya, khususnya pada abad 20, yang dinamakan “monumen urban” sebenarnya bisa berbentuk gerbang kota, murat, bangunan, taman, atau instalasi yang mengikuti kaidah estetika seni dan arsitektur kontemporer. Namun dalam pemahaman umum di Indonesia, khalayak mengenal istilah “monumen urban” sebagai patung yang ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu di kota. Jika dilihat dari gaya atau ungkapan bahasa rupa yang nampak pada monumen-monumen urban di Indonesia, bisa dikatakan bahwa pemahaman tentang monumen urban masih terbatas pada ‘**patung statis dan figuratif yang berukuran besar saja**’. Padahal monumen seharusnya bisa berupa karya-karya yang lebih eksperimental lagi, misalnya bersifat kinetik atau dengan bantuan unsur-unsur alam (angin/udara, cahaya, air, dll).

Monumen urban umumnya didirikan dengan insisif pemerintah kota, sebagai pihak yang bertugas untuk mengakomodir kepentingan semua pihak yang terkait dengan wilayah urban. Oleh karena itu, suatu gaya atau ungkapan estetik dalam sebuah monumen urban sesungguhnya akan dengan sendirinya mencerminkan selera estetik yang dianut oleh pemerintah kota sebagai pemberi tugas (*commissioner*). Monumen urban di Indonesia didirikan dengan motif yang beragam, tapi secara umum ia memiliki beberapa karakteristik berdasarkan fungsi dan kepentingannya antar lain:

1. Didirikan untuk menyosialisasikan kepentingan politik/ideologis/sejarah suatu bangsa (**fungsi sosial politik**). Monumen semacam ini biasanya didirikan untuk mencitrakan atau mengkampanyekan suatu konsep cita-cita, landasan, keyakinan, kepercayaan yang dijadikan sebagai pedoman suatu masyarakat dalam menjalankan kehidupan kewarganegaraannya. Contoh: Monumen Pembebasan Irian Barat dan Monumen Dirgantara (Pancoran).

2. Dihadirkan sebagai orientasi arah atau tengaran (*landmark*) di sebuah kawasan (**fungsi spasial/arsitekural**). Contoh: Monumen Nasional (Monas) sebagai tengaran Jakarta/Ibukota Negara, atau Patung Tonggak Samudra karya G Sidharta di Tanjung Priok.
3. Didirikan sebagai realisasi dari rancangan besar (*grand design*) elemen keindahan suatu kota (**fungsi estetik**). Contoh: Patung karya Rita Widagdo.

Seharusnya, perwujudan suatu monumen urban sebagai karya seni di ruang publik dikaitkan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini, pemerintah kota sebagai pengemban amanat warga kota seharusnya bisa mewujudkan suatu monumen yang memang menjadi kebutuhan masyarakat kota. Akan tetapi, perancangan dan pembangunan monumen urban di Indonesia seringkali tidak berhasil mencapai tujuan tersebut. Pada praktiknya, kepentingan publik hanyalah salah satu dari berbagai kepentingan yang lain.

Ekspresi seniman sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dengan wilayah estetik harus berkompromi dengan berbagai hal. Selama ini, tak banyak orang bisa melihat dan mengkaji bagaimana perancangan dan pendirian monumen urban di Indonesia selalu menggandeng kompleksitas berbagai kepentingan-yang pada akhirnya bisa memunculkan pergeseran-pergeseran atau bias dari visi/tujuan atau kepentingan awal perancangan atau pembuatan suatu monumen sebagai karya seni di ruang publik.

Dalam hal merancang dan membangun suatu monumen urban, pertama-tama seorang seniman dihadapkan dengan pemahaman pemberi tugas tentang fungsi suatu monumen. Seringkali pemahaman itu lebih cenderung stereotif dan kaku. Pada tahap awal, seorang seniman seharusnya bisa melakukan *visioning* atau penyatuan visi dan usulan-usulan bagaimana sebaiknya sebuah monumen urban dirancang dan diwujudkan. Misalnya dalam hal bahasa ungkap rupa, simbol atau gaya estetik yang cocok untuk menyampaikan suatu pesan, dan cocok dengan karakter suatu kawasan.

Seorang seniman yang baik seharusnya mampu menyodorkan gagasan-gagasan yang mampu memperkaya pemahaman/wawasan estetik sang pemberi tugas. Tapi pada prakteknya, khususnya di Indonesia, hal ini sangat sulit. Yang seringkali terjadi adalah pihak pemberi tugas ‘memaksakan’ apa yang menjadi keinginan mereka sendiri, sehingga seniman seringkali tidak punya otonomi penuh dalam mencipta.

Persolan yang lebih besar muncul ketika suatu monumen urban dirancang atau didirikan dengan tidak mengacu pada perencanaan tata kota yang baik. Sebuah tata kota yang baik seharusnya mempertimbangkan setiap jengkal elemen kota dengan proyeksi jauh ke depan. Masalahnya, di Indonesia seringkali terjadi perubahan visi penguasa dan kebijakan politik yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam komposisi elemen-elemen estetikanya. Perancangan kota yang dilakukan secara parsial (tidak mempertimbangkan perwujudan kota secara menyeluruh dalam jangka waktu yang panjang) akan menyebabkan kota carut marut dan monumen-monumen urban di dalamnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Sebagai aset kota, sebuah monument urban seharusnya dilengkapi dengan perencanaan yang matang berkaitan dengan perawatan dan preservasinya. Kita sering melihat bagaimana monumen-monumen urban di Indonesia terbengkalai karena tidak dirawat sebagaimana mestinya, atau jikalau dirawat, pihak yang menanganinya tidak mempertimbangkan visi dan tujuan awal pendirian monumen itu. Dalam lingkup yang lebih besar, pihak perancang tata kota seharusnya memiliki visi bagaimana seharusnya sebuah monumen itu tetap mencerminkan, sifat-sifat kelanggengan dan relevansi dengan jaman yang terus berubah. Untuk mempertahankan relevansi suatu monumen dengan semangat jaman yang selalu berubah, sebuah monumen perlu terus dijaga nilainya dengan melakukan revitalisasi dan sosialisasi secara terus menerus kepada generasi-generasi yang lebih muda, sehingga

pembangunan monumen tidak menjadi suatu pemborosan yang sia-sia.

Beberapa hal di atas tentu hanyalah sekelumit persoalan yang dihadapi oleh semua pihak yang berkepentingan dengan eksistensi monumen-monumen urban di Indonesia dewasa ini. Sebagai bentuk seni di ruang publik, pembangunan monumen urban harus menjadi kepentingan semua orang. Jika muncul banyak ketidakpuasan dan protes terhadap keberadaannya, bolehlah kita mempertanyakan sejauhmana tanggungjawab pemerintah kota sebagai pihak yang seharusnya menjadi pengemban amanat warganya.

KEYNOTE ADDRESS

FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BENTUK KARYA SENI DALAM RUANG PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI PERENCANAAN KOTA*

Ir. Aurora Tambunan, M.Si

Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta

Yang terhormat, Ketua Akademi Jakarta, Prof. Dr. Taufik Abdullah.

Yang terhormat, Wakil Ketua LIPI, Prof. Dr. Lukman Hakim.

Ibu dan Bapak yang sebetulnya ingin saya sebut namanya satu-persatu, tapi ijin saya kali ini hanya dengan mewakili ibu dan bapak yang saya hormati.

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan sangat menyesal Pak Fauzi Bowo terpaksa harus meninggalkan kita untuk tugas kenegaraan yang beliau tidak bisa mewakili lagi. Beliau meminta saya untuk membacakan *keynote address* atau *keynote paper* yang sebetulnya sudah beliau persiapkan sendiri untuk beliau sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi ekspektasi Ibu dan Bapak sekalian.

* Ibu Aurora Tambunan ditugaskan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Dr. Ing. H. Fauzi Bowo untuk membacakan makalahnya, karena beliau setelah memberi sambutan dalam seminar ini, menghadiri rapat mendadak dengan Presiden di Halim Perdana Kusumah.

Pengantar

Puji syukur, pertama kali kami sampaikan kepada Pak Fauzi Bowo karena beliau dapat hadir dalam Seminar Seni di Ruang Publik, Monumen, dan Tata Kota, meskipun tidak dapat mengikutinya hingga selesai. Juga, beliau mengucapkan terima kasih atas undangan. Sungguh merupakan kehormatan dapat hadir pada forum yang terhormat ini sekaligus mendapatkan kepercayaan menyampaikan makalah **“Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pengambilan Keputusan Bentuk Karya Seni dalam Ruang Publik, sebagai Bagian dari Perencanaan Kota.”**

Tema tersebut dinilai penting dan relevan. Penting karena perencanaan kota Jakarta terkait langsung dengan pembentukan karakter dan citra Jakarta, baik sebagai ibu kota negara maupun kota internasional kebanggaan kita dan juga relevan karena perencanaan kota merupakan bagian integral dari pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Perkembangan Jakarta

Izinkan saya melanjutkan dengan menceritakan terlebih dahulu mengenai perkembangan Jakarta. Jakarta dimulai dari sebuah kota kecil di muara Sungai Ciliwung.

Dulu, namanya Sunda Kelapa, pada abad 15. Penduduknya ada sekitar 15.000 jiwa. Sunda Kelapa berkembang dengan sangat pesat sebagai pusat perdagangan rempah, dikunjungi oleh kapal-kapal VOC Belanda, Portugis, Inggris. Bahkan, pernah diduduki oleh Portugis. Kemudian, diusir oleh tentara Fatahilah. Kemudian, berubah namanya menjadi Jayakarta. Dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta adalah suatu proses sendiri. Setelah silih berganti diduduki penjajah, Belanda akhirnya memberi nama Batavia. Dari Sunda Kelapa menjadi Fatahilah dan Jayakarta, lalu, menjadi Batavia. Kemudian, setelah diduduki Jepang, pada masa kemerdekaan RI, diubah namanya menjadi Jakarta Raya yang kita kenal sampai saat ini.

Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara RI setelah 17 Agustus 1945. Penduduk Jakarta terus bertambah. Pada akhir 1977 penduduk Jakarta berjumlah lebih dari 5,7 juta jiwa. Dan tahun 2006, menurut data statistik, penduduk Jakarta lebih dari 8,7 juta jiwa. Kira-kira sebelas juta di waktu siang dan di malam hari sembilan juta.

Kota ini memang kota multi fungsi. Dia bukan hanya kota pemerintahan, sebagai mana di beberapa negara yang pemerintah dan kota bisnisnya berbeda. Jakarta bergabung semuanya. Kota pemerintahan, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Jakarta berkembang pesat. Dia sebagai magnet besar karena banyak sekali fungsinya. Urbanisasi tidak bisa dielakkan. Akhirnya, Jakarta jadi *overloaded*. Segala macam manusia ada di sini. Yang paling kaya sampai yang paling miskin ada di Jakarta. Yang paling pintar dan yang paling bodoh ada di Jakarta. Semuanya bergabung menjadi satu. *Range*-nya itu tinggi sekali. Dari yang pintar sampai yang bodoh. Dari orang kaya sampai orang miskin dan segala macam harus juga diurusi.

Perencanaan Kota

Sampailah kita ke bagian perencanaan kota. Tugas besar membangun Jakarta menjadi kota yang representatif dan kompetitif, sejajar dengan kota-kota besar lain di dunia. Itu yang diamanatkan dalam visi-misi pembangunan kota Jakarta 2007, dan 2007 Gubernur terpilih nanti akan segera menyampaikan visi-misi resminya. Kemarin visi-misi pada waktu kampanye 2007-2012 nanti akan mulai dengan suatu misi yang akan diperdakan. Visi Renstra 2002-2007 bunyinya **"Terwujudnya Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien, dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, yang sejahtera dan berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan"**. Itu cita-citanya. Jadi, *everything is there*. Semua kita harapkan ada di Jakarta.

Ibu dan Bapak sekalian,

Pemahaman terhadap visi tersebut mengandung makna bahwa Jakarta harus memiliki daya saing global. Jakarta harus menjalankan fungsinya secara efisien sehingga representatif dilihat dari kepentingan nasional dan internasional. Jakarta harus dihuni oleh warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya, berdisiplin tinggi, dan produktif. Jakarta harus memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik serta manusiawi agar menjamin dinamika kehidupan dan pembangunan berkelanjutan.

Jadi, barangkali menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Fauzi yang selalu disampaikan bahwa *we are here together. We are in the same boat*. Kalau kapal ini karam, bukan hanya pemerintah yang disalahkan tapi kita semua. Jadi, itu adalah *basic line* dari pemahaman visi.

Untuk itu misi pembangunan Jakarta yang berkaitan dengan penataan kota meliputi komponen penting. Diantaranya, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif, dan terjangkau, serta mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Bersamaan dengan itu, penyediaan sarana dan prasarana kota, fasilitas serta utilitas kota untuk memenuhi kebutuhan warganya diarahkan untuk membentuk warna, wajah, dan citra kota yang mampu membangkitkan semangat hidup warga kota Jakarta. Jadi, di situ ada sesuatu untuk kita berkreasi lebih kreatif lagi.

Kota sebagai suatu kawasan yang hidup, dinamis, dan terus berkembang membutuhkan konsep dan pikiran yang juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu, penataan kota yang diangkat dalam seminar ini nanti perlu kita tindaklanjuti.

Penataan dan pengembangan kota tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dan terpadu. Dalam keragaman dan kompleksitas permasalahan kota dibutuhkan kesamaan persepsi dan kerja sama seluruh pihak. Pada perencanaan kota, pengembangan, masyarakat,

dan pemerintah daerah menyadari bahwa pengembangan kota harus berbasis manusia merupakan keharusan.

Ruang Publik dan Karya Seni

Kita masuk ke bagian yang barangkali paling digaris bawahi dalam ruang publik dan karya seni. Di ITB setahu saya memang Departemen Seni Rupa itu ada. Ini artinya, barangkali, memang di Indonesia pun *art* dan *science* itu seharusnya memang menjadi satu komponen yang tidak bisa lepas. Saya sangat setuju kata-kata dari Pak Lukman Hakim.

Definisi ruang publik yang nanti kita bisa catat salah satunya, kira-kira tempat masyarakat bisa berinteraksi dan bersosialisasi. Untuk akses ruang publik itu masyarakat tidak perlu membayar. Suatu tempat di mana masyarakat gratis masuk ke situ dan dia bisa bersosialisasi. Ruang publik, tanggung jawabnya, barangkali, ada di pemerintah karena memang itu adalah bagian, biasanya, dari sarana dan prasarana. Namun, sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan antara lain asosiasi/organisasi seniman, budayawan, dan masyarakat.

Ruang publik, kalau diberi contoh, meliputi taman, jalan, dan sebagainya. Itu yang antara lain kita bisa masukkan sebagai ruang publik yang paling utama. Ada fasilitas-fasilitas pada ruang publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari penyediaan sarana dan prasarana. Ada patung, pos jaga, lampu jalan, tempat telepon umum, penataan di sepanjang pedestrian, dan berbagai fasilitas publik lain. Jadi, barangkali kita lebarkan karya seni tidak selalu harus patung, bisa karya-karya seni lain, termasuk mural. Saya kira itu juga karya seni yang di ruang publik. Barangkali, itu juga nanti menjadi salah satu catatan dalam seminar ini untuk menjadi masukkan untuk kami. Jadi, mudah-mudahan tidak hanya terfokus pada bentuk patung atau monumen.

Biasanya, orang melihat atau menikmati karya seni di galeri. Benda-benda seni itu ada di galeri. Lalu, kita, pemerhati/penikmat

seni, yang datang ke galeri tersebut. Sekarang, kita sangat mungkin menggelar atau memamerkan karya seni itu di ruang publik. Jadi karya seni itu yang masuk ke masyarakat. Dia bukan hanya untuk pemerhati seni, tapi semua bisa menikmati. Manusia atau warga kota dipaksa untuk menikmati karya seni tersebut, baik dia pemerhati seni maupun tidak. Sehingga perannya terhadap penciptaan wawasan seni di masyarakat itu kuat sekali.

Menyadari itu, tahun lalu Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, telah bekerja sama dengan IKJ dan Dinas Pertamanan DKI Jakarta mengadakan festival seni patung di ruang publik. Suatu kegiatan yang baru pertama kali dilakukan pada tahun 2006. Pada waktu itu kami mengundang beberapa pematung untuk berlomba. Waktu itu, kami memberikan suatu lokasi, yaitu satu taman yang kira-kira nanti mau dipakai sebagai tempat untuk ditaruh patung-patung tersebut. Jadi, patungnya nanti skala manusia.

Karya seni di taman itu memang seharusnya skalanya, skala manusia. Anak-anak bisa bermain, harus aman, tidak menimbulkan bahaya--tidak ada yang tajam-tajam, misalnya. Lalu, terbuat dari bahan yang kuat, sehingga itu bisa dipakai oleh masyarakat, baik dia menikmati seninya atau dia menikmati bendanya, tapi itu jadi bagian dari masyarakat. Kalau karya seni di pinggir jalan biasanya skalanya, skala mobil, sehingga kita tidak perlu terlalu detil memperhatikan. Jadi, sambil jalan-jalan saja, kita sudah merasa itu benda seni.

Pada waktu kami melakukan festival di ruang publik yang kita batasi adalah patung dengan skala manusia untuk satu taman. Pemenang-pemenangnya sudah ada, kita bekerja sama dengan Dinas Pertamanan untuk pemenang-pemenang tersebut dibuatkan skala 1:1. Waktu itu ada satu taman, di kampung sawah, yang kita gunakan. Jadi, nanti mudah-mudahan, kita membuat satu taman yang isinya adalah patung-patung pemenang *event-event* tertentu. Sehingga masyarakat di situ bisa sambil jalan-jalan, tapi juga menikmati patung-patung yang skala manusia. Jadi, pada waktu itu jurinya juga

kita minta untuk memperhatikan hal-hal yang menyangkut keamanan/kekuatan benda tersebut, selain dari segi keindahannya.

Yang ingin digarisbawahi adalah dalam ruang publik itu ada hak dan tanggung jawab. Contohnya, Taman Menteng. Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh ruang publik, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk sisi yang lain, kewajiban. Mudah sekali masyarakat mengklaim ke pemerintah, kami butuh ini dan butuh ini, tetapi dibalikinya itu ada kewajiban masyarakat yang kadang-kadang suka terlupakan. Barangkali yang kita inginkan dalam forum ini adalah, sebetulnya kewajiban masyarakat untuk ikut merawat, menjaga, membuang sampah di tempatnya, tidak mengotori dan tidak merusak. Barangkali juga termasuk memarahi siapa saja masyarakat yang sembarangan mempergunakan benda-benda seni tersebut.

Jadi, karya seni di ruang pulik harus menjadi ornamen yang melengkapi, harus bisa memperindah eksistensi kota, harus bisa menyentuh perasaan, harus terbuat dari bahan yang aman bagi manusia, dan khususnya, barangkali karya seni yang di jalan tidak boleh memecah konsentrasi pengguna jalan.

Karya seni dan benda seni di ruang publik itu memang tanggung jawab pemerintah, tapi pemerintah sangat membutuhkan dukungan, masukan, bantuan, partisipasi aktif seluruh masyarakat. Forum ini adalah salah satu di mana kita bisa mengharapkan hal tersebut, termasuk dalam hal penciptaan ornamen-ornamen tersebut. Dengan dana yang sangat terbatas, apalagi ada kepentingan-kepentingan masyarakat miskin misalnya, dan lain sebagainya, kadang-kadang yang namanya seni itu sudah dinomor berapa, prioritas ke berapa. Alangkah baiknya, forum-forum semacam ini juga menggali keterlibatan dari masyarakat, termasuk bantuan dana, juga koordinasi dengan kami untuk mereka yang akan menyumbang. Karena perletakkannya di mana memang menjadi tanggung jawab kami.

Kedepan, sebagaimana Pak Fauzi sampaikan, kami diarahkan untuk lebih banyak mendengar. Dulu rasanya kami sudah merasa

banyak mendengar, tetapi kami menyadari bahwa, barangkali kurang bersih kupingnya sehingga tidak terlalu tajam.

Satu hal lagi, bahwa tidak bisa sepuluh juta masyarakat ini dibikin *happy*. Bantu kami untuk menentukan yang mana menjadi prioritas. Jadi, barangkali, itu adalah salah satu yang kami harapkan. Karya seni dan benda seni di ruang publik adalah tanggung jawab kita bersama.

Hasil dari seminar ini akan kami pakai untuk penentuan kebijakan lebih lanjut. Saya, Pak Moko dan dari dinas pertamanan akan mendengarkan Ibu dan Bapak sekalian untuk mendapatkan kota yang bernuansa seni tetapi dengan fungsi yang bisa membuat masyarakat nyaman.

Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memperkaya seminar ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmarullahi wabarakatuh.

SESI DISKUSI PERTAMA

Moderator:

Selamat pagi Saudara-Saudara yang saya hormati. Hari yang berbahagia karena kita bisa membicarakan sesuatu yang sangat penting buat kehidupan kita di Kota Jakarta, mengenai Seni di Ruang Publik, Manumen dan Tata Kota.

Pada pagi hari ini kita mendapatkan tamu dari Rotterdam, Dr. Siebe Thissen yang akan menyampaikan pemaparannya mengenai *Public Art—A Rotterdam Perspective*. Mudah-mudahan dari pengalaman beliau, kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan bisa menjadikan bekal untuk melakukan langkah-langkah yang strategis, setidak-tidaknya, lima sampai sepuluh tahun yang akan datang.

Untuk menyingkat waktu, saya mempersilahkan kepada Dr. Siebe Thissen untuk menyampaikan pemaparannya. *So I give your half a hour for your topic.*

Public Art - A Rotterdam Perspective

Dr. Siebe Thissen

Public Art Director Centre for the Arts Rotterdam, The Netherlands

I am honoured to be part of this seminar. This is my first visit to the republic of Indonesia, however, some fragmented knowledge of colonial and post-colonial Indonesia, passed on through personal stories by relatives and history lessons at school, has become rooted in my genetic consciousness. I realize these coloured narratives and imagines have probably only attributed to a kind of colour-blindness, which makes me an ignorant stranger in your country. I hope you will excuse me as an outsider for not being able to explore the Indonesian situation here, yet discussing the Dutch and Rotterdam context in particular. And I hope you will excuse me for not speaking your language.

Being announced as “a speaker from abroad who is able to talk about [public art] situation in his country, having a more mature tradition of city planning”, urges me to make some comments first. Yes, Rotterdam does mature traditions of public art department. However, drastic demographic changes and the process of globalisation, have also forced countries with mature traditions to re-invent themselves. For instance, the growing influence of Muslim and Afro-Caribbean cultures within Dutch society, and consequently, the challenges the offer for art in general and public art in particular, draw with heavily on city traditions, policies and programs. Since a decade therefore, the public art department in Rotterdam recognise two specific perspectives or even domains: art in public space and new genre public art. These domains are filled by issues raised by people like Tom Finke pearl, former director of the New York percent for art program: “The history of public art is most often told with an emphasis on the word ‘art’, and very little consideration of the public context”. I will get back to this distinction later. In short, how mature our traditions may seem, today we are desperately in need of new ideas, alternatively practices and fruitful cultural exchanges, in order to re-invent public art in a many-cultured city. So this foreign speaker wishes to learn from your approaches and re-inventions as well. I hope I’m able invite you to visit our city one day and continue our mutual talk about public art and possible futures. My lecture today is not so much concerned with contemporary theories on public art, but I will try to stick as close as I can to the Rotterdam public art practice and challenges we encounter in the institutional level.

The first is public art is not public because buy prices and museums and galleries. It is not public because art works a place outdoor. It is not public because you don’t have to pay an entrance fee to visit the art work. Public art is public because its values and not tricked by commercial motives and public art tempts to escape the market economy. Public art exist because of its fundamental relationship between the works of art and the public. Public art is the best in between the art works and the public.

As we all know, as a historical phenomenon, art in public space has always been part of the realms of popes and kings. The church and the state erected statues of superhuman royal and military leaders, political, and religious inspirers, always placed on grand pedestals, from which they looked down on us—small and humble humans. These monuments were part of the society of control and provided guidelines how to become a good, i.e. submissive civilian. Even in their later secularist disguised, they still performed many of these functions. In 19th century Holland, liberal lobby groups defined Dutch identity from a nationalist perspective. Inventing this tradition, they used the Golden age, the 17th century, as the coming of age of the Nederland and Dutch identity. Golden Age writers like Joost van de Vondel, artists like Rembrandt and philosophers like Spinoza, were heralded as the champions of Dutch identity and culture. The liberals envisioned the streets, Public space, as an illustrated history of Dutch history and grandeur. Their monuments and pedestals resembled the old bronze and stone kings, generals and popes. It is hard to imagine that a foreign visitor, lacking historical knowledge of the Netherlands, could see any difference between the two domains.

Till far in the 20th century, art in public space was closely connected to the state, the city and political lobby groups. American writer Michael Kelly once remarked that countries with strong or authoritarian governments which are not directly responsible to the public, set great value to art in public space. This was especially true for socialist, communists and fascist governments and it is not surprising that revolt and revolutions always include assaults on public monuments – think of the angry mob that dragged down Sadam Hoessein's statue in Baghdad on the 9th of April 2003. On a smaller, more local scale comparable cases are manifest. A Catholic village in the south of the Nederland had to remove a statue of an early 20th century priest several times, for locals kept assaulting the bronze bust at night time. They kept the man responsible for mental harm done to their families. Sometimes the same mistrust is expressed against works of autonomous art. In Rotterdam recently, a bronze sculpture

by American artist Paul McCarthy – a huge Santa Claus, carrying a dildo – could not be placed in the public space and had to be locked up in a museum, since public opinion had turned against it. I don't think the audiences criticize the provocative design. However, as tax payers they seemed to blame the city council for not being informed about the content and the chosen location in the first place. Public art is a matter of democracy. With the last example I've reached some problems at home. So let me elaborate on the Rotterdam situation first. How the city developed its public art tradition? Who are responsible for it? How is public art financed? How is public art related to city planning? What are the differences between public art and new genre public art and how is this perspective organised on an institutional level?

Contemporary public art in Rotterdam is associated closely with the Second World War. On the 14th of May 1940, the centre city of Rotterdam was totally destroyed by a German air fleet bombardment, causing the Dutch to surrender themselves to the occupier a couple of days later. The city was ruins and had to be built up again completely – that's why Rotterdam is the most modern city in Nederland today; why architects like Rem Koolhaas chose the city as their hometown; why modern and post-modern architecture has become a tourist attraction; and why its city planners have gained a worldwide reputation. After the war (1945) a series of memorials and monuments had to commemorate the loss of lives in Rotterdam: civilians, soldiers, deported and murdered Jews. The brutal rape and deconstruction of the inner city was also commemorated, often through remarkable sculptures made by internationally known artists, paid by local entrepreneurs and businessmen and consequently granted to the city as a gift. Sculptures like Zadkine's "Destroyed City" (1953) or Naum Gabo's "Stylised Flower" (1957) are examples. These huge sculptures fitted well in the still empty public spaces, waiting for city planners and their ideas to move in. However, due to these gifts, public art was more or less a private affair. The only public activities consisted of taking care of permits, finding a

suitable location and inviting the mayor to deliver a speech at the unveiling of the sculpture. The publics were hardly involved in anything.

In the 1960 the city council expressed the will to be in charge and to take full responsibility for public art. A series of regulations were formulated in order to a more coherent policy – let us summaries these regulations as the “Present for Art Program”. Three wishes were formulated:

- The wish to compose an ambitious sculpture collection;
- The wish to decorate local governmental buildings with art works;
- The wish to infuse public space with art works.

The approach however was still elicits. A small committee of insiders decided which kind of important for our city and which sculptures should be bought in order to build up a fine urban public art collection. Over the year, this program resulted in two collections. There is a more or less a local Rotterdam at collection, with sculptures produced by local and national artist. This collection encloses approximately 250 art works. Consequently there is an international collection, called Sculpture International Rotterdam (SIR). The advisory board of the latter is installed by the city council and their budgets (200.000 euro each year) are funded by the City Decoration Fund. In fact this is the only public art fund, making it possible to decide autonomously which sculptures are needed for Rotterdam and where they should be placed. They are not necessarily location responsive. SIR consists today of approximately forty sculptures and art work.

Most public art however, including the local public art collection, is financed by building and construction programs, making it possible to use the 1960 percent for art site-specific regulation. This program makes sure public art is always part of city planning and public space design. If there is a budget, ad hoc committees are usually formed, consisting of public art officials, public space designers, sometimes architects, and – very important –

local residents. Together they give shape to a process, called “site-responsiveness”: what are the qualities of the public space in question: what’s needed in that specific space; what kind of art is desirable and which artist should team up with the group; and what kind of steps and procedures are to be taken. This contemporary form of democracy developed over years. It is hard to say how big annual percent for art budget are as those budgeted totally depend on construction program, i.e. totally depend on the commercial successful value of the city.

In the early seventies artists, politicians and residents started to criticise the elitist approach to public art. New program, like “town painting” or “art in neighbourhood” made it possible to finance murals and community art, and to take public art to the streets and the residents – to poorer suburbs and boroughs, far away from the city centre and far away from art insiders who tend to monopolise the art discourse. This movement also injected more traditional ways of decision making: different publics or users of public space (residents, children, workers, women, minorities, shopkeepers, to mention only some of them) became part of the public art works themselves. They publicised art – they made art public.

But democracy and community art are not always good companions of city planning and local/global prestige. The classic sculptures or monument adds far better to a city’s pride and self-image. As icons, landmarks, congealed memories, tourist attractions or even logos, they produce an urban identity. In the last decade this tension resulted in two different public art genres. Art two different public art directors, however both associated with one Centre for the Art in Rotterdam. Roughly said, my colleague runs the Collection and Inheritance department – focusing on new genre public art and commissions for local artists.

As a specific public art domain, Collection and Inheritance aims at creating and taking care of an ambitions collection of national and international art works. Starting point is the

international high art discourse, and fund and motives are driven by urban imagery and memory, by nations of history, by city pride and tourism. Processes of decision making are not democratic, yet reserved for experts. An independent committee of insiders is supposed to advise the mayor and the council. Every two years or so, a new sculpture or other art work is added to the public collection.

Rotterdam is also known for its policies for maintenance. All sculptures are in good shape, thank to a small art and monuments unit, operating from within the public work department.

Commission and Projects is a more diffuse domain. Community art projects, pop culture, murals, urban design, street furniture and public lighting, to mention only a few public art manifestations, do not attribute to a public art collection. By creating series of commissions for artists on different levels and in different scales – sometimes one hundred projects each year, the policy aims to push the art into the urban environment and turn art and artists into visible aspects of urban life. Since the nineties, many artists have left their studios in order to transform the urban fabric of everyday life or to comment on issues like globalisation, commercialism or our rapidly changing many-cultured society. It is almost impossible to fund these projects in traditional ways. The City Decoration Fund or percent of art programs are not suited to finance there public art works. We need National fund, housing corporations, neighbourhood committees, schools and borough councils provide a large part of the necessary budgets. Here the public art director acts as a director, not as a curator.

However, both public art domains try to cooperate and to decide what has to be done in Rotterdam and how the art and the public space are suited best. This does not mean that there are no tensions. There is a continuing debate about city planning and development, about public space design and about the audiences public art is made for. For instance, why do we need those ambitious art works in public space – do not we have enough of them already?

Is art able to survive in a context of globalisation, billboards, advertising, and spectacular commodities? Does community art lead to bad quality art? Why should public space and public art be laboratories for human environment? Do Muslims or Antilleans or Hindus deserve other, non-western works of art or do we just have to educate them in order to introduce them to our own tradition of art? Is the practice of democracy compatible with the production of art? The whole debate about public art has become totally intertwined with the public art infrastructure of today's Rotterdam. All tensions and opinions are visible within a range of commissioned public art projects. And we try to extend this debate to the field of city planner and public space designers. I do not think we totally effective in this – considering the relative small influence of the art on large scale city planning, however, someone has got to do the job.

In 2001 the Centre for the Arts organised a conference on the public art called Urban Reflections. We invited almost eighty artists, architects and city planners and questioned them about the ways they view the public space and public art. Key note speaker and artist Olu Oguibe elaborated on this theme and hesitated to define public art. Instead he came up with four negatives aspects:

- *Public art is not instrument of civilisation politics, suited to serve the people or the proletariat of the citizens, that is, to serve general and abstract audience – public art recognise different publics;*
- *Public art does not enclose governmental regulations or sanctions – public art breaths public opinion and depends largely on civil initiatives;*
- *Public art is incompatible with private, exclusive notions of an artist – there's a difference between public art and private art;*
- *Public art does not view public space as a place for personal and private meditation and does not view public space as an outdoor museum.*

This is interesting definition – and a break with former options. One of the biggest Dutch public art bureaus once stated: "Many artists do not have slightest interest in public space, however,

they are capable in creating the finest art works for the public space". In other words, let the artists do their jobs and let us, public art professionals, find a place of space for those works. I think this is a clinical option: shouldn't we demand a more genuine interest in public space and in the publics that are to be confronted with public art? Or to put it differently: isn't there a difference indeed between a public artist and a private artist?

The following debates and interviews of the Urban Reflections conference were very interesting. In the end we recognise five different perspectives on public art. It may seem like wordplay, but this is how we summarised these options:

- *Art in Public Space: you've got a work of art and need a place to put it somewhere (sculptures, monuments, urban design, murals ...);*
- *Art of Public Space: a public space can be a creative fabric, you only need to program art to reveal the potentials of the space (festivals, interventions, temporary art works or projects ...);*
- *Public Space as Art: in context of globalisation part of the cities are planned and developed as collective art works (squares, shopping districts, air ports, entertainment areas, gentrified apartment areas ...);*
- *Art as Public Space: many artists consider their works to be public spaces themselves, opening up possibilities for interaction (media art, community art, art education ...);*
- *Public Space as a Multi-sensory Domain: you could say this is multimedia approach. A lot of artist questioned the visual dominant of western art and they think there so much visual pollution so to appeal to non-visual means of communication (sound, smell, skin feel, body ...).*

Being public art officials – always negotiating between commissions, fund, motives, the city and art – these playful definitions help us to understand why professionals – artists and city planners – are interested in public art, how they view public art, and how these

different opinions, these demands, should be encountered by the art community. We should be careful not to turn them into institutionalised regulations, but they can help us seeing more clearly and not to turn us to create a suitable program or format of decision making. In short, dealing with contemporary public art in a global and commercialised society, you have to combine the qualities of an artist, a curator, a director, and a producer – the role depends on demands and public.

I hope we can discuss some of the issues raised here and start to unravel the complex relations between urban planning and public art. By its local nature, since the sixties public art in Rotterdam has always been connected with city planning. Regulations like the percent for art program or the City Decoration Fund have guaranteed that specific connection. Budgets had to be pulled out of building programs. Vice versa, knowledge of building programs and planning has influenced the nature of public art. This is also why local public art policies have never been decentralised and handed over to community councils, like an Amsterdam. This connections and this centralisation of the art public department laid out the foundations of a beautiful public art collection, still vital and still transforming today.

On the other hand, for new developments within public art for many-cultured societies – summarised in the notion of new genre public art – we need to be very creative in finding an alternative funding and an alternative discourse. If we wish to pay more attention to the idea of ‘public’ within the nation of ‘public art’, we may not need the companionship of city planners and architects. Perhaps we should look elsewhere and find new friends and allies. In Jakarta for instance. Thank you

Moderator:

Thank you very much Dr Siebe Thissen. Saya mendapat tugas sebelum kita mulai diskusi untuk memberikan sedikit gambaran mengenai siapa beliau.

Beliau pada tahun 1984-1990 *History and Philosophy at Erasmus University* di Rotterdam. 1990-2000 *research philosophy on the Netherlands 20 century*. Kemudian, tahun 2000 Ph.D. *Spinosis of Philosohopical Movement in the Nederlands 1948-1970*. Tahun 1995-2000 beliau melakukan *research for centre for Philosophy and Art in Rotterdam Popular Culture and Public Space*. Tahun 2000, *public art director at the Centre for the Art Rotterdam* dan beliau juga banyak menerbitkan buku dan artikel mengenai seni, ruang publik, *popular culture* dan *globalism in urban society*.

So it is time for discussing. I would like to invite some opinions or questions from the floor. Kita mulai termin pertama dengan tiga penanya.

Penanya 1: Rosihan Anwar

There are one million Moslems of the sixteen million population of Nederland, right?! I understand in cities like, Rotterdam, Amsterdam, Harlem they will became a majority. I have never been in Nederland for long time. My question is, could you enlighten us as how the manifestation of the Moslem community there, in the term of the subject we are discussing. Whether they are interested and having their own exhibitions of the art, whatever it is, or are they still less speak? Tell us something. Are they still overwhelmed by their work as worker there so that they are not interested in this kind? I hope you can understand my English.

Penanya 2: Edy Sedyawati

Do you differentiate between permanent art and public space and temporary art? Do you concern for this art? For instance, people tend to decorate the city in more special way and they make a special ornament and sometimes make special work of art. So, I would like you to clarify about these concepts. And about the difference between the elitist art and the popular art, like mural. In Indonesia, if you have time to travel around, especially passing bridges, on the wall of the bridges, sometimes, we have many kinds of painting. It can be just

a spontaneously made but, sometimes it is designed by the government.

Penanya 3: Mely G. Tan

I am still troubling with so many definitions. Of course we should not be focusing too much on the definitions because it will confuse. But, I find a very interesting in page 2 “public art is the matter of democracy”. It is very interesting. You said about the situation in Rotterdam but I still don’t see how you explain that public art as the matter of democracy.

I also look at the program you have and some of definitions that came out. On page 3, you say that involve local resident. Here, if I look at the stake-holders/government, when you talk about whole things over there, then the government, your cooperation and civil society. I, as sociologist, especially looking at civil society. So many different kinds of civil society components.

On page four, public art is incompatible with private and exclusive notion of an artist that should be different between public art and private art. What do you mean by that? May be you can elaborate a little bit more in this note.

Jawaban: Siebe Thissen

Thank you very much. Should I start with the Moslem question first. Yes, they have a lot of changes. My Boss of art and public art is a Moslem. So, everything I do I have to make sure with him. I have to work with him. I have to cooperate with him. He has very strict views on society. The former, elderly man who was in charge of culture had very different views on what should we have on public art and public art in the city. They were part of the city council we had for the last four years were very different. You could say, very aggressive against many culture societies in Rotterdam but this city council is completely the opposite. We got, I think, three or four within the city council now. They have very strong views on the city. The early man was in charge all the building programs and the rural

urban renovation city is a Moslem. The early man who got the art is Moslem. So, the change a lot.

A lot of Moslem also has become part of the rising middle class in the Rotterdam. So, they are very important for the city. You can see that many people, let say, Dutch people/middle class, and move out of the city but a lot of Moslem do not. So, they stay there. So I think that there are a lot of changes going on.

I am not sure where it leads. I don't think they have very significant factor yet within the art. Of course, they are in the international art community. For instance, the influence of Istanbul in Rotterdam. But you see the same thing. It is not different from the Dutch people. If you see the modern art discourse is very international discourse. People understand each other what is going on. Art insiders know exactly what is going on in Istanbul and the other and they know what is happening in Rotterdam. That does not mean that it the same for the working class. It is not for the Dutch working class. It is not for the Moslem working class. So if I invite very famous Moslem artist from Istanbul to Rotterdam, the majority of the Turks-American, probably don't understand what this man talking about. So, I think there is always big gap between art community, the art discourse and the working class. I don't think that this is for Moslem or for Dutch people.

The second question is about contemporary art and prominent art. Differences between it? Elitist program or popular program?

I don't think that there is a different between them. I think all art are elitist, no matter it is high art or low art even if you see a Hip Hop mural, it sounds a few kids that know the genre era completely into Hip or into mural that are able to make a good drawing. If someone else do it, the publish says distinct. So I think all art are elitist, low-art and high-art. So, there is no difference at all.

But, I don't think the more popular art have moved in last ten years within the world of the established public art. So, in the all day it is mainly putting up statues in the city. I was a very... very... small people taken care of that. I think, in last 10-15 years we see that the notion of public, within public art, are become more important and for the city of Rotterdam, working class city, with a lot of people will not going to visit museum on the regular days. The street public space is very important for art education for being able to get general awareness of the art in general. So, the street has become very important and we have seen it is as a kind of democratic process.

We see more people, more artist, and more creative people becoming a slowly part of making them self visible within that place. So, it is still happening. We still have the art work. We also have the murals. You asked me about the mural. I have seen it this morning and we watch travel of them, because the traffic jams are always fiery. So, you have a time to have a good look.

But, for instance, in Rotterdam we recently discover the mural as well and we are working at the boot at the moment and in November we are publishing a book about a hundred years of muralist in Rotterdam. So, that would be the first time we present an official book by the centre of the art which is not about the sculpture collection of the city but another collection, the mural.

The mural has already been but as a city or as a community we have never really taken them seriously. You can also see that the mural is very popular. We also have all this neighbourhood communities, schools, giving comission to children and young artists to make mural because the mural is far, let say, shorter way for kids to invite than to become aware of visual art and to introduce to the meaning of the art and to bring adult to discussing about art and education to groups in the city.

So, there is a different between the popular approach and the elitist approach. I was just mentioning the word elitist several times because I want to make sure that you could see the whole debate

about public art which 50 years ago was in the hand of, may be, five people in the city and now has become a part of the whole fabric, may be hundred or thousand of people are deciding to be what kind of art should be attributed the city.

I turn to the third question right a way about democracy issue. It has something to do with democracy. The moment you start emphasizing the public within the notion of public art. Doing something with or for the public.

We also see that there is a kind of something resignation between the artist and a certain public. Without asking an artist to make a nice piece of art and we find them as part for you to put it there. Usually, there is really a question, a civil initiative usually start with a group of people organizing themselves and they want to make a statement about environment, about the place where they live in. About social issues, about logical issues, about environmental issues or urban issues and the hire, you could say, an artist together with us and then that team we try to make something manifest. So, it seems like public art today look a lot like the If you have a newspaper you also have page for the letter people sent to the editor when they talk about their own city. In this way public art functions as well. It is a group of people making themselves visible within the city making the statement together with an artist, doing something visual and other group of the city can organise themselves as well and they can bring their own artist and own art work.

So, what we see is not a collection as an autonomous museum collection but what we see is fragment of public opinion being put into city, the public space. Does that make sense?

Penanya 4: Mely G. Tan

I think this has to do with the decision-making, you know, that's why we talking about the stake-holder. This has to do, of course, with the panitia. I think there should one more word there i.e., komersialisasi, because this is, you know, very important part.

I think this is very important for whole decision making, you know. How to, let's say, beautify the city. The decision making for that is very important and has more to say and I am afraid, you know, in many ways there is not much attention to, what we call, amdal, environmental analysis. That has to do with ecological knowledge. Quite often, the consideration has more to do with the economic financial aspect, process and may be technical and very little, you know, with the people aspect or project. What ever. I think if we talk about beautifying the city with putting in monument and something like that, then it has to do with neighbourhood. So, that is why I look at this democratic aspect. That is very important part and may I just, you know, ask you question about you said, "Art is always elitist."

I am just wondering. What about socialist art. That is, of course, political. But, they claim, of course, they are populists. They are not politised, their argument. They claim. I won't go further for that because I think this is a different aspect of art but still, you know, because you said it is always elitists, you know, I would question for that. Thank you.

Jawaban: Siebe Thissen

Of course you've got it right. I mean, especially, in the commercial globalizing world and the global village in which more spaces are becoming privatised, we could see that in Rotterdam as well. Large part of the inner centre has become privatized, even a large part of south bank of Rotterdam. But discussion now is selling apart to a national entertainment company which means what does the public factor. How do we get in there?

At first, people usually say, "Well, OK." So, arts don't need to go in there, do they. But, we want to be part of everything, also of the privatized that positive. What I think is you just have to try. That's the Rotterdam way. We always try to negotiate and to enter the construction programmes. Sometimes you fail and sometimes you succeed. But, you can always become part of it. For instance, we are now doing the whole central station area and the whole south Bank.

We just move in there. We just, "Hello we are from the art department. Can we talk? Can we move in?" sometimes we come up with good ideas and stay there and become part of it.

That is why I said I am not sure if we are successful but I think it is good to raise the debate, to bring it to the public art factor with in commercial zone to be part of it and I am not sure if it doesn't work.

But I think in Rotterdam, it is much easier because as I mentioned syna the 1960 art movement, there has been a kind of official regulation on building. You to say, "Hey, we are about to start building in this part of the city. Are you coming in. We invite you to listen and to talk with us." Of course they never do but you can use the regulation and put them in your arm and found them and say, "Hey, am I allowed to visit your meeting and to talk with you about what is going on." So, you have to do it yourself and I think if you want to be part of it I would say may be, first try to find that kind of regulation, the newly elected governor, may be, the man will open-up, something, and make it possible for people from the public art if you organized yourself to have a voice, somewhere.

I think it is the first start to have a voice somewhere. On the other hand, that is why I am mentioning the whole new genre public art movement. That is far more democratic because it only depends on several initiatives. There is nothing to do with other things and usually we see that all these commercials project in the city they give shape to new genre of public art. If you live in the community very close to the central station or to the commercial district you will feel there is something changing in your environment and you want to speak up and you want to do something and art still is because there are many artists ready to do something for the city as well. So, we see many, many, initiatives in Rotterdam artists and communities coming together and making themselves visible within the city. So you see both movement at the same time and may be the one movement feet the other movement. And of course, it is true that it's very hard for

this new genre of art, democratic movement to become part of those decision making process as in commercial sense. That's true but you can make them both visible. That's why I compared all of that in the newspaper. You can have different groups of opinion. I think it is good thing that people, civilian, get organized themselves with artists and make themselves visible in the public space.

Penanya 5: Rosihan Anwar

*There is something to care of money. A mural is a piece of a work of art. If I understand it correctly, you talked the mural nowadays and Mely has talked about **komersialisasi**, it can also be another work of art but of kitchs. How is it in Rotterdam now? In that context.*

Jawaban: Siebe Thissen

Also the same. It could be art. It could be kitchs I think. But, here the same goal for the higher art and the lower art even if you have people who have grown up it to the city movement and they make all this graphite pieces every where. I think within the graphite pieces we also have kitchs. You have kids who don't know anything about art but they, you know, have magazines at home and they want something nice. The same goes for mural you also have kids in mural. I think, the whole discussion about art or kids is not something that should be reserved for mural. It something that goes for what your art as well. You also see the painting. You also see in sculptures. I see a lot of sculptures in Rotterdam. I think wow. That's more than kids who paint it. Probably a warehouse who made it possible.

Moderator:

I would like to invite more questions and opinions.

Penanya 6: NN

In page one of your papers you said the writer such as Joost van den Vondel, artist like Rembrant and Spinoza were heralded the

champions of Dutch identity and culture. This is the legacy of the 17th century. What about before that century? You don't have any idea?

Penanya 7: Aurora Tambunan

Thank you. Dr. Thissen, I would like to ask you related to page 5 that you mention about public space as a multisensory domain and you also mention that about multimedia approach. Have you also included, like Mely asked you about the commercial decision because at this moment, with the development of information technology and development of visual graphic design, people use public space as a media for their marketing product. As you see in Jakarta or may be in another big city in the other country there is also advertisement media, very big advertisement media.

How your government deals with this kind of media because I was afraid or worried and aware that this advertisement does not see the people who are using the public space.

Jawaban: Siebe Thissen

Public art has to do something to the city. There are artist who make use commercial media within the city. For instance, if you look at Seoul in Korea. There are about 3 or 4 hundred electronic billboard in the city and each year they had film festival for artist and the film festival is on the commercial screen in between the commercial. So, you have a commercial and an artist film. So, you can also use it or in Rotterdam we have cineboard. It is a kind of film company and they give comission to young film makers and they been producing movies on the commercial buildings, next to the other commercial film. For instance, every weekend for few months we have all these artistic movies or even on the water, on the canals or entries. So, there are lots of ways of dealing with that visual overload. Is it the kind of answer?

The centre for the art is use to be part of the city council. So, more than 20 years we work part of the city council but 3 or 5 years ago Rotterdam privatises all art institutes. So, we all have become an

independent art institutes. We still have a lot of public duties as a centre for the art. So, the centre for the art uses to be a centre that arranged all art affairs within the city of Rotterdam. We still do that tree section. One is public art department. The second is the exhibition department. So, that make sure got one. Now we got two and we open the third.

Three exhibition centres where work of the Rotterdam artists can be shown and the third is the architect which is a kind of library for art works bought by us and you can lend the mark and you can be subscriber. You can come to us and borrow pieces of art by Rotterdam artist and using for one year in your house. So, we got three sections. All taking care of the promotion of the Rotterdam artists. Public art department is the people with the smallest budget but its influence is the biggest. So, we advice almost anyone in the city.

We have the same function for every, let say, esthetical artistic expression in the city we have to advice on that. So, we have a very important advice function. Even when it's with an architect if they want something extra, let say, electronic billboard, art works or we also give advice. So, a lot of work do is advising about public space, even if, let's say, a group of artists or an embassy wants to do an exhibitions in the city. We have 20 from China. They want to do an exhibition in the public space. We have to make it and advice first about them. So, we advice on almost anything public space. That's the first thing.

Penanya 8: Aurora Tambunan

Excuse me. Do you give recommendation to the city? To the city government? You are a private, right?

Jawaban: Shiebe Tissen

The city council still is having. It is a bit odd to the Rotterdam. We are privatised but the city council pays my salary.

Penanya 9: Aurora Tambunan

What I am thinking is Dewan Kesenian Jakarta. Something like that. So you have a very special relationship.

Jawaban: Shiebe Thissen

Special relationship. Yes! It's true. I think it's a bit strange relationship but it is typical Dutch, you know, little bit of market, little bit of city state. Well, I think it is good if you have department that is advising about a lot of stuff and of course the city council can use the advice. They can do what ever they want but usually they are very kin what we advice they take over that. I think. So, the advice function is very.

The second is we do commercial. We have a budget as well. Partly we have from the national government, national fund. We have to apply every four years with the program. They say "wow look, go" and we offer you some money to the commission and those commissions we use, usually, for civil initiative. So, you have to have a budget for several initiatives because you cannot take the money from the person from the art program or the city decoration for several initiatives because it's connected very much to building and construction. So, the stake holder involve are too important. We also have a program every four years to do that. We also have a program, especially made for kids, amateurs, schools and that has also a budget. That's another function I have. I try to raise as much money for public art. Whether I am successful, we have been doing well and if I am not successful in doing so we have a bad year. But, in general Rotterdam is doing pretty well also because I took for the whole public space is very important as a medium for art in Rotterdam.

The last, there are many civil initiatives in the city. That's why we have to find money else where. We cannot use the city decoration fund or the person for the art, may be. The city decoration fund is a fund for decorating the city and part of it goes to us to fund us in the international sculpture collections. The city decoration fund is also financed from building and construction program. So, if you

go, for instance, you want to new window in your home you have to go out to the city and get a permit. Is that here the same thing? And you pay 10 Euro or hundred thousand rupiah. Half of percent of that budget goes to the city decoration fund. So that is how we built the city decoration fund and part of that, 200.000 each year, goes to the international sculpture association. So, that is how we financed. So, you see that almost anything in public space is financed varied building and construction programs. We find way of dealing of making connection association with the department and to listen to other project, like civil initiatives and youngster or kids and art education. We have to be creative ourselves and find new budget to do that. And this all have to do with the public art department.

Moderator:

Thank you. We still have 20 to 35 minutes. So, I would like to invite more questions and opinions. Pak Pirous. Ada lagi? Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dibelakang barangkali? Waktu kita masih 20 menit. Silakan satu lagi. Saya harapkan ada satu penanya lagi. Pak Marko, mungkin? Atau Pak Moko, barangkali? Oke, mungkin kita mulai dengan dua penanya dulu. Nanti kalau ada waktu kita terus bisa lanjutkan sampai waktu yang diberikan oleh panitia, kira-kira 11:40-11:45. Silakan.

Penanya 10: NN

Is your city government want to make a bridge, for example or river bank, --because your is full of canal—and then your people, among artists there, like to have the bridge not only functional but also has esthetical merit. How do you propose to the government to make your ideas become true. So, the bridge has not only function but also esthetical. How do you do it? How do you propose? How do you persuade your government to do it? Budget and everything. Thank you.

Penanya 11: Herman Hidayat

Thank you moderator. As we know that Rotterdam one of the most fascinating cities in West Europe and the land, may be, 10-15% occupied by the garden. How do you recommend, Jakarta. Jakarta, currently, city garden not occupied 10%. Fauzi Bowo, while he campaign for the governor, told us just about 6% and he would like to develop over 5 years in the future almost 10% or 9%. May be, we as Jakarta inhabitant can phare ideas. Yap, most of the people are relaxed and not very arrogant or may be not very brutal.

So, how do you recommend in terms of Jakarta city, such other city in Japan. So, in many city such Fukoka or Tokyo in Chiba that a city planner almost determine 10 up 20% for the city garden. How do you recommend?

Jawaban: Shiebe Thissen

I would start with the city garden. I am not sure how to recommend and then how to do that. The only thing I can tell you that all issues of environment issues and green and more spaces to relax become very important also among Dutch artists. We see a lot of art projects dealing with them.

We see also a lot of architect's competition dealing with that. So, that could be started that you organized a conference where architect and artist asked how to deal with that and how to organize more green and more gardening this kind of structures. But again, we see in a lot of Asian cities that grew rapidly, people tend to forget the parks. We talk about how small is, in the amount of square malls and how many people be put in there so I think you nee the whole policies or what are you going to do with the region. I mean, Jakarta is not allowed, let's say, to enlarge the green park of the city. So, the question is a little too difficult for me.

We have another tradition of parks. May be you should start with, you know competition it is very interesting we have seen in the last five/six years. There are more and more artists who won use

bronze or stone or whatever in the world. They use green. They start making garden. For instance, where we do the canal in Rotterdam and artists are also among them.

A lot of artist, they don't want to put an art work there but they say to the people to do the greenery. Let us do that. We use the art money so you stay out; we are going to do that. So, they use different kind of plants, different kind of trees, and different kind of furniture to be put there. It is very interesting. So, suddenly, we see artist who made camouflage canal. Blue, white, and green flowers turn into camouflage suits canal which is really interesting because it does not look the same as it always look.

We come directly to Professor Pirous. The whole idea about aesthetic. You talk about the bridges and what we see is the artist do anything. They don't want to do sculptures anymore. Well, they still do the sculptures also but may be we have about 120 public art projects each year and of those 120 projects, may be, three or four of them are sculptures. All the other different kinds of art. Sometimes they have to do with green. Sometimes, they have to do with the bridges.

For instance, the same project, they were doing all these canal so we are in there also and in one canal we say, "Wow that is cool pedestrian bridge. Shall we design them?" Of course they say, "We always design them. If you guys start designing them that would be much too expensive." But, of course we have around budget. So we say, "We can put it in extra 50.000 or 100.000 Euro and turn it into another kind of bridge. So, we do bridges as well. We do a lot of street furniture, like bench. We do public lighting. A few streets we turn into city light sculpture city. We are using also the traditional lightening and we use that money for that street to give that specific one street with different identity with the other streets because there is a lot of people rally like in their city. They don't want their street to be the same as the other streets. They want something special. They want their street and their house be a little different from the other,

especially, in the city that tends to globalized or tends to look like other cities in the world. People think it is very important that they can add a little authenticity to their own street, to their own environment.

In that particular artist do a lot these days. They work with anything. They do social project. That is why they are also, let us say, invited by housing corporation have become one of the biggest commitment of art project. Because, all those house corporation, they don't know anymore who is living in their apartment block.

In the old days, it was nice to all Dutch people but now there are all kinds of people living there and if there are meeting then they show up. They see this in the satellite in their house and they see all these people with the phone and the computer but they don't know who they are communicating with, what kind of TV station they are watching. So, they are inviting all these artists to do project with them also to see what's going on. What are their ideas about authenticity? What is their idea about art? How can they visualize themselves within that city in the street, about being there? So, it is not only bridges. Bridges is a part if it. So, you could say that we are very opportunistic. We are trying to get involved, all kind of building processes city. It could be the canal. It could be the bridges, the green, the park, and the buses. We have done several.

There is one artist and this artist found out that in our museum district the tram did not stop. So, he uses his money just to make a tram stop. So, he built this, exactly the same as the company built and he agreed with the tram company that he want to build the tram stop there, and there is an extra stop. You can still see it as a piece of art because it is the only tramp stop that we have in Rotterdam, which not have commercial billboard. So it is an empty tram stop.

I think one of the major tasks we have been trying to get artist in all kinds of decision making program in the city. It could be big. It could be small. It could be in the neighbourhood or anywhere.

Moderator:

Well, it is a pity that the street light agency or public work agency is not coming. So, I think according to what you said this consist all the agencies of the city. Not just culture, not just the city planning, as you said. But, now the territory is getting wider.

So, I invite more questions or opinions. We still have 15 minutes to go. Ada pertanyaan tambahan atau opini? Cukup? Ok!

So, I think they already get enough in formations and would be part of decision for the next 5 or 10 years. We hope if you come again to Jakarta, you will see different Jakarta.

SESI DISKUSI KEDUA

Moderator:

Now we continue the second session. Before present the paper, I would like to introduce Bapak Sunaryo. We have two speakers this afternoon.

Mr Sunaryo is an artist. He is the lecturer of the Bandung Institute of Technology (ITB). He will present a paper on a creative interaction of the artist with the city. It is impaired to the decision maker. That is the first paper.

The second speaker is Marco Kusumawijaya. He was born at Pangkal Pinang. He is the chairman of Dewan Kesenian Jakarta. He is an architect, especially the urban space or urbanism. He is graduated from University of Parahiangan, Bandung and latter he got his master degree at the University of Leuven, Belgie in Europe. In this session, he will talk about looking at the interesting perspective, the city planning as art and culture.

Ok. I will ask Bapak Marco to present the paper in 20 or 25 minutes. Silakan Pak Marco.

Melihat Secara Integral Antara Perencanaan Kota Sebagai Seni dan Budaya

Marco Kusumawijaya (Ketua Dewan Kesenian Jakarta)

Ide-ide sipil pada ruang kota, tanpa ada pemusatan dan semuanya menampung kegiatan lokal. Tetapi, tentu saja kita tahu akhirnya Tugu Monas itu berhenti perkembangannya dengan meletakkan sebuah benda di tengah. Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan atas ruang itu. yang menjadi pusat adalah benda itu. Benda “valid” itu. Ruang tidak lagi menjadi penting kecuali untuk mendukung tugu itu sendiri dan itulah yang kita lihat. Yang kita sebut ruang terbuka 80 hektar kini kira-kira tinggal 30 % dibutuhkan untuk

mendukung kehadiran tugu itu. Jadi, ruang berguna untuk mendukung objek.

Di mana-mana, memang biasa secara sosial ruang terbuka yang besar itu selalu ada jalan silang, supaya orang mudah untuk menyeberang dari satu sudut ke sudut lain, tanpa harus memutar. Hampir semua taman di dunia, yang cukup besar, punya jalan silang. Tetapi jalan silang yang ada di sini sama sekali tidak enak buat dilewati. Tapi, hanya dibuat untuk menegaskan sentralitas dari tugu itu.

Sebaliknya, kalau kita berada di tengah-tengah, kita dapat mendengar suara yang sangat bisning dari sekelilingnya, karena apa? Karena kedataran dari ruang itu sendiri. Maka, *workshop* ini kami mengusulkan ide. Menurut saya ini mungkin sekali untuk dibangun. Mudah-mudahan Pak Rosihan anwar, Pak Taufik sudah mengenali apa ini. Tapi, nanti saya cerita.

Gagasan kami adalah menggali danau buatan di sebelah bawah dan itu memenuhi fungsi ekologis Jakarta, karena Jakarta selalu perlu tempat untuk menampung air. Tanah dari galian itu digunakan untuk membangun bukit-bukit. Dengan adanya bukit, maka akan ada lembah. Lembah-lembah itu menjadi ruang yang bisa dinikmati karena terlindung dari suara bising. Jadi, tujuan dari radikalisasi ini adalah mengembalikan sifat ruang di lapangan monas dan mendekonstruksi kesentralitasannya dan ketokohan dari tugu itu. Jadi, sepenuhnya dia menjadi ruang. Karena itu, tiba-tiba tugunya menjadi tidak relevan. Kami tidak taruh lagi tugunya.

Bukit dan lembah ini sudah ada di Indonesia. Jadi, kami hanya memindahkan peta dari sebuah kota ke atas lapangan Monas. Kota itu adalah Bukittinggi.

Jadi, ini adalah peta Bukittinggi. Yang ini adalah kota Ate (menunjuk ke peta Bukittinggi). Ini Ngarai Sihanuk. Kota gadang ini. Sebagian besar dari kota Bukittinggi bisa kita muatkan ke dalam lapangan Monas. Di kota Bukittinggi penduduknya kira-kira 15.000

jiwa dengan *biodiversity* dan *sociodiversity* yang begitu besar karena di kota Ate itu terdapat enam pasar dari tujuh pasar di Bukittinggi. Hanya satu pasar di Bukittinggi yang dibangun oleh pemerintah. Namanya, pasar grosir dan letaknya agak jauh di luar kota. Enam lainnya berada di sekeliling kota Ate ini.

Bisa dibayangkan, enggak? Lapangan Monas ada enam pasar dengan penduduk 10.000, tentu saja tidak bisa menciptakan ulang seperti itu, tapi ini adalah suatu dekonstruksi untuk menyatakan bahwa yang penting di lapangan monas adalah ruangan nyaman dan dibuat demikian, sebenarnya, dia memenuhi fungsi-fungsi ekologis.

Suatu lapangan datar kalau dibuat bukit, maka dia mempunyai permukaan yang lebih banyak dan itu berguna untuk penghijauan kota Jakarta. Ini wujud dari fisiknya secara seni rupa. Kami buat dari kayu dan kayunya itu ditukil, kemudian kami taruh di Ngarai Sihanuk itu berbagai biji-bijian.

Jadi, Monas menjadi tidak relevan. Secara berkelakar, kami bentuk dan kami tawarkan tiga tugu Monas. Ada yang modernis. Ada yang warna emas. Ada yang 60-an sedikit.

Nah, inilah peta kota Bukittinggi. Kalau di taruh di atas Monas. Tentu seluruh kotamadya Bukittinggi sebenarnya cukup besar, sampai ke ujung sana. Tetapi, penduduknya terjadi konsentrasi kalau ditaruh di lapangan Monas itu hampir muat, kira-kira 80%-nya muat, dengan penduduk 15.000.

Di Jakarta sebenarnya banyak lahan kosong, dan persoalannya lahan kosong itu akan dibangun dengan imajinasi siapa? Itu yang dulunya kami ingin jadikan perjuangan berikutnya.

Rekomendasi terakhir. Ini penting. Pada saat yang sama kita melihat munculnya ruang-ruang publik yang baru, yang disebut ruang komersialisasi. Apa itu *mall* dan sebagainya. Ini menunjukkan gairah pertumbuhan *mall* dari tahun 1965 sampai tahun 2005. Ini lokasi dengan luasnya masing-masing, yang warna kuning itu bertambah pada tahun 80/90. Bertambah lagi pada tahun 1990-2000 jumlah *mall*

yang ada di seluruh Jakarta. Tahun 2000-sekarang tambah lagi yang warna oranye. Itulah seluruh *mall* yang ada di Jakarta sekarang.

Ini adalah ruang publik yang baru, tetapi orang mendebatkan apa betul ini ruang publik atau tidak. Tetapi, kenyataannya orang-orang suka di sini. Orang mengeritik tetapi orang suka.

Saya ingat suatu ketika Prof. Otto Sumarwoto cerita penting sekali bersepeda itu. Mahasiswa yang hadir semuanya bertepuk tangan. Setuju! Tiba-tiba Pak Iwan Abdurahman bicara, “Ya itu bagus sekali Anda bertepuk tangan. Tapi, apa ada yang naik sepeda?” tidak ada satu orang pun.

Jadi, kita sering mengeritik *mall* tapi semua orang pergi ke *mall*. Lalu, semua orang mengeluh kita kekurangan ruang terbuka hijau. Tapi pertanyaanya, apa kita sudah pernah pergi ke ruang terbuka yang sudah ada? Percayalah, jawabannya hampir semua tidak.

Ini adalah hasil riset dari teman-teman di Universitas Tarumanegara. Lokasi dan ukuran *mall*. Jadi, mereka riset betul dengan gejala ini. Bagaimana gejala ini selalu membebani infrastruktur kota, tapi pada saat yang sama juga mulai kelebihan pasokan. Jadi, sudah ada *mall* yang tutup. Misalnya di Senayan, di Jalan Sudirman. Tetapi, meskipun sudah tutup, tetap dibangun terus karena ada uang yang gampang beredar.

Akhirnya saya mau menutup dengan mengambil contoh kota Berlin. Ini adalah Berlin. Balai Kota Berlin itu punya peta dan maket kota Berlin sebesar ini. Itu orang yang sebelah kiri itu. Sampai detil begitu. Ini, kalau tidak salah, skala satu seribu. Orang bisa menunjuk di mana letak bangunan itu. Jadi, maketnya yang dibagian bawah itu mendarat. Kemudian, ada maket yang vertikal dan orang bisa menunjuk. Semua bangunan ini *real*. Sebagai mana apa adanya dan yang warnanya putih ini sedang dibangun. orang bisa memperdebatkannya dan bertanya. Jadi, tidak ada rahasia. Semua orang bisa lihat. Mungkin ini suatu yang baik untuk Jakarta. Mudah-

mudahan Jakarta akan punya peta besar ini. Tahun depan bikin ya. Jadi, kita bisa tunjukkan dan diskusikan.

Ini yang barangkali secara klasik, kita sebut *public art*, yang berada di ruang terbuka, di tengah kota. Tapi, *slide-slide* saya yang pertama mau mengatakan kesenian yang bersifat temporer, apakah itu kesenian, tapi yang jelas itu adalah ekspresi budaya. Entah itu seni atau tidak dan menurut saya itu juga berhak berada di ruang kota, tetapi justru tersingkir hanya karena kekhawatiran kepada kemacetan, kekhawatiran kepada kekacauan, dan lain sebagainya. Di mana-mana ekspresi budaya itu tidak ada yang tertib 100%. Budaya itu selalu *relax*.

Inilah penutupnya. Mudah-mudahan dua menit cukup. Akhirnya ini dunia dibuat senang dengan pendapat bahwa seni itu penting bagi ekonomi negara, melalui kota. Saya rasa Pak Gubernur terpilih dalam diskusi minggu lalu mengatakan demikian. Juga karena membaca edisi terakhir dari buku *Eropa State*. Industri kreatif, suatu sektor yang seolah-olah telah ditemukan oleh Tony Blair telah menyelamatkan industri ekonomi Inggris sejak dilangsir delapan tahun yang lalu. Tetapi, di Indonesia, tanpa kehati-hatian yang cukup sedang terlanjur digunakan kata *industri budaya* yang seketika akan membuat kita ingat akan tulisan lama Adorno dan Horkheimer, *culture industri must in the arive of Aufklarung* atau *culture industry must described as enlightenment.* *The fusion of the culture and entertainment that is taking place today leads not only to deprivation of culture but inevitably also turn interactualisation of amusement.* **Ini ditulis oleh Adorno pada tahun 1944.** *The idolisation of the chief involves making the average the heroic. The highest pet stall disables picture advertising unspecified proprietary articles. Not without good purpose. Are they often selected from house of commercial modals? The prevailing face takes it idea from advertising the beauty and consumption. Hence, the Socratic saying that the beautiful is the useful has now been fulfilling, ironically. Even today, the culture industry traces work of art, like political slogan and for system upon*

the resistant public reduces price. They are as accessible for public enjoyment as a part.

Jadi, bagaimana? Industri kultur, menurut saya kita harus hati-hati, karena di Eropa sendiri menimbulkan banyak sekali masalah. Tadi pagi juga Pak Thissen ngobrol dengan saya mengatakan, “*culture policy* yang di Eropa sebenarnya punya sejarah panjang dan luas kini makin sempit, menjadi sekedar kebijakan industri kreatif”. Kalau tidak hati-hati, kita akan mengalami itu.

Ini majalah yang di bawa pak gubernur terpilih minggu lalu, tentang tata kota tua seperti Dublin yang berkembang. Kebetulan saya bulan lalu ke Dublin. Memang benar, tapi mereka tumbuh dengan industri kreatif, tapi juga dengan industri IT yang sudah sangat kuat. Masalah-masalah baru kita hadapi dari slide-slide yang tadi, pada dasarnya kita perlu kebijakan atas suatu budaya visual di kota, karena bidang-bidang yang banyak itu sekarang digunakan oleh siapa saja. Apakah tidak perlu ada suatu kebijakan yang jelas tentang hal itu? Siapa yang sebenarnya berhak menggunakan bidang publik itu? Ada permukaan-permukaan baru, di samping ruang-ruang baru, juga seperti mall. Kemudian, kita punya persoalan dalam hal ekspor seni kita ke luar negeri berhadapan dengan impor seni. Misalnya, seni Cina yang sekarang, sangat agresif, masuk ke Indonesia.

Saya pikir, kita perlu punya suatu strategi yang sinergis antar berbagai unit yang bukan uang yang berkepentingan dengan kesenian dan kebudayaan di kota Jakarta. Misalnya, mudah-mudahan, nanti ada deputi gubernur yang mengurus kesenian dan kebudayaan. Ada Dinas Tata Kota, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, dll. Dan, jangan lupa, kota ini sebenarnya sudah tumbuh berbagai festival dari dirinya sendiri. Ada Jifest.

Saya ingin melaporkan bahwa Jifest itu tahun lalu tidak ada sama sekali dana dari pemerintah. Tahun sebelumnya ada. Dengan dana sekitar 5 milyar bisa mendatangkan penonton 63.000. Bayangkan dengan Bangkok Film Festival, biayanya 5 juta dollar,

tapi hanya mendatangkan 23.000 penonton. Karena itu, Jifest sekarang masuk dalam peta dunia. Singapore Film Festival lewat, Maila Film Festival tidak dihitung, Bangkok dihitung tapi dengan biaya sepuluh kali lipat dan pengunjungnya tidak sampai separuh.

Ini sebetulnya adalah suatu potensi yang harus kita sinergikan sebetulnya dan perlu ada suatu strategi yang sangat jelas. Misalnya, kota Singapura dan Dublin itu mempunyai *policy* dan strategi. Singapura sangat aktif, dan bahkan agresif untuk mendatangkan bakat-bakat. Banyak sekali orang Indonesia diundang. Tentu kita senang diundang, tapi kita juga harus berpikir bagaimana kita juga bisa mendukung para seniman kita melakukan produksi. Saya sendiri adalah penasihat Nanyang Accademy of Fine Art sekarang.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jadi, secara ringkas sebenarnya saya mau mengatakan, “Ruang publik itu bagi kita masih bermasalah. Ada perkembangan-perkembangan baru yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan kita perlu berunding untuk memutuskan apa yang boleh dan apa yang tidak di dalam ruang publik. Lalu, saya tahu kita pasti sudah tahu tentang yang disebut *public art* dalam pengertian yang klasik. Tapi, saya mau mengatakan peristiwa-peristiwa ekspresi kebudayaan adalah juga layak hadir dalam ruang-ruang terbuka kita dan itu mestinya difasilitasi bukan di anulir. Kemudian, seni bukan hanya berperan pada ekspresi budaya, sebagai keindahan saja, tetapi seni juga mempunyai fungsi ekonomis yang memerlukan strategi bersama dalam persaingan kita. Terima kasih

Moderator:

Tadi pagi, kita sudah melihat bahwa Pak Thissen juga sudah menjelaskan bagaimana kota-kota di Eropa, terutama di Rotterdam. Pada umumnya kita melihat bahwa Eropa itu hampir mirip-mirip. Ada *Hall*. Ada Gereja. Ada dom. Tipologinya mirip-mirip. Untuk Jakarta, ini cukup menarik. Tadi Bapak-bapak/Ibu-ibu sekalian bisa melihat secara langsung bahwa dari perspektif historis memang dari awalnya sudah sangat dinamis sekali. Tetapi persoalannya adalah

bagaimana dengan pemerintahan DKI ?. Untuk melihat itu, kita pergi ke museum di Singapura, kita bisa melihat perkembangan kota Singapura sampai tahun 2025. Bayangkan itu! Mungkinkah kita di Jakarta mempunyai semacam maket seperti itu. Memantau dan mengantisipasi perkembangan sampai 20 atau 50 tahun ke depan. Menarik sekali.

Mungkin nanti, Bapak/Ibu sudah tidak sabar lagi akan mengajukan pertanyaan terhadap suatu gambar-gambar yang kontroversial ?. Tapi, sebelum itu saya berikan kepada Bapak Sunaryo untuk mempresentasikan makalahnya sekitar 20 menit. Silakan .

Monumen Urban: Seni di Ruang Publik

Sunaryo (Dosen Institut Teknologi Bandung)

Selamat siang, *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Untuk Pak Marco, saya ucapkan selamat yang pada jam segini, biasanya ngantuk karena habis makan, saya jadi tergugah dibawa ke ruang imajiner. Saya bangga ada insan muda yang melihat jauh ke depan. Padahal kita melihat di belakang itu segala carut-marut yang sangat mendasar itu, kadang-kadang membuat kita *discourage*.

Tadi pagi saya mendengar pembicara tamu yang berbicara tentang masalah hal-hal yang terjadi di negara maju, yang infrastrukturnya sudah baik. Kemudian Pak Marco banyak mengulas Jakarta. Kelihatannya berkesinambungan tentang ruang publik dan saya sebagai penggiat seni, seni rupa, barangkali hanya menambahi dengan pengalaman-pengalaman bagaimana melaksanakan pekerjaan yang sifatnya pesanan. Tentunya pesanan baik dari satu *corporate*, maupun dari pemerintah.

Tapi sebelum bicara masalah itu, barangkali untuk memahami cara berpikir saya, saya mencoba untuk memperlihatkan satu skema/diagram yang barangkali membantu untuk mengetahuinya.

Yang bulat di sana merupakan tulisan Penghayatan Lingkungan dan Kemampuan Artistik. Jadi, siapa saja, manusia yang dilingkarkan itu adalah manusia-manusia yang mempunyai sifat kreatif, mempunyai kemampuan artistik. Apakah itu arsitek. Apakah itu seni rupa atautakah para disainer. Kemudian, di dalam memproduksi bisa dengan tujuan sosial. Misalnya, di sana membuat suatu kursi. Arsitek membuat rumah. Di sini ada suatu hal yang sangat utama, yaitu fungsi fisik harus tercapai dengan baik.

Namun, apakah para *designer, planner*, kalau fungsi fisik itu bisa tercapai dengan baik dan tentu saja pengalaman mereka di dalam rentang waktu, dimana dia juga sebagai bagian dari masyarakat, dia mempunyai kepekaan sosial. Seperti tadi dikemukakan Pak Marco. Dia mempunyai suatu imajinasi. Dia tidak hanya membuat sesuatu yang fisik saja, tetapi dia mempunyai sesuatu yang semacam *enlightenment*. Coba siapa yang tidak terkejut: Bukittinggi di atas Monas. Ini suatu yang menggugah.

Di sisi lain, di sana seandainya produksi itu lebih ke personal, yaitu kayak seniman. Di sana yang akan diangkat, yang paling utama adalah nilai-nilai: nilai religiusitas, nilai gagasan, atau politis. Nilai-nilai yang dibawa itu bisa kita ambil, katakan suatu *value*. Tapi, kalau di dalam visualisasinya itu baik dia akan *diappreciate* oleh masyarakat. “*Wah* karya ini bagus untuk museum. Karya ini bagus dipasang di kantor. Karya ini bagus untuk investasi.” Jadi, punya nilai sosial juga.

Sebetulnya saya ingin sedikit, bukan memisahkan *ya*, penekanannya yang mempunyai suatu alur yang mana yang dulu. Jadi, yang ke sosial kalau dia sensitif akan muncul nilai. Seniman yang membuat suatu nilai, kalau memang berhasil, dia berguna untuk masyarakat. Jadi, hanya prioritas atau mana yang duluan.

Di tengah itu yang saya katakan monumentalis. Seni monumental, kedua aspek itu sangat saling mengisi. Misalnya, seorang monumentalis yang selalu didikte, dia titiknya akan ke atas. Kalau seorang monumentalis yang diberi banyak kebebasan, dia akan

ke arah sebaliknya. Misalnya, seorang seniman. “Coba Anda membuat patung Keluarga Berencana.” Kalau seorang seniman itu hanya cara berpikirnya seperti opini publik, di mana keluarga mempunyai anak dua. Langsung dia membuat bapak, ibu, anak dua. Itu sesuai dengan slogan, maka saya tempatkan agak ke sana.

Saya pernah sampai di Ambon. Tugu Selamat Datangnya seperti Monas. Jadi, seolah-olah ini milik Indonesia. Jadi, sebagai suatu *landmark*. Kebetulan saya baca di TOR, tor yang diberikan panitia, mengkritik patung Arjunawiwaha. Memang Monas dengan suatu monumentalitasnya, sehingga sekitar Monas itu mempunyai suatu aura nasionalisme. Ada patung IKADA, Diponegoro kemudian, Chairil Anwar. Tiba-tiba, ada patung Arsena yang sangat dekat. Itu kan legenda yang selayaknya di Taman Mini, misalnya. Suatu saat saya jalan sama orang Jepang pada waktu hampir 17-an. Kaget. “Wah Luar biasa membuat proklamasi seserius ini”. Waktu itu sudah mau dibuka. Saya mengangguk-angguk saja. Sebetulnya bukan untuk 17-an.

Itu sebenarnya gambaran yang jelas bahwa harus ada semacam *master plan*. Seperti tamu pertama itu sebagai direktur dari *public art*. Di sini nampaknya harus ada suatu panitia khusus yang benar-benar bekerja keras untuk membuat *master plan*, untuk hal yang sifatnya *moment urban*.

Waktu itu Monas juga dibangun dengan keringat. Saya ingat perangko-perangko yang oleh Soekarno disebut sekian persen untuk pembangunan Monas. Soekarno waktu itu dengan nasionalisme yang sangat tinggi ingin membangun karakter bangsa Indonesia. Membangun karakter bangsa Indonesia dengan seni rupanya.

Kemudian, ada suatu *public art* seni monumental yang sifatnya lebih ke ruang, menggarap ruang lebih ke estetik. Misalnya, patung yang terlihat di sini, patung Rina Widagdo. Ini terbuat dari *stainless* di Slipi. Tapi, anehnya suatu saat sudah tidak ada, diganti dengan jalan layang. Waktu saya tanya, rupanya harus dipindahkan. Senimannya juga sedang mencari tempat lagi. Di mana lebih baik,

begitu. Rupanya, tidak terjadi suatu kesepakatan, dan senimannya tidak tahu ke mana disimpannya. Akhirnya, suatu saat diundang untuk di laksanakan, tapi dilihat patungnya sudah berkarat dan sangat rusak, karena dibongkar oleh kontraktor yang tidak tahu. Di sini gambaran bahwa mungkin kalau ada patung Gatot Subroto tidak berani di bongkar. Tapi yang sifatnya estetik ini mudah saja dibongkar. “O ini abstrak. *Gak* jelas.”

Tadi Pak Marco mengatakan saya sebulan di Singapura. Memang sebulan itu kalau tidak banyak kerja, kesempatan *refresing* saya jalan ke Singapura. Saya jarang sekali menemukan monumen-monumen. Apakah karena sempit, tapi pembangunan terus. Beberapa tahun yang lalu saya masuk ke sudut jalan. Itu pemandangannya bagus. Ada gedung-gedung. Ada taman. Sekarang di pojok jalan sudah terbangun bangunan. Tapi bangunannya begitu tinggi sehingga untuk ke lantai satu itu pakai *lift*. Tetapi, dengan kolam-kolam itu, pemandangan itu masih transparan. Jadi, tata ruangnya masih terjaga.

Kemudian, baru kita tinggalkan beberapa bulan, kembali misalnya. Belakang HI sekarang begitu mampat. Luar biasa di sana, ya Pak Marco? Itu tempat yang sangat *prestigious* untuk Jakarta. Sekarang sangat memalukan. Bangunan begitu padat. Karakternya tidak jelas. Bahan-bahannya juga saling bersaing. Jadi, mundur kita.

Ini patung Rita Widagdo yang menyelesaikan ruang dengan baik membuat citra optimis, juga sebagai *landmark*. Ini kalau tidak salah di Kelapa Gading. Tentunya yang namanya abstrak itu bukan tiba-tiba datang dari langit, tetapi harus ada suatu ide. Idenya saya tidak pernah ngobrol dengan senimannya. Melihat judulnya dan melihat secara visual selintas, tidak jauh dengan mengambil unsur kelapa, sifat-sifat pohon kelapa. Ini juga hampir sama. Semacam sifat-sifat daun kelapa, janur, yang kita jalin untuk bikin ketupat atau tropis.

Habis ini saya cerita pengalaman yang barangkali bisa diambil hikmahnya. Suatu saat saya diundang oleh Ibu Tien untuk membuat patung Kesetiakawanan Sosial. *Nah*, saya bingung

merenung. Kesetiakawanan yang bagaimana? Secara umum saya merasakan bahwa saat itu sering terjadi tauran, konflik. Jadi, tidak ada kesetiakawanan sosial waktu itu, sehingga tolong bikin patung Kesetiakawanan Sosial. Saya kalau melihat cara berpikir itu, mudah. Besok bisa ada ide. Tetapi, ini bukan untuk menjawab hari ini, tetapi untuk menjawab hari depan. Untuk itu saya berpikir kenapa harus setia kawan? Saya ingat kita dijajah bisa setia kawan melawan penjajah. Kesetiakawanan bisa kalau ada suatu lawan dari luar. Akhirnya, saya terpikir kita mungkin di dunia bersatu kalau planet lain akan menyerang, kira-kira itu. Akhirnya, dari luar saya ambil semacam angin. Jadi, kain yang terdorong oleh angin. Kemudian, kesetiakawanan untuk apa? Bisa membantu orang kepada kehidupan/martabat yang lebih baik. Maka, saya membuat patung sesuatu yang bertangga dengan kain yang tertiuip. Di sini saya *dihabisin*. “Ini seniman bikin patung kok bikin tangga begini”. “Bu, ini ingin menaikkan martabat. Hanya simbol saja.” “Tapi ini dari mana?”. Bahasanya berbeda. Jadi, saya diam saja. Terus, akhirnya bikin lagi. “Bikin lagi tetapi tidak usah pakai tangga-tangga begitu.”. Konsep yang kedua, tapi di sana bahwa yang depan itu menarik orang yang dibelakang. Kain masih ada.

Akhirnya, waktu itu. “Umurmu berapa? Tahun 47 anda baru berumur 4 tahun. *Enggak* tahu kalau di sana pejuang-pejuang kalau haus orang *ngasih* minum. Kemudian, kalau luka ada yang *merban*.” Kalau begitu saya disuruh membuat ilustrasi. Terus, saya juga tidak berani jawab setelah sadar kalau beliau itu Ibu Presiden. Akhirnya, menteri-menteri berbisik-bisik, “Udah ganti saja.” Kalau mau ganti *ya* ganti. Kemudian, waktu saya keluar, saya dimarahi almarhum Ibu Menteri Sosial “Ini kemauan ibu *gak tau? Gak* bisa?”. “Bu kalau saya seperti itu, seperti tahun 65. saya ingin menyelamatkan ibu bahwa ibu bukan komunis pada waktu itu. Tidak marxis.”

Terus, saya pulang ke Bandung. Tidak bisa tidur. Akhirnya, saya mengadu ke Rektor bahwa saya kelihatannya tidak sanggup. Tapi rupanya ITB itu menara gading. Coba diakomodir. Makin berat. Akhirnya, saya tidak bisa berpikir. Ada satu yang membuat saya *oke*.

Kalau begitu yang dimaksud Ibu Tien itu sangat pragmatis. Saya akan membuat ilustrasi, di mana tahun 47 itu orang pakai kostumnya begini. Jadi, kalau anak-anak kecil tanya kita jawab, “Zaman dulu begini pakaiannya.” Karena untuk menggambarkan kesetiakawanan sosial lebih mirip orang bubar pasar.

Waktu saya membuat ini. “*Nah*, ini.” Saya diam saja. Akhirnya, dilaksanakan seperti ini. Akhirnya, saya membuat satu. Tapi itu pun saya coba membuat bendera yang dibesarkan untuk *unity*. Jadi, secara seni rupa saya garap *unity* untuk membuat tekstur yang kasar, juga tidak berani karena pasti dimentahkan. Sehingga, dalam biografi saya catatan pribadi tidak saya tulis. Pernah saya tulis. Saya pameran patung ide Ibu Tien. Jadi, saya cuci tangan. Untung tempatnya Shiebe tidak tahu. Jadi, saya tidak malu. Tempatnya di Senen, Gelanggang Remaja.

Jadi kalau melihat pembicara pertama, patung harus dipikirkan, ditempatkan. Tapi, bagaimana patung supaya ditempatkan tidak di tempat kumuh. Ini suatu ide yang baru. Kebetulan saya banyak membuat monumen-monumen yang sifatnya nasional. Yang lain itu biasanya saya menang kompetisi. Misalnya Yogya Kembali. Ceritanya juga panjang. Suatu saat saya sedang membuat relief, asisten saya mengatakan, “Pak di Yogya Kembali.” Saya enggak mendengarkan. “O iya. Silakan.” Lagi iseng-iseng. “Di mana?” “Di Seni Sono”. Seni Sono itu di depan Kraton sebelah kiri. Di sini sudah ada Sebelas Maret. “Betul?” . “Iya.” “Coba kamu ke Yogya. Lihat sudah sampai di mana.” Dia datang. Kelihatannya senimannya sudah ditunjuk. “Panitinya siapa?” “Hamengkubuwono.” Ini nama panitia pelaksanaanya. Ada namanya Pak Marsudi tinggal di Jakarta.

Kemudian saya datang ke Yogya. “Pak saya dengar mau ada patung monumen Yogya Kembali.” “Iya. Kenapa?” “Anda siapa?. Dari mana?”. “Saya mengajar di ITB. Karena mendengar ini, saya hanya *concern* saja. Saya melihat monumen itu ada di Seni Sono. Kalau melihatnya, kelihatannya ini ada satu keinginan besar, monumental, tapi yang *huge*, begitu.”. Saya melihat di Yogya ada

satu akses yang “sakral”. Ada satu yang disakralkan antara Yogya dengan Tugu: Tugu dengan Merapi. Itu satu akses yang dibalik. Ini dilihat dari mulai zaman Hamengkubuwono I. Itu ide dari Inggris juga. Kalau bisa Keraton, Tugu, *somewhere* di sini, sebelum Merapi. “*Wah, enggak bisa itu.*” “*Enggak.* Saya hanya ingin menyampaikan.

Kedua, lahannya yang besar karena monumen itu tidak untuk 50 tahun, 100 tahun. Tapi, kalau bisa lebih. Ketiga, kalau kompetisi nasional, jurinya nasional, hadiahnya yang besar supaya tertarik. Jangan tanggung-tanggung. Akhirnya. “Saya tidak janji. Saya tidak bisa.” “Saya hanya memberi masukan. Tolong sampaikan kepada Sri Sultan.”

Kira-kira dua minggu saya ditelepon. *Wah*, sudah dapat lahan lima hektar. Kemudian kita lagi membentuk panitia. Jurinya siapa? Saya sebut nama Proffesor dari Jakarta yang nasional. Kemudian, sudah selesai. Kemudian mendengar ada suatu pengumuman yang secara nasional. “Pak saya boleh ikut?”. “O ya, boleh.” Waktu saya waktu itu agak sempit. Kemudian, saya menyusun maketnya hanya dari karton. Tapi, sebelum waktu *finishing*. Saya bertanya, “Pemenangnya itu bagaimana?”. “Baca pasal 10. pemenangnya akan menjadi sebagai direksi.”

Karena di dalam proses pembuatan patung itu, saya orientasi dengan seorang mahasiswa senior. Waktu orientasi pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian, dari situ terjadi diskusi bahan apa. Arsitek mengatakan *stainless steel*. “*Stainless steel* itu bukan orang Jawa, “saya bilang. Kalau dilihat di sana ada Borobudur. Di sini ada Prambanan. Kayaknya, saya tidak berani kalau tidak batu, begitu.”. “Wah, tapi itu kuno. Bisa tidak batu, tapi mencerminkan modern?”. “Yang diagonal. Akhirnya, kita munculkan batu diagonal. Idenya apa? Saya berpikir di sana itu, gunung sangat dekat. Karena gunung itu mendekatkan antara bumi dan langit yang ujung-ujungnya harmoni. Ada tumpeng. Ada di laut itu juga, larung. Jadi tumpeng itu sangat dekat. Tapi, temanya itu Yogya Kembali. Yogya Kembali itu suatu kemerdekaan. Merdeka itu dari sesuatu yang tidak merdeka

menjadi merdeka. Dua sisi ini ada sesuatu yang dilewati. Saya teringat pintu seperti di Paris. Ini gunung yang ngasih pintu. Saya belah. Kemudian, ini ada bagian kosong. Hujan. Nanti teknologi dengan kaca bisa diatasi. Tangan kiri saya beri relief yang satu jodoh. Yang satu tangan menulis. Itu kelihatannya keahlian Pak Rosihan Anwar. Diplomasi, Berbicara, Meyakinkan Orang. Secara internasional ini ada Indonesia. Yang sebelahnyanya, ini bambu runcing menggambarkan perjuangan fisik. Perjuangan fisik sebelahnyanya perjuangan diplomasi.

Di dalam presentasi, saya hanya mengatakan sampai di sini, tapi di dalam saya. Untuk anak cucu saya, saya mengatakan bahwa yang diplomasi itu Soekarno, yang fisik adalah Soeharto. Di dalam. Mungkin enggak sampai karena enggak diungkap. *Nah* itu, pertanggung jawaban saya untuk anak cucu. Tapi, sekarang kalau diungkap *enggak* terjadi monumen ini.

Akhirnya, terbelah begitu dengan diagonal karena kelihatan kaku, saya membuat suatu tapak yang agak organik. Sebetulnya, asalnya itu peta kota Yogya dan itu sebetulnya agak sedikit miring dari aksis, karena ada suatu jalan layang. Sehingga, jalan layang baru belok ke kiri.

Pada saat itu juga di Jawa Barat ada kompetisi monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Di Jawa, Yogya itu lebih sentral, maka saya berani membuat satu gunung. Tapi, kalau Jawa Barat saya melihat sesuatu yang plural. Ada Sunda Banten, Sunda Cianjur, Sunda Garut. Itu berbeda-beda. Sangat plural. Maka, kehidupan alam ini bambu. Saya ambil bambu itu tumbuhnya tidak tunggal, sangat beragam. Saya dapat ide dari bambu. Kemudian, dari mulai Gedung Sate kemudian monumen itu terus Tangkuban Perahu. Sebetulnya kemenangan kompetisi ini, saya dompleng yang dikatakan Pak Marco itu.

Bandung dengan aksisnya kembali ke alam. Thomas juga diperintahkan oleh pemerintah Belanda ke sini. Beliau juga

melakukan studi di kota Paris, di mana ada suatu pengembalian aksis ke alam. Jadi, kembali ke aksis ke alam itu sendiri.

Ini ekspresi bambu keluar. Waktu mau kompetisi, arsitek tanya ini idenya apa, bambu begini. Jangan bambu *dong*. Terus kemudian saya mengundang penulis yang mengatakan bahwa ini ekspresi bambu. Ujungnya juga perjuangan. Ada suatu perjuangan yang unik di Indonesia, bambu runcing. Itukan perlu diabadikan. Akhirnya, tidak usah ditulis bambu. Saya dalam hati, “*Ya* silakan. Pokoknya saya sudah membuat bambu.” Kemudian waktu pengumuman menang, diumumkan oleh wakil gubernur. Ini menang karena dari jauh langsung terlihat ekspresi bambu. Padahal, saya tidak tahu sama sekali. Jadi, saya merasa senang bahwa terbaca oleh orang lain. Bambu dari mulai hari lahir dengan bambu. Sunat bambu. Kemudian, jodok bambu. Musik bambu: sluring, angklung, tarling. Koentjaraningrat mengatakan bahwa masyarakat Sunda untuk membuat suatu komunitas, pertama kali yang ditanam bambu. Untuk proteksi binatang, juga untuk *ciduk*. Misalnya, untuk bikin talang air. Untuk segalanya. Jadi, lebih alami.

Ini cerita tentang mimpi saya tercapai. Idola saya Soedirman dan Soekarno. Waktu saya diminta untuk membuat patung Soedirman, sebetulnya ada teman yang bilang katanya gubernur mau bikin tujuh tokoh yang akan dilombakan. Tokoh-tokoh yang sesuai dengan nama jalan. Jadi, mengecilkan arti patung itu menjadi satu seni untuk jalan. Saya *enggak* setuju. Tapi, dia mengatakan ada satu contoh Soedirman. Tidak dilombakan tapi saya ditunjuk waktu itu. *Wah*, ini idola saya. Tempatnya di mana? Sulit itu, *ya*. Akhirnya, waktu rapat-rapat “kenapa tempatnya di sini? Ini tidak cocok. Harus di jalan Soedirman. Akhirnya bingung juga saya, antara *kepingin* membuat sosok Soedirman tetapi juga merasa tidak *sreg*. Akhirnya, ada teman saya dari DKI, Insinyur Danisworo. “*Wis*, ini sudah *given*. Daripada nanti salah tunjuk. Dari situ *ok lah*.”

Akhirnya, saya bikin maket dengan *planning* jalan itu dilebarkan, kemudian proporsinya tidak bisa terlalu besar. Soedirman

itu orangnya sederhana. Kemudian, waktu saya sudah “*Oke lah*. saya coba”. Akhirnya bertemu dengan pihak militer “Soedirman yang pakai kuda”. Macam-macam. Akhirnya saya membuat maket yang pakai jubah. Saya katakan bahwa, ”Di sini tempatnya itu harus sangat tinggi. Saya tidak ingin bertentangan. Orang melihat detil. Di situ nanti mengganggu lalu lintas. Harus dilihat dari jauh.” Kebetulan Soedirman memakai jubah. Selain itu, saya memilih *simplicity*, juga menyimbolkan kesederhanaan dan untuk anak cucu, satu-satunya jenderal yang pakai mantel, yang pakai ikat kepala khas Indonesia dan meninggal karena paru-parunya sebelah. Waktu saya mematahkan ide naik kuda, saya mengatakan bahwa Soedirman yang naik kuda itu baru satu kali, waktu 17 Agustus 1949. Jadi, tidak bisa dengan bahasa rupa.

Buat saya dengan tempat yang masih ganjelan. Kemudian, kemarin sebelum ke sini ada wartawan *interview* masalah Soekarno. “Apakah tidak takut nanti jadi *guyonan* Naga Bonar?” Wah, saya lihat film Naga Bonar itu justru saya selamat pada Dedi Mizwar. Dia peka. Dia menghargai patung saya. Karena dia peka bahwa tempat di situ menjadi *eye catching*. Itu tempat yang *prestige*, yang bisa didengar oleh pengatur negara karena yang dibicarakan oleh Naga Bonar adalah tentang korupsi. Jadi, sama saja dengan di HI. Orang memilih di HI itu *kan* air mancurnya yang salah, tetapi pendemnya itu dari situ menjadi mudah perhatian orang.

Ini patung Soekarno-Hatta. Ini juga yang baru saya selesaikan. Ini prosesnya juga panjang, satu tahun lebih. Soekarno sebagai idola saya sejak dari kecil. Saya waktu kecil, kelas dua, pernah merengsek dibuatkan baju Soekarno dan terlaksana. Kemudian, waktu zaman Pak Pirus saya diberi tempat sebagai *project officer* untuk makam Soekarno, di Blitar. Beberapa tahun kemudian, belum lama ini, saya diberi tempat untuk menceritakan Soekarno dari lahir sampai meninggal dalam relief perunggu panjang 40 meter. Kemudian, tiba-tiba dari Angkasa Pura minta supaya saya ikut kontes untuk Soekarno-Hatta, maka saya buat dengan serius. Barangkali ini adalah perjalanan untuk Soekarno.

Waktu itu idenya di depan *gate* Bali, karena di sana tempatnya terbuka sekali sehingga kalau patung itu di depan *gate* itu *nebeng* dengan *gate* Bali. Jadi, Soekarno dengan *gate* Bali itu ada satu bentuk, sehingga ada suatu titik yang mempunyai aura monumental. Tetapi, dalam pelaksanaan, rupanya, di titik itu pas perbatasan antara DKI dan Banten. Seandainya saya pasang di situ, yang memelihara patung itu tidak ada, karena menurut DKI ini yang punya Angkasa Pura. Angkasa Pura mengatakan yang punya tanahnya Banten, dari pada disebut begitu, akhirnya orang Angkasa Pura tanya, “Selain di situ, di mana?”

Jadi, banyak hal-hal yang sifatnya administratif yang sebetulnya bisa, saya yakin bisa dengan satu surat keputusan yang lebih tinggi. Karena ini bukan milik Angkasa Pura, sudah milik nasional. Akhirnya, saya memilih, karena tidak jauh dari itu adalah persimpangan yang mau masuk ke Sheraton, yang masa depan akan menjadi perempatan. Dan waktu menentukan tingginya, saya tidak bisa lebih dari itu, karena bagaimanapun proporsi itu dibuat seminimal mungkin biayanya.

Situasi zaman sekarang terlalu arogan kalau membuat sesuatu yang *over*. Jadi, yang lebih kecil dari itu patung itu tidak bunyi. Lebih besar juga terlalu sombong. Kemudian, waktu menghadap ada yang mengkritik, “Patung kok membelakangi orang yang datang dari *airport*. Seharusnya selamat datang.” Interview juga menyangkut itu. Saya katakan, “Soekarno kalau menghadap *airport* itu mengecilkan arti Soekarno. Soekarno sebagai *greeter* saja. *Greeter* tamu. Soekarno lebih mencintai rakyatnya. Karena *airport* itu akan menjadi besar dalam globalisasi pintu keluar masuk dia ingin membekali spirit nasionalisme, maka menghadap ke rakyat.

Kesimpulannya, bahwa seniman itu bagaimana caranya bisa berjuang untuk memberi suatu arahan sehingga seniman itu tidak didikte. Karena seniman itu bukan tukang. Ada Ide. Ide itu tidak kaku, karena jalan pikiran saya adalah bahwa seorang monumentalisme itu harus sadar ini untuk publik, masyarakat. Terima kasih

Moderator:

Mari kita berikan *applause* buat Pak Soenaryo. Sekarang giliran buat Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan atau komentar. Kita masih mempunyai waktu 30 menit atau 20 menit lagi. Silakan.

Komentar: Widyatmoko

Terima kasih. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Widyatmoko dari Dinas Tata Kota. Baru tujuh bulan ini saya menjadi kepala dinas tata kota. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya senang berada di tengah Bapak/Ibu sekalian dan mohon kiranya pertemuan yang baik ini tidak hanya selesai sampai di sini. Mari kita sama-sama membuat Jakarta lebih baik dengan menampilkan, katakanlah, apresiasi para seniman di ruang publik itu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

Pertama, sekarang ada UU No.26 tahun 2007 tentang Tata Ruang. Ini agak berbeda dengan UU tata ruang terdahulu No. 24. Kalau dulu dinyatakan bahwa komposisi hijau publik itu 10%. Undang-undang ini berlaku secara nasional. Sedang di kita, maksud kami, dulu undang-undang ini 20% hijau publik dan 20% hijau ini ditiptikan di ruang-ruang privat, katakanlah yang dikuasai oleh masyarakat. Tapi, UU 26 yang baru itu dibalik 20% dan 10% publik. Artinya, apa? Bahwa Jakarta ini kalau itu berlaku memberati Jakarta, memberati luas lahan terbuka hijau. Kira-kira ada tujuh/delapan kali Monas yang ada sekarang. Jadi, Monas itu harus beberapa tempat. Ini tentunya sesuatu yang mungkin rada sulit direalisasi karena keterbatasan anggaran, salah satunya.

Tapi, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kalau suatu kawasan sudah tercatat sebagai kawasan hijau kalau diubah, misalnya kayak ide Pak Marco, sekarang ini ada sanksi pidana dan sanksi denda. Ini kita bisa dipenjarakan 5 tahun dan denda sampai 500 juta. Dulu kita mengubah itu tidak ada sanksinya, sekarang ada. Tapi, perlu

sedikit saya informasikan, tentunya ini nanti kita perlu berpikir bahwa ada beberapa fasilitas yang harus kita buat, misalnya tadi ada ide mau membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti topik hari ini, masih ada beberapa lahan tentunya. Karena kalau mau kita mulai dari mana dulu, tentunya nanti paling tidak apa yang sudah akan kita laksanakan. Jadi, informasi saja. Nanti reklamasi akan dibuat segera. Justru, mungkin, sebelum akhir tahun ini akan dimulai. Ini tentunya kita akan buat sebuah, katakanlah, pengembangan kawasan. Itu menjadi contoh untuk para seniman berkreasi di dalam ruang-ruang publik yang diharapkan nanti akan memberikan sebuah suasana lain. Tentunya, ke dalam juga nanti pelan-pelan kita buat begitu, karena gubernur kita yang baru besok sudah sepakat untuk bisa memperluas daerah hijau, taman-taman interaktif, yang kita akan tidak sekedar kecil-kecil tapi sesuatu yang *integrated* di mana masyarakat bisa berinteraksi. Masyarakat bisa saling mengenal dengan yang lain. Tentunya juga, bisa belajar.

Ini juga sedikit informasi bahwa kehadiran MRT yang akan dibuat akhir tahun depan, sekarang sedang dalam tahap *Special Assesment for Project Implementation (SAPI)*, sekarang dalam rangka penentuan di mana, memang sedikit masih ada masalah dengan pembebasan lahan. Ini tentunya ada beberapa kawasan-kawasan yang perlu kita pikirkan penyelesaian untuk ruang publik di dalam penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut.

Ini yang paling krusial, kita mohon juga nanti rekan-rekan, Bapak/Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Itu nanti di sekitar Dukuh Atas sampai Bunderan HI. Di situ nanti ada monorel, *shuttle bus* dari Manggarai *airport* yang akan dibuat tahun depan, ada MRT. Disitu, dulu pak Wagub juga sudah sedikit terlontar bahwa nanti daerah Dukuh Atas akan bergeser menjadi, katakanlah, kalau saya bisa menterjemahkan kata-kata wagub, Shinjoku-nya Jakarta sebagai satu cikal bakalnya kehidupan bawah tanah nanti. Ini karena sekarang kalau kita lihat kadang-kadang, saya mohon maaf beberapa kritikan, juga saya ikut andil dosa, kayak HI itu semestinya memang tidak segitu. Tetapi, itu bukan era saya. Mestinya memang sedikit

dikasih kesempatan untuk lebih banyak ruang publik yang kira-kira lebih manusiawi. Tapi, itulah kewenangan pemerintah pusat, di mana MOU ini antara Departemen Keuangan dan pihak pemilik modal yang akhirnya jadi begitu.

Jadi, tentunya ke depan, saya juga akan mencoba jiwa yang kita bicarakan hari ini bisa diimplementasi di masa-masa yang akan datang. Cuma itu. Saya cuma menginformasikan saja. Saya berusaha untuk, katakanlah, sesuatu fasilitas yang akan dibuat untuk publik itu kita cari sendiri, tapi partisipasi masyarakat ikut. Contohnya, desain bentuknya bagaimana masyarakat ikut berperan aktif.

Moderator:

Terima kasih sekali untuk penjelasannya.

Penanya 1: NN

Kalau kita berbicara seni di ruang publik, tentunya nanti disamping soal patung, monumen dan sebagainya juga diharapkan bisa mengembangkan berbagai kesenian rakyat, *performance*, pameran, dan sebagainya. Kita banyak sekali mengeluh bahwa ruang-ruang publik ini banyak disita oleh kegiatan-kegiatan komersial kaki lima, toko, *mall*, dan sebagainya. *Nah*, kalau itu terjadi, artinya banyak ruang-ruang publik yang kemudian diduduki atau diserbu oleh kegiatan komersial, itu juga kita lihat. Sebetulnya sekarang banyak juga ruang publik yang dibiarkan terlantar. Tidak diisi dengan kegiatan apapun dari sisi kesenian. Jadi, kalau kita ingin merebut kembali banyak ruang publik itu dari sisi komersial ke sisi seni budaya, barangkali, kita juga perlu siap bahwa taman-taman kita agar masyarakat memperbanyak kegiatan-kegiatan *cultural*-nya di dalam ruang-ruang publik itu. Sekarang pertanyaannya, apakah itu akan terjadi? Apakah itu bisa berlangsung? Dan, apakah juga nanti dari kalangan yang berwenang bisa merelakan? Barangkali yang dulunya itu banyak sekali dibayangkan bahwa ruang publik itu tidak semuanya menjadi rupiah, bahkan ruang publik itu menjadi nol rupiah. Demikian. Terima kasih.

Penanya 2: Rosihan Anwar

Ini buat saudara Marco. Jadi, fantasinya memindahkan Bukittinggi. Udah pernah dipikirkan berapa sih budget-nya begitu. *Just to give an idea*. Berapa itu harganya kalau mau diturunkan atau bikin begitu. Kita mesti dipikirkan berapa harganya?

Penanya 3: Herman Hidayat

Ini menyangkut tentang kanalisasi dan kita ingin bagaimana Ciliwung-Depok sampai Manggarai dijadikan sebagai wisata air. Apakah sudah terpikirkan untuk tata kota tentang masalah bagaimana air dari hulu sana? Uji coba Sutioso juga mengalami kegagalan. Seperti Bangkok, misalnya, airnya selalu melimpah. Kasus Manggarai sampai Dukuh Atas ini juga tidak berjalan. Jadi, wisata air sampai sekarang mengalami kegagalan. Bagaimana Jakarta dibersihkan. Model wisata seperti itu saya setuju sekali itu. Tapi, apakah hal-hal tentang ruang publik seperti itu dipikirkan?

Penanya 4: Mely G. Tan

Taman-taman kota banyak yang terlantar. Di sana, sebenarnya ruang-ruang terbuka hijau itu. Tapi, bagaimana dengan *planning*-nya di tata kota apakah diperhatikan soal-soal yang bertalian dengan ruang terbuka hijau itu. Dan yang menarik perhatian terhadap tanaman-tanaman yang dinamakan ruang terbuka hijau seperti di jalan Sudirman. Itu yang di tengah. Itu taman-taman apa yang ditanam di situ? Coba kita lihat saja. Bagi saya ini tanaman yang murah. Bagaimana dengan tanaman apa yang harus ditanam di situ? Apakah publik juga tidak/ada suara dalam menentukan tanaman-tanaman apa? Sebab, kita jalan di situ melihat, "Tanaman apa sih?" kita tidak bisa lain daripada lihat di tengah-tengah jalanan itu, dan pohon-pohon yang kita lihat bagus sudah besar, tetapi ditebang-tebang. Bagaimana itu? Ini satu hal yang saya lihat. Kepada saudara Marco, sebenarnya, ruang publik termasuk ruang terbuka hijau itu siapa yang punya? Sekali lagi, *decision maker* siapa? Saya kira ini terlalu otoriter. Hampir saya mau katakan teroris yang menentukan itu. Sebab hasilnya bukan main. Mata kita *get shore eyes* melihat hal-hal itu.

Satu pertanyaan kepada Pak Soenaryo. Sangat menarik apa yang dikemukakan. Pergolakan seorang seniman untuk merespon terhadap suatu pesanan. Itu yang digambarkan mengenai pesanan dari Ibu Tien, bagus sekali itu. Bagus sekali dalam arti bagaimana seorang seniman, boleh dikatakan, enggak ada suara. Harus menyerahkan diri dan barangkali juga, walaupun kelihatannya Pak Sunaryo itu kelihatan sedikit melawan tapi kayaknya tidak bisa. Pemesan itu yang menentukan. Bagaimana perasaan seninya dari seorang seniman kalau harus menyerah kepada pemesan. *Wah*, saya bingung juga itu. Ini suatu pergulatan yang saya bisa gambarkan. Kemudian, satu hal kecil saja. Kalau lihat patung terakhir dari Bung Karno-Hatta. Kelihatannya Bung Hatta orangnya lebih kecil, lebih pendek dari Bung Karno. Tapi, kelihatannya sama dan besar benar itu. Jadi ini perspektif kita saja?! Terima kasih.

Penanya 5: Citra

Ini kebetulan banyak pemangku kepentingan hadir di sini. Saya ingin memberi masukan saja. Patung seni tari itu, saya yakin ini terkait dengan masalah ideologi politik sebuah kekuasaan sebuah negara. Yang ingin saya katakan, saya berangkat dari sebuah kasus bahwa patung Diponegoro dulu itu sebelum dibangun disitu ada patung Kartini. Yang ingin saya sampaikan, sebaiknya kalau nanti ada kebijakan karya patung yang dibangun itu jangan menggusur patung-patung lain. Artinya, tidak ada patung-patung yang dibuat sebelumnya itu dikorbankan.

Saya sependapat dengan Ibu Melly bahwa di sini banyak hal yang terkait yang harus dibicarakan. Terkait juga dengan masalah kepentingan. Siapa sebenarnya yang memiliki ruang publik? Jadi, itu masukan dari saya. Terima kasih.

Penanya 6: Muhammad Hisyam

Saya pikir ada bagusnya juga perpaduan antara seni sastra dengan seni visual. Saya belum melihat ada di Indonesia. Di Leiden itu ada sajak-sajak tembok. Sangat menarik! Ada banyak sekali.

Kalau tidak salah, ada 100 sajak dari berbagai dunia, berbagai bahasa dituliskan di atas tembok-tembok, dan tembok-tembok itu tembok apa saja. Pokoknya kelihatan. Bentuk tulisannya itu bagus. Semua bahasa yang diluar bahasa Belanda dibawahnya ada terjemahannya. Jadi, sekaligus orang melihat seni visualnya dan kemudian orang membaca terjemahan dari puisi-puisi itu. Saya bangga karena ada karya Khairil Anwar di sana. Khairil Anwar digambarkan di situ dibelakangnya ada bambu runcing yang justru merupakan lambang perlawanan dari orang-orang Indonesia kepada orang Belanda. Di sana ada judulnya AKU, kalau tidak salah. Jadi, barangkali ini juga bisa kita apresiasi apakah hal-hal seperti itu mungkin apa tidak di kota yang besar seperti di Jakarta. Karena Leiden itu kota kecil saja. Terima kasih.

Jawaban: Pak Marco

Pak Rosihan, pertanyaan tentang biaya memindahkan Bukittinggi. Maksud saya tidak memindahkan Bukittinggi. Jadi, yang dibayangkan di situ adalah membuat kontur permukaan menyerupai permukaan Bukittinggi. Kalau kita hitung Ngarai Sihanok itu kedalamannya antara 30-80 meter. Lebarnya sempit sekali, kira-kira 4 meter sampai 120 meter. Kalau kita ambil sepanjang kira-kira 500 meter. Jadi, tinggal dihitung volumenya 500 meter kali 50 meter dalam. Jadi, kira-kira 1,25 juta meter kubik tanah. Justru menjadi murah karena membuat bukit dengan tanah yang diambil. Jadi tidak ada ekspor-impor tanah. Tanah yang digali untuk membuat ngarai digunakan untuk membuat bukit menyerupai bukit tinggi. Saya tidak tahu sekarang harga permeter kubik. Mungkin Pak Moko yang tahu. Permeter kubik kalau menggali tanah itu berapa? Kalau kita anggap, katakanlah sekitar 50.000 rupiah per meter kubik memindahkan tanah hanya menjadi sekitar 600 juta. Tapi, itu hanya soal memindahkan tanah. Kalau kita mau menanamnya dengan rumput barangkali harus ditambah lagi, dihitung permukaan. Jadi, saya pikir beberapa milyar sebetulnya. Jangan lupa saya tidak betul-betul bermaksud memindahkan Tugu Monas. Biar saja Tugu Monas ada di situ yang penting justru stasiun kereta bisa masuk ke dalam. Membentuk bukit-

bukit kecil dan lembah itu sehingga sekaligus membantu fungsi Jakarta menyerap air.

Ada satu yang belum saya sampaikan bahwa sebetulnya maksudnya Pak Moko itu digabungkan dengan stasiun bawah tanah. Jadi, di bawah bundaran HI yang diturunkan itu seharusnya ada stasiun *subway* dan kedalamannya kurang lebih segitu, kalau kita mau bikin. Jadi, artinya biaya itu tidak berarti, karena akan ditanggung oleh *subway*, karena dia memang harus bikin stasiun. Saya yakin kalau Pak Moko suatu ketika nanti membuat *subway* melewati itu pasti harus bikin stasiun di situ. Jadi, dengan sendirinya semua tempat itu harus dibongkar. Jadi, biayanya akan terintegrasi dengan biaya membuat stasiun, saya yakin itu sangat masuk akal. Pokoknya kalau kita mau bikin *subway* itu pasti bisa jadi.

Ada tiga lapis, diturunkan permukaannya. Di bawahnya lagi *subway*. Jadi orang masuk melalui terowongan disudut-sudutnya. Jadi, tidak menyeberang jalan lagi. Jadi, katakanlah, sudut Hotel Indonesia, sudut Hotel Mandarin. Jadi, sebetulnya ini suatu rencana yang bisa dipadukan dengan tata kota. Sama sekali bukan mimpi meskipun keliatannya radikal. Tapi, memang tujuannya membuat orang berpikir bahwa masalahnya adalah apa yang kita lihat sekarang tidak mengubah apa-apa. hanya setiap tahun tanamannya diganti. Setiap tahun permukaannya diganti. Setiap tahun *geser sana geser sini*. Tidak membawa perubahan yang berarti.

Pertanyaan kedua, saya rasa penting sekali soal bagaimana menghidupkan ruang publik. Ini di dalam sejarah Eropa ada yang disebut *animation policy* 'kebijakan menghidupkan ruang terbuka'. Itu menjadi penting di tahun-tahun sesudah perang, di tahun 60. Ini saya rasa sangat *valid* untuk melakukan ini.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, ruang terbuka itu aksesibilitasnya harus jelas. Bukan hanya soal jumlah taman hijau yang penting, tetapi ruang itu mudah dicapai atau tidak. Kalau ada satu ruang yang sangat bagus, tetapi untuk menyeberang jalan mencapai ruang itu saja susah, seperti lapangan monas, itu akan

sulit. Ruang terbuka yang bagus itu harus diintegrasikan dengan lebih banyak dukungan untuk pejalan kaki. Sebab tidak logis menggunakan ruang terbuka tanpa banyak pejalan kaki. Karena itu kami menentang gedung parkir yang dibuat di dalam Lapangan Menteng, misalnya. Tidak apa-apa mengeritik. Itu bukan dosanya Bapak.

Kedua, harus ada masyarakat disekitarnya. Harus ada komunitas. Meskipun tentu kita bisa melihat ruang terbuka hijau yang berbeda-beda. Ada ruang terbuka hijau yang barangkali di dekat daerah komersial, karena itu wilayah pelayanannya lebih luas. Tetapi, menurut saya yang paling banyak diperlukan di Jakarta justru ruang-ruang terbuka yang berada di dalam lingkungan perumahan. Sekarang ada satu teknik yang disebut *community garden*. Itu artinya, masyarakat diajak untuk merawat berikutan bercocok tanam di ruang terbuka itu. Tetapi, tentu apa yang boleh ditanam di situ merupakan kesepakatan dari komunitas kita.

Kami, Dewan Kesenian Jakarta, mempunyai beberapa kegiatan yang bertujuan menggiatkan animasi ruang publik. Minggu lalu, seperti yang saya sampaikan dengan Pak Rosihan, kami mendatangi *saluang bedendang* ke lapangan parkir pasar Rawa Bening di depan stasiun Jatinegara. Sampai jam 3 pagi, Pak. Saya sendiri hanya sampai jam 1:30. itu luar biasa hidupnya. Kemudian, Jumat malam lalu ada yang menari di sungai di Pasar Baru. Jadi halaman muka Kompas hari Sabtu. Aku Hampir Plastik, judulnya. Itu foto diambil dari peristiwa itu. Jadi, ada program-program DKJ yang mengarah ke situ. Memang harus diisi. Harus diprogramkan. Tapi, programnya tidak bisa jalan sendiri kalau belum ada komunitas yang menerima. *Saluang Badendang* itu ada komunitasnya, yaitu Persatuan Pedagang Minang di pasar itu. Bulan depan atau dua bulan lagi, kami akan mendatangkan pertunjukan dari Madura. Kami sedang mencari komunitasnya.

Bagi kami, ini juga cara untuk menghidupkan apa yang disebut multikulturalisme aktif. Sebab kita ini bukan hanya menghadapi ancaman fundamentalisme yang membuat orang takut

mengekspresikan kebudayaannya, tapi orang menjadi tertutup dan takut menawarkan keindahan kebudayaannya kepada orang lain. Menurut saya itu salah. Multikultural aktif adalah saya bangga. Saya menawarkan kebudayaan saya untuk siapa yang akan menikmati. Kalau tidak suka tidak apa-apa, tapi saya boleh bangga. Saya rasa itu akan lebih mencairkan hubungan antar kelompok, antar ras dan bahkan indah kalau kita bisa saling belajar dari kebudayaan orang lain itu menurut saya sangat indah. Saya merasa saya pergi ke Aceh selama satu tahun. Saya jadi lebih mengenal Indonesia, dan seterusnya. Jadi, menganimasi kegiatan.

Ketiga, saya rasa masyarakat perlu diorganisir untuk itu dan kemudian membentuk asosiasi antara organisasi-organisasi warga yang berdasarkan tempat. kemudian ada semacam asosiasi. Gunanya adalah supaya yang satu bisa mengetahuinya dan bisa belajar satu sama lain. Kita bicara mengenai ini dengan Ibu Melly tadi di luar.

Mengenai ruang terbuka yang terlantar, saya rasa jawabannya sama. Memang harus ada kebijakan animasi. Ini apa yang saya bilang kebijakan kita tentang ruang publik itu karena begini. Kebijakan ruang publik itu sebenarnya sangat tergantung pada imajinasi kita tentang apa yang disebut publik. Sama seperti minggu lalu kita diskusi. Ekonomi, kita mau disusun seperti apa, bergantung kepada imajinasi kita tentang bangsa Indonesia. Dan itu perlu dilakukan. Mungkin di Eropa itu pengalaman *animation policy*. Contoh misalnya kota Barcelona ketika menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 1992, itu dengan sengaja mereka menggunakan kesempatan itu untuk melakukan animasi kembali dengan sedikit modifikasi dari pengertian *animation policy* tentang menghidupkan ruang-ruang publik di dalam kota Barselona. Jadi, memanfaatkan kesempatan itu dan itu berhasil terbukti.

Penggantian tanaman besar ini juga saya setuju sekali. Sampai sekarang pun saya masih sering memberikan SMS kepada kepala dinas pertamanan kalau menemukan pohon ditebang dan sebagainya. Memang ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah

sebagai *policy* dan saya tidak mengatakan saya mengerti. Saya mengerti mengapa pohon besar diganti oleh tanaman kecil. Kecuali bahwa tanaman besar itu agak rusak atau mengandung penyakit. Pada dasarnya memang Jakarta memerlukan pohon besar untuk menyerap Co2 dan untuk melindungi dan untuk meneduhi kota, kemudian juga untuk menahan air dan seterusnya. Tanaman hias itu biarlah ada di rumah-rumah pribadi. Tapi mestinya di lapangan, di ruang kota itu harusnya pohon besar. Tapi, pohon besar memang tidak selalu baik. Banyak pohon kita ditanam yang sekarang besar-besar. Jadi, ditanam kira-kira 20 tahun yang lalu itu pohon yang memang ringkih, tapi itu cepat tumbuh karena itu dipilih. Sekarang, mungkin, memang mungkin waktunya diganti. Barangkali itu juga latar belakangnya. Harus dicek kepada kepala dinas pertamanan. Jadi, yang penting memang harus hati-hati ketika mengganti pohon, harus yakin itu lebih baik.

Soal siapa yang memiliki ruang publik ini memang tidak sesederhana menyalahkan pemerintah. Sebetulnya, karena kapital selalu berada di belakang. Tadi kita sudah bicara mengenai mural. Mural itu di Jakarta ditemukan oleh teman-teman seniman pada festival JAKARTA tahun 2001. Mural diperkenalkan. Seniman menemukan ada dinding-dinding kosong di bawah kolong tol. Tiang-tiang jalan tol dicat menjadi karya seni. Sedikit ada kesalah pahaman, beberapa dihapus oleh dinas apa *lah*, karena dianggap ini seperti grafiti atau seperti tidak sengaja. Kemudian, berhenti. Lalu, di Yogya sangat hidup sampai sekarang, tapi sama. Kemudian, kapital mengintip di belakangnya dan memanfaatkannya sebagai iklan, ruang iklan. Sebenarnya kita lihat juga di bawah jembatan Kuningan. Itu menjadi ruang iklan sekarang, bersaing dengan seniman. Di Yogya, ada sebuah taman yang ditata di tengah jalan. Jadi, jalan yang menuju ke Universitas Gajah Mada. Itu median tengahnya. Ada suatu proyek untuk menata taman itu. Ujung-ujungnya hanya untuk menyediakan tempat supaya bisa pasang iklan. Jadi, seketika masyarakat, pada waktu itu, membentuk apa yang disebut kerupuk 'Kelompok Pencinta Ruang Publik Kota' untuk menentang ini. Lalu, seniman-seniman

mural juga berjuang keras melawan komersialisasi dinding-dinding jalan tol untuk iklan rokok yang sekarang, kalau tidak salah, Djarum atau Sampoerna.

Jadi, kita lihat yang menarik adalah bagaimana seni atau seniman menemukan banyak hal baru, tapi kemudian di kuotasi. Kapital selalu di belakangnya dan kemudian secara tanpa malu-malu meminta itu dilegalkan. Saya dengar katanya tata kota mau bikin Perda untuk melegalkan penggunaan ruang-ruang kosong ini sebagai iklan. Makanya saya tadi mengangkat isu yang saya sebut kota kita ini sekarang penuh dengan ruang-ruang dan permukaan-permukaan yang baru dan itu harus dipilih secara sadar kita mau jadikan apa. Kalau kita diam-diam saja, kapital yang aktif. Punya uang dan lain sebagainya. Tapi, kadang-kadang ini tidak bisa menyalahkan pemerintah karena agak terlalu utopis kalau kita menganggap pemerintah selalu bisa mengendalikan kapital, tapi seluruh masyarakat harus mengendalikannya melalui mekanisme negosiasi yang rasional. Saya pikir begitu. Terima kasih.

Jawaban: Pak Sunaryo

Tadi masalah perjuangan seniman tergantung kadar senimannya. Saya sendiri pernah dan sering menolak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak cocok. Misalnya, ada seorang yang selalu nelpon, “Datang *dong* ke Jakarta. Datang *dong* ke Jakarta.” Waktu saya datang ke sana, saya dibawa ke suatu ruangan besar. Saya perlu relief di sini atau mural. “Saya kasih biayanya tinggi, Pak, “saya bilang begitu. ‘Gak apa-apa. Saya bayar.’” Artinya biaya-biaya tinggi tapi kurang memadai untuk ruang ini. kenapa? Jadi, pengetahuannya masih begitu rendah. “Kalau bisa ruangan ini Bapak membuat lampu yang lebih baik, Philip bisa mendesain. Karpets yang bagus. Kemudian, toilet yang bersih. Kalau itu sudah tercapai. Itu sudah indah. Kalau saya tambah relief di sini, yang lain dibiarkan tambah kumuh.” Itu sangat sering saya sampaikan begitu.

Kemudian, mengenai ada suatu Undang-Undang, patung harus ada undang-undang untuk dipindahkan. Saya pikir itu

berbahaya. Yang penting di DKI ini ada satu *board* yang mereview *grand design*, di mana perlu ruang publik dan di mana tidak perlu. Di mana ruang publik yang lama itu kurang baik, kurang pas, itu yang bisa di bongkar karena akhirnya pengkajian itu harus yang ahli. Jadi, tidak asal bongkar tapi dibongkar kalau memang manfaatnya tidak ada, kenapa tidak.

Kemudian, *board* itu juga masalah grafiti. Di Bandung pernah ada mahasiswa seni rupa untuk minta saran bagaimana ada satu jalan yang panjang, jalan Siliwangi, untuk dilukis. Kemudian, kenapa dilukis? Saya pematung senang sekali melihat materi suatu bahan. Misalnya, beton di ekspos begitu indah campurannya. Kalau pilok rasanya sakit apalagi kena cet. Sekalipun di Yogya ada suatu perkumpulan tetapi prinsipnya membuat polusi mata. Walaupun bagus-bagus, tidak pada tempatnya karena grafiti itu sebetulnya *subculture*, sehingga kalau di formiakan itu harus hari-hati sekali memilih mana yang bisa membantu refreasing kita di dalam kota dan mana yang membuat polusi mata kita. Maka, waktu yang di jalan Siliwangi saya tidak mendukung. “Kenapa? Ini adalah kegiatan seni rupa.” Saya pernah ada tamu orang Jerman. Dia takjub. Waktu melihat ini, ”*Wah*, hebat di kota mu ada dinding sepanjang ini bersih. Kemudian, berlumut. Saya bangga. Rupanya setahun kemudian ada lukisan mural. Untung dia sudah pulang.

Menganai sastra, saya pikir secara kecil-kecilan itu sudah banyak. Seperti, Pak Pirous juga pernah membuat tulisan Ramadhan, Taufiq Ismail. Jadi, kelihatannya sudah ada, hanya barangkali ada satu taman. Misalnya taman Chairil Anwar. Dilihat apakah patungnya saja. Mungkin ada satu dinding dan tulisan yang bagus. Itu kalau bisa kompetisi. Kompetisi itu cara bagus untuk memilih mana yang terbaik.

Saya tadi mendengar mengenai penebangan. Pak Otto Sumarwoto, sekalipun pohonnya sudah besar jangan disalahkan pohon itu kemudian ditebang. Karena kenapa pohon itu menjadi sakit, karena tidak dipelihara. Jadi, kita kurang memelihara. Jadi sebaiknya

di kota itu ada *policy* karena ada yang tertimpa pohon tumbang, maka pohon yang di atas sekian tahun dipotongi. Yang *motong* pikirannya mau dijual, kemana dan berapa.

Moderator:

Terima kasih Pak Sunaryo. Bapak/Ibu sekalian, saya tidak akan ikhtisarkan lagi. Mungkin ini akan dirumuskan oleh panitia. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Marco, Pak Sunaryo, kepada hadirin sekalian. Mari kita berikan aplaus buat dua pembicara kita. Selamat sore.

PENUTUP

Prof. A.D. Pirous
Anggota Akademi Jakarta/Dosen ITB

Hadirin yang saya hormati. Ketika acara yang sangat berharga hari ini dirancang beberapa hari yang lalu oleh Akademi Jakarta yang kemudian dilaksanakan bersama-sama dengan PMB-LIPI, kami sebenarnya bergerak atau bertolak dari suatu yang sederhana. Memahami bahwa kota Jakarta itu sudah berusia hampir 5 abad (482 tahun). Kemudian, baru saja, sebagai ibu kota merayakan ke-62 tahun Republik Indonesia. Apalagi saya yang sudah berusia 70 tahun, dapat mempunyai saksi mata mengenai kejadian-kejadian dengan kota ini, yang kalau boleh kita petik beberapa yang sederhana yang gampang dilihat oleh mata kita. Banyak sekali patung-patung yang mulai didirikan sejak zamannya Soekarno dulu tersebar di seluruh Jakarta yang sifatnya itu sangat heroik. Menggambarkan kepahlawanan. Semangat yang besar ketika itu. Di mana, kota Jakarta sendiri masih sangat datar, belum ada gedung-gedung yang tinggi, selain dari dua gedung yang disebutkan oleh Pak Taufik, yaitu Sarinah dan gedung Nusantara itu, dibandingkan dengan sekarang.

Kemudian, kita waktu itu berpikir kota ini tiba-tiba dalam 20 tahun terakhir ini bergerak begitu cepat. Begitu cepatnya, sehingga tiba-tiba kita melihat jejak-jejak yang didirikan sejak tahun 60-an itu tiba-tiba seperti tertinggalkan atau terlupakan. Mungkin, kita duga ketika itu, mungkin kita tidak punya *master plan* yang utuh atau yang benar-benar di buat tentang Jakarta ini. Barangkali mungkin iya. Tapi yang sudah terang bahwa kita punya satu sifat setelah membuat sesuatu yang besar, dan ketika kita mau membuat sesuatu yang baru, kita lupa kepada yang kita buat besar itu. Itu yang terlihat tadi dari contoh-contoh yang diperlihatkan. Bagaimana patung Dirgantara yang di Tebet itu ketika aslinya begitu agung, begitu menjulang ke langit. Kalau kita lihat sekarang itu dikepit oleh jalan layang dan rimba kabel dan tiang-tiang di sekitarnya. Begitu juga dengan patung

Selamat datang di depan HI. Dulu agung sekali, sekarang dijepit dengan gedung-gedung yang besar. Patung yang di Banteng juga demikian. Malah ada patung yang digudangkan, atau semacam itu.

Jadi, kita dalam bergerak ke depan itu selalu tidak memperhatikan apa yang sudah kita bikin. Itu yang barangkali satu hal yang lebih ringan daripada kita tidak mempunyai *plan* sama sekali.

Hari ini sebenarnya apa yang terjadi dengan kita mengundang tiga orang sebagai pembicara. Satu orang dari suatu masyarakat yang sudah berkembang dengan baik, yaitu Dr Shiebe Thissen menceritakan kepada kita bagaimana sebuah pola kota yang berkembang yang begitu indah. Dan satu hal yang menarik pada kita, adalah bahwa yang terlibat dalam suatu rumusan sebuah kota menjadi kota manusiawi di mana manusia hidup dengan aman dan bahagia tidak hanya pekerjaan satu dua orang saja, tapi suatu kolaborasi yang akrab antara pemerintah kota, seniman, arsitek, dan *urban planner*. Yang paling penting pembicaraan hari ini, saya mendapatkan pesan dari apa yang diuraikan oleh Shiebe itu adalah bahwa rakyat itu sendiri adalah memegang peranan yang terbesar di dalam menentukan apa yang mereka mau.

Tadi malam kami berbincang-bincang. Dia mengatakan selalu ada konflik antara seniman dengan tata kota yang membuat bangunan-bangunan itu. Misalnya, ketika membuat sebuah jembatan. Shiebe mengatakan kami yang membuat. *Ah*, jangan kalian yang membuat, kalau kalian yang membuat akan menjadi lebih mahal, karena memang ada elemen-elemen estetik yang masuk di dalamnya itu. Sedangkan kalau tata kota yang membuat itu jembatan. Aman orang lewat selesai sudah. Itu terjadi juga di kota Bandung. Ada jembatan layang yang besar sekali. Tiba-tiba di atasnya *nongkrong* suatu bentuk yang mahal sekali, yang tidak mempunyai fungsi konstruksi sama sekali, estetik saja. Banyak orang senang. Padahal seperti begitu saja.

Jadi, dari pembicaraan kami ini, kita melihat ada suatu perubahan-perubahan, baik di dalam ide maupun di dalam material yang dipakai, maupun keterlibatan orang-orang dalam menentukan pertumbuhannya sebuah kota. Misalnya, bentuk-bentuk baru yang selama ini kita menganggap bahwa karya seni itu ada dalam bentuk patung, lukisan, mural, dsb. Tapi, sekarang mungkin juga yang membuat manusia itu nyaman, ada bangku-bangku ditaman yang indah. Mereka duduk dengan nyaman bersama patung-patung yang ada di taman itu atau ada jembatan yang indah, atau ada halte bus yang atapnya itu dibuat begitu rupa, seperti di Hanover. Begitu pula tepi sungai bisa menjadi lebih indah.

Pertumbuhan kota Jakarta ke depan, dengan pembicaraan kita hari ini, saya rasa kita mempunyai mimpi yang lebih kaya. Itu salah satu keuntungan dari pertemuan kita hari ini menurut saya. Kemudian material yang dipakai. Kalau selama ini bentuk yang padat saja. Entah itu patung, entah itu lukisan dan sebagainya. Tapi, tadi ditawarkan oleh Shiebe Thissen dengan baik sekali. Ada kota yang mencoba bagaimana mem-*beuty*-fikasi kota itu dengan suara. Ada jalan yang dibuat begitu rupa, sehingga kita jalan terjadi suatu bunyian yang membuat kita sadar berada di mana. Kemudian dengan haruman-haruman tertentu, dan sebagainya. Jadi, elemen-elemen yang masuk dalam penjelmaan kota yang membuat kita bahagia itu menjadi sangat beragam.

Hari ini semuanya fantasi itu dilemparkan keluar. Tadi saudara Marco berbicara, tiba-tiba dia terbayang bagaimana Bukittinggi ada di Monas. Jadi, sebenarnya kenyataan itu semua berasal, berangkat dari mimpi. Hari ini saya rasa Akademi Jakarta sudah berhasil membawa kita dengan tiga orang pembicara utama dan ditambah dengan *keynote speaker* tadi itu suatu mimpi baru. Tinggal kita sekarang apa kita mau apa dengan mimpi itu? Jangan sampai kita bermimpi saja. Makanya apa yang kita bicarakan hari ini, kita kumpul, kita peras dengan baik mungkin bisa menjadi usulan kepada apa yang mau dibuatkan itu.

Yang *kedua*, barangkali, ini bukan yang terakhir, tapi juga ada yang menyarankan barangkali Akademi Jakarta, ke depan, barangkali kita merancang sesuatu, kelanjutan daripada aksi ini.

Mengenai mural-mural yang tadi dikatakan juga. Saya pernah melihat. Bukan saja dilukiskan di tempat yang sudah baik, dibawah jembatan yang sudah bagus, tetapi terutama mural itu diberikan di sudut-sudut yang sudah kumuh dan lusuh. Justru mural itu akan memberikan spirit baru kepada lingkungan itu. Jadi, bukan kaki-kaki jembatan yang sudah bagus, yang baru dibeton sebagaimana yang dikatakan saudara Soenaryo tadi. Begitu indah tiba-tiba dilumuri oleh gambar-gambar yang macam-macam, maksudnya baik, tapi ternyata jadi lebih tidak baik. Jadi kita memang harus sangat pintar, sangat pandai memelihara yang sudah kita buat. Jangan merusak dengan perbuatan kita yang baru.

Saya rasa hal - hal inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tahun depan Akademi Jakarta akan membicarakan masalah *sound pollution* 'polusi suara'. Bagaimana polusi suara di dalam kota ini. Barangkali bisa merupakan suatu mimpi yang besar dan imajinasi yang besar seperti yang kita dapatkan pada hari ini. Itulah barangkali catatan yang kami sampaikan setelah beberapa bulan kami persiapan acara ini. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh